

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

PT. Perkebunan Nusantara VI (Persero) yang terletak di provinsi Jambi merupakan salah satu BUMN di Indonesia. PTPN VI (Persero) dalam membangun hubungannya dengan masyarakat sekitar menjalankan CSR sebagai salah satu upaya mewujudkan prinsip kemitraan yang menjadi salah satu tujuan utama Perusahaan. Akibat status kepemilikannya, PTPN VI (Persero) dalam menjalankan CSR juga tidak terlepas dari pengaruh Pemerintah. Melalui SK. Menteri No. 236/MBU/2003, PTPN VI (Persero) melaksanakan Program Bina Lingkungan sebagai salah satu wujud dari CSR yang dilaksanakan mulai tahun 2003.

Dari hasil pengumpulan data dan analisis mengenai penerapan CSR dalam program *community relations* PTPN VI (Persero) dapat disimpulkan pemahaman mengenai CSR sebagai berikut :

1. Pemahaman yang terbentuk dalam manajemen PTPN VI (Persero) mengenai CSR berbeda – beda di tiap levelnya. Terdapat perbedaan pemahaman pada publik yang terlibat dalam CSR, aspek *triple bottom line*, *voluntary*, *philanthropy*, dan *stewardship principle*. Persamaan pemahaman CSR pada tiap level manajemen yang terlibat, pada pemahaman dimana CSR harus mampu dilaksanakan *sustainable* dan menciptakan *win – win solutions*.
2. Dalam memahami CSR PTPN VI (Persero) tidak melakukan suatu komunikasi dan perumusan untuk menetapkan satu pemahaman bersama di tiap level manajemen PTPN VI (Persero).

3. Pemahaman CSR pada PTPN VI (Persero) dipengaruhi oleh beberapa elemen, sebagai berikut :

I. Kondisi eksternal, meliputi :

a. Kepastian Hukum, yang terdiri dari :

1. Undang – undang No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
2. SK Menteri No. 236/MBU/2003
3. SK Menteri Negara BUMN No. : KEP-117/M-MBU/2002

b. Regulasi dan standard

Regulasi yang berasal dari lembaga internasional tidak langsung memberikan pengaruh pada pemahaman PTPN VI (Persero). Regulasi dan standard ini mempengaruhi Peraturan Pemerintah yang berpengaruh pada pemahaman PTPN VI (Persero) mengenai CSR.

c. Insititusi komplementer, terdiri dari :

1. Lembaga Non – pemerintah yang tidak secara langsung mempengaruhi pemahaman Manajemen.
2. Media massa

II. Kondisi internal meliputi :

a. Struktur Kepemilikan

PTPN VI (Persero) merupakan perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh pemerintah. Maka pemahaman yang terbentuk pada Manajemen PTPN VI (Persero) berasal dari Peraturan Pemerintah, termasuk pemahaman bahwa menjalankan CSR adalah kewajiban.

b. *Corporate Governance*, terdiri dari :

1. Struktur perusahaan, budaya dan peran dewan direktur

Struktur perusahaan yang merupakan badan usaha milik negara (BUMN), sehingga dalam memutuskan suatu paradigma dipengaruhi oleh keputusan pemerintah. Sedangkan budaya perusahaan yakni keterbukaan, kebersamaan, kebersihan dalam meraih prestasi. dilandasi dengan lima sikap kerja yakni percaya, terbuka, positif, rasional dan sadar biaya. Peran dewan direktur adalah menjalankan perusahaan untuk mencapai tujuan dan maksud dari perusahaan, dan kaitannya dengan CSR yakni menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta menetapkan struktur organisasi khususnya berkaitan dengan pelaksanaan CSR.

2. Komite etika dan CSR

PTPN VI (Persero) tidak membentuk suatu komite khusus yang mengatur CSR dalam perusahaan. Adapun komite yang dibentuk yakni komite audit, yang berperan pada tahap pelaporan kegiatan CSR yang dilakukan oleh perusahaan.

3. Proteksi hak pemegang saham minoritas

Tidak ada proteksi pemegang saham minoritas, dikarenakan kepemilikan PTPN VI (Persero) sepenuhnya milik Pemerintah.

c. Strategi korporat (daya saing) dan sistem manajemen internal.

Strategi yang diterapkan PTPN VI (Persero) yakni membangun pola kemitraan yang serasi. Sedangkan sistem manajemen internal PTPN VI

(Persero) tidak melakukan langkah apapun dalam merumuskan satu pemahaman. Sehingga sistem manajemen internal yang ada dalam PTPN VI (Persero) tidak mempengaruhi pemahaman CSR.

Penerapan CSR dalam program *community relations* dapat dilihat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program *community relations* PTPN VI (Persero) yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan CSR ke dalam perusahaan, PTPN VI (Persero) melakukannya berdasarkan peraturan pemerintah yang berlaku wajib bagi BUMN, yang kemudian diadopsi ke dalam kebijakan strategis perusahaan pada bagian visi dan misi. Visi dan misi ini yang dipahami sebagai dasar dari PTPN VI (Persero) dan merupakan komitmen awal dari perusahaan, dimana manfaat yang ingin diraih adalah kemitraan yang serasi dengan stakeholder.
2. Manajemen PTPN VI (Persero) tidak melakukan suatu analisis kondisi eksternal ataupun analisis SWOT untuk mempertimbangkan manfaat CSR bagi perusahaan yang diperoleh dari integrasi CSR ke dalam bisnis.
3. Manajemen PTPN VI (Persero) melakukan pengkajian ulang dengan mendefinisikan kembali kepada siapa tanggung jawab pelaksanaan CSR diberikan. Tanggung jawab diberikan kepada Direksi SDM/Umum. . Rencana tindak dan strategi ini dilaksanakan oleh manajemen PTPN VI (persero) melalui penyusunan SOP dan RKA. Penentuan sifat dari isu – isu CSR yang meliputi menentukan tipe tantangan CSR, tidak dilakukan oleh manajemen. Dalam penyusunan RKA, manajemen PTPN VI (Persero) tidak melakukan

manajemen isu secara detil dan lebih menitikberatkan pada pembagian alokasi dana terhadap isu yang sudah diatur pemerintah.

4. Program Bina Lingkungan yang merupakan program CSR PTPN VI (Persero) hanya memenuhi aspek sosial saja, tidak memenuhi aspek *triple bottom line*. Program Bina Lingkungan melaksanakan aspek *voluntary*, dilihat dari keleluasaan jumlah alokasi dana yang diberikan oleh Pemerintah kepada manajemen. Program Bina Lingkungan juga melaksanakan aspek *philanthropy*, dilihat dari tidak adanya keuntungan materi yang diperoleh PTPN VI (Persero). Pelaksanaan aspek *sustainable* dan *win – win solutions* dalam program Bina Lingkungan dilihat dari tujuan program yang menyatakan membentuk masyarakat yang mandiri dan tujuan akhir mendatangkan keuntungan bagi kedua belah pihak. Sedangkan aspek *stewardship principle* tidak dipenuhi Program Bina Lingkungan.
5. Dalam pelaksanaan program CSR, PTPN VI (Persero) tidak melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Masyarakat bertindak sebagai penerima bantuan dalam program ini.
6. Berkaitan dengan aspek pelestarian budaya dan lingkungan, PTPN VI (Persero) baru merumuskan dalam kebijakan saja. Belum pada program khusus yang menangani isu budaya dan lingkungan.
7. Tahap evaluasi program CSR tidak pernah dilakukan secara khusus. Keberhasilan program diukur dari dua kondisi yakni adanya kondisi lingkungan kerja yang aman dan tidak ada gangguan / konflik. Evaluasi dititikberatkan pada tahapan membuat laporan saja. Monitoring program

dilakukan berkisar pada peninjauan kembali atas bantuan yang telah diberikan apakah digunakan dan berguna atau tidak.

8. Fungsi *public relations* yang dijalankan oleh Unit Humas dan PU tiap kebun berkaitan dengan pelaksanaan CSR PTPN VI (Persero) merupakan fungsi komunikasi dan opini publik yang berada dalam tataran teknis.

B. KELEMAHAN PENELITIAN

1. Dalam penelitian ini penulis tidak bisa mendapatkan data – data tertentu secara lebih mendetail dan mendalam khususnya berkaitan dengan pemahaman CSR oleh Top Manajemen (dalam hal ini Direksi), komunitas yang hanya diwakili oleh dua desa yang kurang dibandingkan dengan area kerja PTPN VI (Persero) yang cukup luas.
2. Dalam penelitian ini penulis tidak bisa langsung mengamati bagaimana penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi program Bina Lingkungan yang menjadi program CSR dari PTPN VI (Persero)

C. SARAN

1. Ketidaksamaan pemahaman CSR pada tiap level manajemen yang terlibat dalam pelaksanaan CSR merupakan keadaan yang tercipta akibat tidak adanya perumusan pemahaman dan komunikasi organisasi yang bisa dilakukan manajemen. Ketidaksamaan pemahaman ini menyebabkan kebingungan untuk menentukan manfaat strategis yang ingin diperoleh, program apa yang benar – benar melakukan CSR. Maka dari itu, hendaknya PTPN VI (Persero) merumuskan suatu kesepahaman bersama dalam manajemen yang mengadopsi juga peraturan pemerintah. Sehingga pemahaman manajemen

tidak hanya langsung berpatokan pada peraturan pemerintah yang banyak, dan tidak mengadopsinya ke dalam kondisi perusahaan.

2. Dalam perencanaan, Unit PKBL lebih menitikberatkan pada alokasi pembagian dana. Pemilihan prioritas isu hanya dilihat secara garis besar tanpa melihat lebih lanjut dan menganalisa bagaimana permasalahan yang ada dalam isu besar tersebut dapat diatasi. Keadaan yang kemudian tercipta adalah program CSR hanya sekedar bersifat karitas, tanpa mencoba memecahkan masalah dalam masyarakat yang dapat membangun kemandirian masyarakat. Alasan manajemen yang menyatakan bahwa objek telah diatur Pemerintah sebenarnya bisa dikembangkan lebih detil lagi, karena penulis melihat bahwa objek bantuan yang ditetapkan Pemerintah sifatnya luas dan memberi ruang gerak bagi manajemen untuk melakukan langkah – langkah yang lebih spesifik dan detil.
3. Dalam penerapan CSR, manajemen belum pernah melibatkan masyarakat ke dalam tahapan proses program Bina Lingkungan. Masyarakat hanya bertindak sebagai penerima bantuan. Dikarenakan komunikasi yang kurang, maka kedekatan manajemen PTPN VI (Persero) dan masyarakat tidak dapat terbangun. Manfaat CSR yang diinginkan oleh manajemen akan mengalami kesulitan untuk tercapai. Maka, manajemen PTPN VI (Persero) perlu melibatkan masyarakat, sehingga manfaat yang diinginkan yakni dukungan dari masyarakat bisa diperoleh. Pelaksanaan CSR di lapangan pun bisa dilakukan lebih efektif dari sebelumnya dikarenakan manajemen tahu

bagaimana permasalahan sebenarnya di masyarakat dan tidak hanya sekedar memberikan bantuan sosial saja.

4. Dalam pelaksanaan program CSR, karyawan tidak pernah dilibatkan dengan alasan tidak memiliki skill. Ini menyebabkan kedekatan antara perusahaan dengan masyarakat kurang terbangun. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa manajemen perlu melibatkan karyawan untuk ikut dalam kegiatan program Bina Lingkungan. Misalnya saja, menjadi panitia acara sosial dan tidak hanya mengandalkan pihak ketiga (yayasan) saja, atau menjadi guru ngaji di masjid sekitar lingkungan. Dengan demikian ada komunikasi antara karyawan dengan masyarakat. Sehingga kesan sombong yang terbangun di mata masyarakat dapat dinetralkan.
5. Tahapan evaluasi dan monitoring tidak dilakukan secara khusus dan lebih menitikberatkan pada bentuk laporan. Keadaan yang tercipta adalah manajemen tidak tahu keberhasilan program dilihat dari masyarakat. Kriteria yang ada tidak ditindaklanjuti apakah sudah tercapai atau belum. Manajemen hanya menilai dari permukaan saja (kriteria masyarakat mendukung diartikan dengan tidak adanya gangguan kepada perusahaan). Temuan penulis seperti tidak adanya keseragaman pendapat di tiap desa tentang PTPN VI (Persero) menjadi salah satu akibat dari kurangnya evaluasi dan monitoring.

Penulis menyarankan, PTPN VI (Persero) bisa lebih memaksimalkan fungsi PU untuk menampung aspirasi masyarakat ketika PU melakukan kegiatan silaturahmi. Evaluasi dilakukan bukan hanya sekedar menanyakan pendapat masyarakat, tetapi juga menindaklanjuti keluhan tersebut.

6. Penulis melihat dalam menjalin hubungan dengan komunitas, PTPN VI (Persero) tidak memiliki aturan tertulis atau garis besar panduan untuk manajemen tiap kebun. Keadaan yang terjadi adalah hubungan dengan komunitas sekitar kebun menjadi sangat tergantung dengan ADM kebun masing – masing dan menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan ketika penulis bertanya kepada masyarakat mengenai keberadaan PTPN VI (Persero).

Maka dari itu, manajemen hendaknya perlu merumuskan semacam *guidelines* yang wajib dilaksanakan manajemen tiap kebun, agar visi yang menyatakan kemitraan yang serasi dengan stakeholder dapat tercapai lebih baik dari sebelumnya.

7. Berkaitan dengan fungsi *public relations*, unit Humas yang bertindak sebagai humas pusat PTPN VI (Persero) sebaiknya tidak hanya berfokus pada aktivitas media relations saja, namun juga memaksimalkan fungsinya dalam membangun hubungan dengan komunitas dan berkoordinasi langsung dengan humas kebun. Adanya integrasi antara kedua fungsi *public relations* ini dapat memaksimalkan fungsi *public relations* sebagai pusat informasi mengenai publik perusahaan, termasuk di dalamnya komunitas.

8. Mengaktifkan kembali penulisan release di website PTPN VI (Persero), sehingga masyarakat secara luas dan publik PTPN VI (Persero) dapat memperoleh informasi lebih mudah dengan mengunjungi situs PTPN VI (Persero), khususnya mengenai perkembangan pelaksanaan CSR di PTPN VI (Persero).

DaftarPustaka

BUKU

Argenti, Paul. 2003. *Corporate Communications Third Edition*. New York. McGraw Hill Inc.

Baskin, Otis., Aronoff, Craig. & Dan Lattimore. 1997. *Public relations, The Proffesion and The Practice*. United State of America: Brown & Benchmark.

Baskin, Otis., Lattimore, Dan., Heiman, Suzette T., Toth, Elizabeth L., Van Leuven, James K. 2004. *Public Relations The Profession and The Practice*. New York. McGraw Hill Companies.

Cutlip, Center & Broom. 2006. *Effective Public Relations*. New Jersey: Prentice Hall Inc. Ninth Edition.

Daniri, Mas Achmad. 2005. *Good Corporate Governance Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia*. Jakarta: Ray Indonesia.

Grunig, James E. 1992. *Excellence in Public relations and Communication Management*. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Publishers.

Heath, Robert. 2000. *Handbook of Publis Relations*. Thousand Oaks California: Sage Publications Inc.

Heath, Robert. 2005. *Encyclopedia of Public Relations Volume 1*. Sage Publications Inc.

Heath, Robert. 2005. *Encyclopedia of Public Relations Volume 2*. Sage Publications Inc.

Iriantara, Yosol. 2004. *Community Relations Konsep dan Aplikasinya*. Bandung: Simbiosia Rekatama Media.

Jalaludin, Rakhmat. 1991. *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung. Remaja Rosdakarya.

Jahja, Rusfadia Saktiyanti.; Irvan, Muhammad. 2006. *Menilai Tanggung Jawab Sosial Televisi*. Depok. Piramedia.

Kotler, Philip dan Nancy Lee. 2005. *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY Doing the Most Good for Your Company and Your Cause*. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.

Lawrence, Anne T., Weber, James dan Post, James E. 2005. *Business and Society Stakeholders, Ethics, Public Policy*. New York. McGraw-Hill International Edition. Eleventh Edition.

Moleong, Dr Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Natzir, Mohammad. 1988. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Nawawi, Hadari H. dan Martini, Mimi H. 1994. *Penelitian Terapan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Tanaya, Jimmy. 2004. *Tanggung Jawab Sosial Korporasi*. Jakarta. The Business Watch Indonesia – Widya Sari Press – Novib Oxfam Netherlands.

ARTIKEL

Grunig, James E. 1992. "What Is Excellence in Management ?" dalam Grunig, James E. 1992. *Excellence in Public relations and Communication Management*. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Publishers.

Daugherty, Emma L. 2000. "Public Relations and Social Responsibility" dalam Heath, Robert L. (ed), *Handbook of Public Relations*. Thousands Oaks California: Sage Publications Inc.

David, Prabu., Kline, Susan., Dai, Yang. 2005. *“Corporate Social Responsibility Practices, Corporate Identity, and Purchase Intention: A Dual Process Model”* dalam Journal of Public Relations Research. New Jersey. Lawrence Erlbaum Associates, Inc. Volume 17.

Hall, Margerete R. 2006. *Corporate Philanthropy and Corporate Community Relations: Measuring relationship-Building Results* dalam Journal of Public Relations Research. New Jersey. Lawrence Erlbaum Associates Inc. Volume 18.

Nursahid, Fajar. 2006. *“Praktik Kedermawanan Sosial BUMN: Analisis Terhadap Model Kedermawanan PT Krakatau Steel, PT Pertamina dan PT Telekomunikasi Indonesia”*. dalam GALANG Jurnal Filantropi dan Masyarakat Madani. Depok. PIRAC (Public Interest Research and Advocacy Center)

TERBITAN BERKALA

Surat Kabar Kompas. *Pemerintah Dorong Investasi di Papua*. Senin 27 Februari 2006.

hal. 23.

Majalah CAKRAM. *Promotainment di TV dan CSR Tren Kegiatan PR Tahun 2006*.

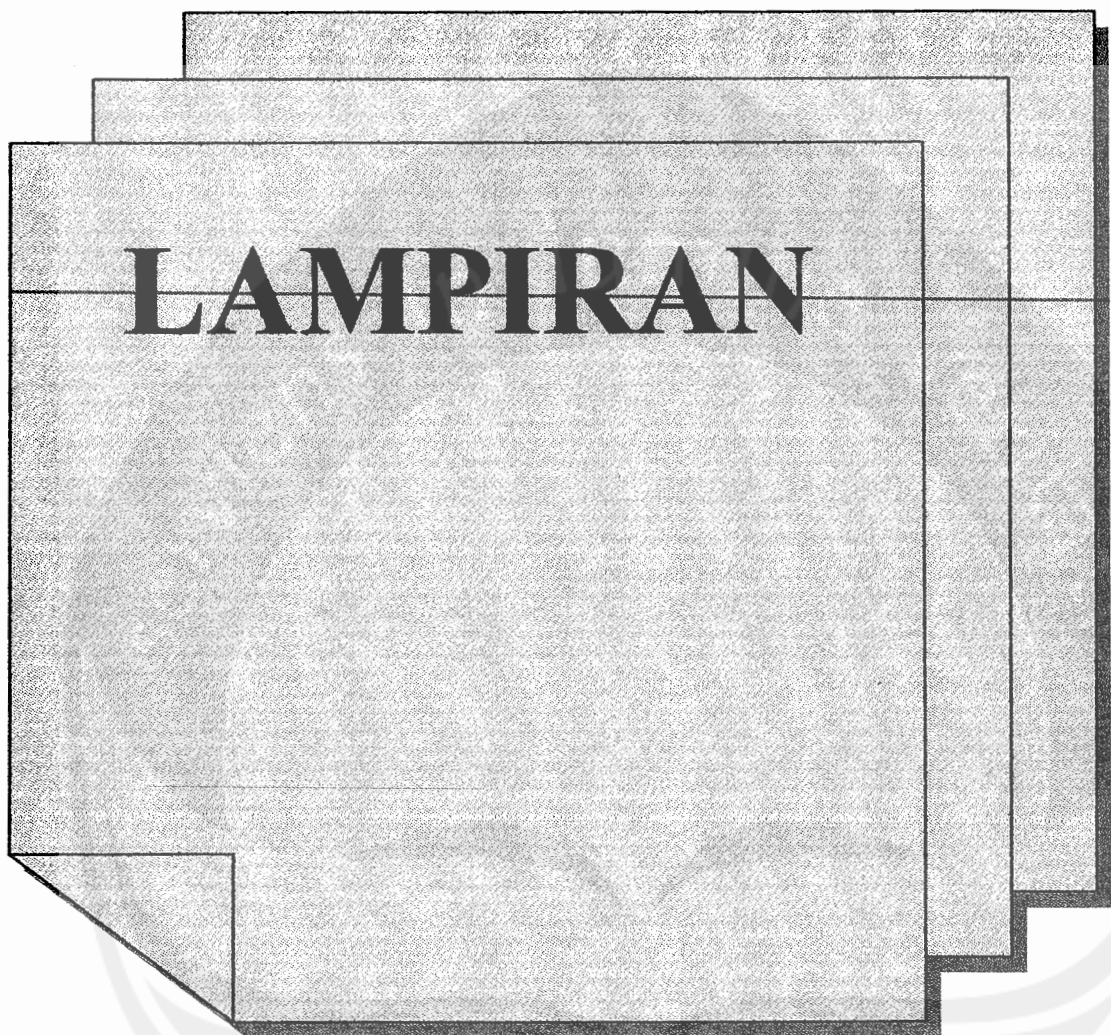
Januari 2006 / 263.

Majalah SWA Sembada. *Saatnya Menabur*. Edisi No. 26/XXI/19 Desember 2005 – 11

Januari 2006.

TULISAN TIDAK DITERBITKAN

Rienstra, Dianna. 2005. *The Philip Morris Insititute Report on The Challenges of Corporate Social Responibility*.



LAMPIRAN

LAMPIRAN 1



Interview Guide

Top Manajemen dan Humas

Penerapan Konsep *Corporate Social Responsibility* dalam *Community Relations*

Pada PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VI Jambi Sebagai Salah Satu Upaya

Mewujudkan Kemitraan yang Serasi

Gambaran Umum Perusahaan

1. Sejarah Perusahaan
2. Visi perusahaan
3. Misi perusahaan
4. Struktur organisasi
5. Profil perusahaan
6. Kode etik perusahaan

Corporate Social Responsibility

a Pemahaman CSR oleh Manajemen

1. Bagaimana manajemen memandang corporate social responsibility?
 - Apakah tertuang dalam visi dan misi perusahaan? atau dirumuskan secara spesifik dalam kode etik perusahaan?
2. Apa yang ingin dicapai perusahaan dalam melaksanakan praktek CSR ?
3. Sejak kapan CSR mulai diterapkan dalam kegiatan operasional perusahaan?
4. Apa yang menjadi dasar diterapkannya CSR dalam perusahaan, khususnya dalam kaitan dengan *community relations* ?
5. Apakah ada manfaat yang signifikan dalam menerapkan CSR pada komunitas yang diperoleh perusahaan?

6. Apakah sebelum menerapkan CSR ada semacam analisis untuk menganalisa kondisi eksternal ataupun internal dalam perusahaan sebagai dasar dari penerapan CSR?
7. Apakah ada pembagian dan pendefinisian tugas yang jelas dalam menjalankan praktek CSR?
 - Jika ya, siapa saja yang terlibat ?

b Penerapan CSR

1. Apa saja program yang dilaksanakan PTPN VI Jambi terhadap komunitas sebagai bentuk dari CSR?
 - Apakah program – program yang dilaksanakan meliputi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan? bentuknya seperti apa?
2. Sejak kapan program CSR untuk komunitas mulai dilaksanakan?
 - Bagaimana permulaan program tersebut?
 - Dalam kurun waktu sampai sekarang, apakah ada perubahan program?
Jika ya, mengapa ?
3. Apa yang menjadi tujuan dari dilaksanakannya hubungan dengan komunitas ?
 - Apakah tertuang dalam visi atau misi perusahaan?
4. Dalam proses perencanaan program, apakah top manajemen terlibat didalamnya?
5. Apakah komunitas yang menjadi target program CSR dilibatkan dalam proses perencanaan program?
 - Bagaimana bentuk keterlibatan tersebut?

6. Apakah PTPN VI Jambi dalam merumuskan program CSR terlebih dahulu menerapkan manajemen isu?
 - Bagaimana bentuk penerapannya?
7. Apakah dalam menjalankan kegiatan operasional harian perusahaan, memiliki kode etik berkaitan dengan isu lingkungan?
 - Seperti apa kode etik tersebut? apakah ada program khusus?
8. Apa yang ingin dicapai dari program – program CSR yang ditujukan untuk komunitas areal perkebunan?
9. Apakah penyusunan program CSR diselaraskan dengan visi dan misi perusahaan?
 - Jika tidak, mengapa?
10. Apakah penyusunan program dilakukan dengan teratur dan kontinu?
 - Jika ya, bagaimana prosesnya?
 - Jika tidak, apa yang menjadi alasan untuk tidak dilaksanakan secara teratur ?
11. Dalam pelaksanaan program, apakah karyawan dan manajemen ikut terjun ke lapangan? Apakah ada semacam pemberian waktu luang dari karyawan untuk ikut berpartisipasi dalam program CSR?
12. Saluran komunikasi apa yang digunakan dalam tahap pelaksanaan program CSR?
 - Bagaimana saluran komunikasi tersebut digunakan?
13. Apakah ada halangan dalam melaksanakan program CSR?
14. Apakah program CSR pernah digunakan dengan tujuan menyelesaikan konflik?

15. Setelah program selesai dilaksanakan, apakah ada semacam evaluasi terhadap keberhasilan program tersebut?
- Jika ya, bentuknya seperti apa?
 - Jika tidak, mengapa?
16. Apakah ada semacam laporan atau *report* baik itu terhadap pemilik perusahaan maupun terhadap stakeholders lain, seperti media massa, konsumen, dan komunitas itu sendiri mengenai sampai sejauh mana keberhasilan program CSR terhadap komunitas?
- Jika tidak, apa yang menjadi alasannya?
 - Apakah dilaksanakan secara kontinu?
17. Bagaimana perusahaan menilai keberhasilan program – program CSR yang telah dilaksanakan?
- Apakah ada parameter yang menjadi ukuran keberhasilan program?
 - Jika program tersebut dinilai gagal, langkah apa yang perusahaan ambil?
18. Apakah dalam tahapan perencanaan sampai pada evaluasi program, ada semacam proses monitoring terhadap program – program tersebut?
19. Apakah ada kebijakan yang mengatur mengenai alokasi dana untuk program CSR?

Komunitas

1. Apa tanggapan anda terhadap PTPN VI Jambi sebagai salah satu warga juga di lingkungan anda?

2. Apakah anda terlibat atau ikut dalam program CSR yang dilaksanakan oleh PTPN VI Jambi terhadap warga di daerah ini?
3. Apakah PTPN VI Jambi melakukan hubungan komunikasi secara teratur? Jika ya, bentuknya seperti apa?
4. Apakah manajemen PTPN VI Jambi pernah menyatakan kepada anda atau warga bahwa mereka ingin memberikan program pengembangan komunitas dan meminta usul dari warga ataupun menampung aspirasi warga untuk dilaksanakan dalam program PTPN VI Jambi?
5. Apakah manajemen dan karyawan PTPN VI Jambi pernah terjun membantu warga dalam program pengembangan komunitas yang dilakukan oleh PTPN VI Jambi? Jika ya, apakah anda merasakan perbedaan antara ada atau tidaknya karyawan PTPN VI Jambi dalam program tersebut?
6. Apakah anda sebagai warga komunitas lokal merasa daerah ini mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik dengan adanya program dari PTPN VI Jambi? Apakah ada perbaikan ekonomi?

Departemen Humas

a Struktur Humas

1. Apakah fungsi dan peran humas yang dijalankan oleh organisasi terintegrasi dalam satu departemen tersendiri atau terintegrasi ke departemen lain?
2. Jika terintegrasi dalam satu departemen tersendiri (departemen humas), dimanakah posisi humas dalam struktur organisasi?
3. Dari posisi humas tersebut, apakah humas mempunyai akses langsung ke top manajemen ?

- Jika dapat akses langsung ke top manajemen, seperti apakah bentuk akses humas ke manajemen?

4. Bagaimanakah bentuk struktur departemen humas?

b Visi, Misi dan Tujuan

1. Apakah visi departemen humas?
2. Apakah misi departemen humas?
3. Apakah tujuan dari departemen humas?

c Job Description

1. Apa yang menjadi tugas departemen humas, dilihat dari struktur organisasi?
2. Jika dilihat dari struktur departemen humas, bagaimana pembagian dalam departemen humas?
3. Bagaimana Humas dalam menjalankan tugasnya?
 - Apakah ada campur tangan dari departemen lain?

Fungsi Humas dalam Praktek CSR

1. Apakah humas PTPN VI Jambi memiliki akses ke top manajemen dalam kaitannya dengan CSR (dalam hal memberikan masukan atau saran)?
2. Dalam memberikan masukan atau saran kepada top manajemen berkaitan dengan perumusan program dan praktek CSR, apakah humas mengeksplorasi opini komunitas untuk mengetahui kebutuhan dan keinginan komunitas?
3. Apakah humas berkoordinasi dengan departemen lain dalam melaksanakan program dan praktek CSR dalam kaitannya dengan komunitas?
 - Seperti apa koordinasi tersebut?
 - Departemen mana saja yang terlibat?

4. Dalam melaksanakan program CSR, apakah humas berperan penting dalam mengkomunikasikan program tersebut kepada komunitas?

- Jika ya, bentuknya seperti apa?
- Jika tidak, mengapa tidak berperan dan apakah ada departemen lain yang melaksanakan fungsi tersebut?



LAMPIRAN 2



P.T. PERKEBUNAN NUSANTARA VI (Persero) JAMBI - SUMATERA BARAT

Jl. Zainir Haviz No. 1 Kota Baru Jambi Kode Pos 36128

Tlp. (0741) 445603 (Hunting)

Fax. 445500 - 445608

Jl. Khatib Sulaiman No. 54 Padang - 25137 PO. BOX. 349

Tlp. (0751) 40811 (Hunting)

Fax. 40815

Jl. Tebet Utara III No. 9, Jakarta Selatan Kode Pos 12820

Tlp. (021) 8354802

Fax. 8354805

info@ptpn6.com - ptpn6pdg@indosat.net.id

Surat Keterangan

Nomor : 06.05/X/ 22 /I/2007

Dengan ini kami menerangkan bahwa yang tersebut namanya dibawah ini :

Nama : Nancy Ravenska Pasaribu
NIM : 01903/Kom
Sekolah/Perguruan : Universitas Adma Jaya Yogyakarta
Jurusan : Ilmu Komunikasi

Telah selesai melaksanakan Penelitian/Pengambilan Data di Bagian Umum dan Kemitraan kantor Direksi PTP Nusantara VI (Persero) Jambi dari Bulan Desember 2006 s.d Bulan Januari 2007 dengan judul "*Penerapan corporate social responsibility dalam program komunity relation pada PTPNusantara VI (Persero) jambi sebagai salah satu upaya mewujudkan kemitraan yang serasi*".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Jambi, 23 Januari 2007
PLTH Bagian SDM



Ir. H. Ridwan Saleh
Kepala Bagian

LAMPIRAN 3



TRANSKRIP WAWANCARA

Unit PKBL

- Q : Menurut PTPN VI (Persero), CSR dipandang seperti apa?
A : CSR itu bentuk kepedulian perusahaan kepada lingkungan sekitarnya..kalo di PTP CSR itu merupakan program Bina Lingkungan. Gak ada untung yang diperoleh masyarakat.
- Q : CSR PTPN VI (Persero) tertuang gak dalam visi dan misi perusahaan?
A : Ya, tertuang dalam visi dan misi... salah satunya kan perusahaan memberikan manfaat bagi masyarakat..
- Q : Pandangan CSR PTPN VI (Persero) tadi apakah juga dirumuskan dalam kode etik perusahaan?
A : kode etik..tidak ya... kan kaitannya dengan masyarakat sekitar kita.
- Q : Dalam menjalankan praktek CSR tadi, ada nggak tujuan spesifik dari PTP yang dirumuskan secara detil?
A : Tujuan perumusan praktek CSR kita itu tidak dirumuskan secara detil, kalau tujuan program Bina Lingkungan ada..baik itu menurut SK No. 236 maupun menurut kita sendiri...tapi kalo tujuan menjalankan praktek CSR ya tetap ada..tujuannya adanya pengaruh kepedulian perusahaan di lingkungan PTPN VI berada. Pada intinya juga, harus bisalah membangun kemandirian masyarakat juga. Ini untuk masyarakat gunanya.
- Q : Kemandirian itu digambarkan seperti apa ?
A : Masyarakat mandiri juga tujuan dari dilaksanakannya program Bina Lingkungan, dalam juklak dinyatakan ada bantuan pendidikan untuk meningkatkan SDM. Jika orang sudah dapat pendidikan maka ia bisa melakukan sesuatu dengan usaha sendiri, tanpa harus mengharapkan bantuan. Paling tidak kan sudah ada modal
- Q : Selain kemandirian tadi Ibu bilang tentang pengaruh perusahaan. Pengaruhnya bisa digambarkan nggak Bu, bagaimana?
A : Ya... masyarakatnya majulah... punya kegiatan positif.. misalnya punya usaha sendiri..kondisi sosialnya pun baik..pendidikan, keagamaan, ya baik..seperti itulah..
- Q : Sejak kapan CSR mulai diterapkan dalam kegiatan operasional perusahaan?
A : Kita mulai menerapkan dari perusahaan ini berdiri, cuma namanya bukan CSR dulu...semacam community development.

Q : Apa yang menjadi dasar diterapkannya CSR dalam perusahaan, khususnya kaitannya dengan *community relations*?

A : Dasarnya ya..SK Menteri No. 236

Q : Selain peraturan pemerintah, apakah ada kebijakan dari perusahaan sendiri untuk merumuskan praktek CSRnya seperti apa?

A : Kalau dari perusahaan sendiri ya dituangkan lagi SK tersebut ke dalam SOP. Kalau murni dari perusahaan nggak ada..kan kita BUMN jadi harus menuruti Pemerintahlah.

Q : Selama menjalankan CSR apakah ada manfaat signifikan yang diperoleh perusahaan?

A : ada...manfaatnya warga mengakui keberadaan PTPN VI.

Q : Sebelum menerapkan CSR, apakah ada semacam analisis untuk menganalisa kondisi eksternal maupun internal dalam perusahaan sebagai dasar dari penerapan CSR?

A : ada..analisisnya..kita perhitungkan kontribusinya terhadap perusahaan apa..analisis kita kontribusi mengadakan program CSR ya...bisa membuat lingkungan kerja kondusif, dan ada dukungan dari masyarakat.

Q : Apakah analisis itu dilakukan secara khusus?

A : Secara khusus sih tidak ya...kita melihat kondisi lapangan dan berpikir logisnya saja, jika masyarakat sekitar sejahtera, mereka kan tidak sensitif terhadap keberadaan perusahaan..dan untuk membuat masyarakat sejahtera perusahaan bisa turut ambil peran.

Q : Masyarakat sensitif, maksudnya seperti apa Bu?

A : Ya... sensitif itu..isu yang sebenarnya nggak besar tapi dibesar-besarkan..dengan tujuan yang berbeda – beda, misalnya untuk tujuan materi atau karena dipanas-panasi pihak ketiga..jadi masalah yang sebenarnya dapat diselesaikan dengan baik dan cepat jadi diperbesar dan berlarut-larut. Perusahaan juga yang rugi.

Q : Apakah ada pembagian dan pendefinisian tugas yang jelas dalam menjalankan praktek CSR?

A : Ada. Praktek CSR itu ditangani unit ini unit PKBL.

Q : Program apa yang dilaksanakan PTPN VI terhadap komunitas sebagai bentuk dari CSR?

A : Ya...program Bina Lingkungan. Program Kemitraan bukan penerapan CSR ya.. walaupun dalam program Kemitraan kami juga ada mengadakan semacam pelatihan atau training kepada mitra binaan kami. Semacam pendidikan untuk lebih meningkatkan kemampuan dan pengetahuan mereka mengenai usaha mereka, yang pada akhirnya berguna untuk

mengembangkan usaha mereka. Saya bilang ini masuk CSR karena kami sepenuhnya tidak menuntut biaya dari mitra binaan PTP.

Q : Apakah program yang dilaksanakan meliputi aspek ekonomi, sosial dan lingkungan?

A : Cuma meliputi aspek sosial saja ya..berupa bantuan baik itu tunai maupun barang atau kegiatan sosial, seperti acara pengobatan gratis dan lainnya.

Q : Kenapa program yang dilaksanakan hanya dalam aspek sosial saja Bu? Bagaimana dengan aspek ekonomi atau lingkungan masyarakat sekitar?

A : Kalau soal pemenuhan aspek ekonomi atau lingkungan sudah ada program sendiri – sendiri. Kalau aspek ekonomi, kan ada program Kemitraan. Tapi program itu menurut kami bukan CSR karena masih ada untung untuk PTP. lain halnya dengan Bina Lingkungan, kita nggak dapat untung. Kalau lingkungan, itu dilaksanakan bagian lain bukan unit ini.

Q : Jika begitu, mengapa tidak ada program CSR yang meliputi ekonomi juga?

A : ide..sih sudah ada..cuma keuangan perusahaan sekarang ini belum mampu. Nggak mudah juga melaksanakan program yang mampu membuat masyarakat maju ekonomi tanpa untung bagi perusahaan secara materi.

Q : Program PKBL ini mulai dilaksanakannya kapan?

A : Mulai dilaksanakan itu tahun 2003, sesuai dengan berlakunya SK Menteri itu.

Q : Bisa dijelaskan, seperti apa programnya ?

A : Ada dua ya..satu bentuknya bantuan, satu lagi kegiatan sosial. Bantuan ini tiap bulan kita kasih. Kalau kegiatan sosial tidak selalu tiap bulan, tapi paling tidak satu tahun sekali kita buat. Biasanya kalau memperingati hari besar ya..atau ada yang mengajak dari PMI kemaren misalnya.

Q : Permulaanya, bisa diceritakan seperti apa?

A : Mulanya berdasarkan SK Menteri BUMN itu dibuatlah SOP untuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. Waktu itu yang merumuskan Direktur dan lima Direksi. Barulah SOP diturunkan ke bawah, ke bagian Umum/Kemitraan, kemudian dibentuklah unit ini.

Q : Sebelum perumusan program Bina Lingkungan, apakah ada semacam perumusan PTP secara keseluruhan mengenai apa yang dipahami dengan CSR?

A : Wah, kalau setau saya itu tidak ada ya.. lagipula Pengertian manajemen banyak dipengaruhi peraturan pemerintah ya..selama ini memang belum pernah isu mengenai pemahaman CSR ini dibawa ke rapat manajemen, kemudian dirumuskan dengan jelas, dan adanya panduannya...paling hanya SOP saja. Beda dengan GCG, yang ada panduannya dan jelas...mungkin manajemen berpikir bahwa peraturan pemerintah sudah cukup jelas..ya.. kayak misalnya saja CSR kan tidak ada keuntungan materi. Seperti yang di

majalah atau koran yang saya baca...tidak pernah dibawa ke forum rapat seperti ini, paling – paling untuk pengetahuan kita secara individu.

Q: SOP dibuat hanya berdasarkan SK Menteri atau ada penyesuaian dengan keadaan lingkungan perusahaan?

A: Ada, disesuaikan dengan keadaan lingkungan perusahaan. berdasarkan pengalaman kita selama ini melaksanakan program *community development*, dirumuskanlah bagaimana mekanisme program dan kriteria bantuan seperti apa.

Q: Sebelum adanya program Bina Lingkungan, apakah program *community development* dilaksanakan oleh unit khusus seperti sekarang ini?

A: Oh, kalau dulu tidak seperti sekarang. Dulu itu tergantung unit kebun masing-masing, pengelolaan dana dan bantuan tergantung sekali sama ADM. Jadi jarang, masyarakat kebun yang datang langsung minta bantuan kepada kantor pusat. Semuanya dulu itu melalui unit kebun setempat.

Q: Dalam kurun waktu sekarang apakah ada perubahan dalam program?

A: Mulai dari pertama kali dirumuskan sampai sekarang, belum pernah.

Q: Belum pernah berubah mulai dari mekanisme pemberian bantuan, perencanaan, pelaksanaan, sampai pada evaluasi ?

A: Belum pernah sama sekali. Dari dulu sama, tidak ada yang dikurangi maupun ditambahi dalam pelaksanaan program tersebut. Kami merasa program ini berjalan cukup baik selama ini, jadi kita nggak pernah terpikir untuk mengubah sesuatu dalam program ini.

Q: Apakah ada semacam tujuan spesifik dilaksanakannya Program Bina Lingkungan ini?

A: Ada. Ada dua tujuan ya...pertama itu dari rumusan SK Menteri. Kedua, dari perusahaan yakni memajukan kondisi sosial masyarakat perkebunan dan mengurangi kesenjangan sosial yang bisa membuat konflik antar PTP dan masyarakat. Tujuan ini kami rumuskan pada acara kegiatan sosial yang merupakan bagian dari Program Bina Lingkungan.

Q: Yang merumuskan tujuan tersebut siapa ?

A: Top manajemen dan kita, ya bersama – sama lah ya...kalau kegiatan sosial kita khususkan lagi..nanti kamu tulis aja ya...

Q: Apakah ada alasan khusus sehingga tujuannya dicetuskan seperti itu ?

A: Kita menetapkan itu karena melihat keadaan lingkungan, masih banyak kan masyarakat di kebun yang keadaannya berbeda jauh sama karyawan PTP. jadi kita inginlah mengurangi kesenjangan itu.

Q: Tujuan tersebut apakah ada dalam visi dan misi perusahaan ?

A : Menurut saya sih ada..kan prinsipnya menjalin kemitraan..salah satunya kemitraan sosial, dimana kita bantu masyarakat yang butuh bantuan. Secara jelas dicantumkan sih tidak, tapi semacam terkandung dalam visi dan misi kita.

Q : Dalam proses perencanaan program, apakah top manajemen terlibat ?

A : Ada, dalam pengambilan keputusan manajemen banyak terlibat. Keputusan untuk menyelenggarakan kegiatan sosial atau penyerahan bantuan sosial ke mana saja kan harus ada keputusan juga dari manajemen. Lumayan sering juga Direktur atau Direksi mengajukan usul tentang kegiatan sosial kita tiap tahun. Cukup berperan menurut saya.

Q : Dalam perencanaan program Bina Lingkungan, apakah masyarakat sekitar dilibatkan ?

A : Tidak pernah kita libatkan, masyarakat ya..sebagai pihak penerima bantuan kita.

Q : Kenapa tidak dilibatkan ?

A : Pertimbangan kita karena wilayah kerja luas sekali ya, lebih dari dua kabupaten, dua provinsi..sulit..lagipula mekanisme yang selama ini ada belum pernah dikeluhkan masyarakat kebun. jadi masih efektif. Belum perlu melibatkan masyarakat.

Q : Tapi apakah pernah dipertimbangkan PTP untuk melibatkan masyarakat ?

A : Tidak ya..karena luas wilayah kerja tadi...susah menampung aspirasi banyak orang, apalagi orang kebun (manajemen unit kebun) sedikit, nggak mampulah untuk menampung aspirasi..belum keadaannya yang jalannya parah..desanya jauh...menurut saya, walaupun ada tidak akan maksimal, pada akhirnya ya sama saja.

Q : Apakah dalam merumuskan program Bina Lingkungan, Unit ini ada semacam langkah untuk menerapkan manajemen isu?

A : Manajemen isu itu seperti memilih isu apa yang efektif, trus membuat langkah penanganannya..begitu kan? Kalau begitu, saya rasa nggak ada ya...belum pernah kita seperti itu.

Q : Mengapa tidak pernah melakukan manajemen isu?

A : Program ini kan sudah ada yang mengatur, soal isu sudah jelas sekali ditetapkan. Ada lima objek bantuan, berarti 5 pula isu kita yang kita laksanakan tiap tahunnya. Mekanisme juga sudah diatur, tidak berdasarkan isu saja.

Q : Berarti isu yang ditangani tidak pernah berubah ?

A : Tidak. Perubahan hanya terletak pada prioritas tiap tahun anggaran.

Q : Bisa dijelaskan, perubahan prioritas itu seperti apa ?

A : Perubahan prioritas isu yang mau kita tangani dalam satu tahun anggaran. Ini menyangkut alokasi dana yang paling besar mau diberikan pada isu yang mana diantara lima isu tersebut.

Q : Bagaimana cara menentukan prioritas isu tersebut ?

A : Jadi tiap tahun ada isu utama yang mendapat alokasi dana yang paling banyak, isu mana yang akan jadi isu utama kita putuskan berdasarkan apa yang terjadi di daerah maupun secara nasional. Kita lihat dari surat kabar, TV atau internet, mana yang paling banyak terjadi itu yang kita ambil jadi isu utama.

Misalnya saja, tahun anggaran kemarin isu utama kita itu isu bencana alam. Karena pada awal tahun anggaran kami lihat dari media massa, bencana alam banyak sekali terjadi baik itu nasional maupun lokal. Maka, kami memutuskan isu ini yang akan diberikan dana paling banyak dalam satu tahun anggaran yang kemarin.

Q : Apakah dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan, ada kode etik berkaitan dengan isu lingkungan?

A : Kalau itu, tidak dilaksanakan unit PKBL, tapi dilaksanakan oleh Urusan Operasional dan Teknologi. Kamu bisa bertanya kepada bagian itu saja.

Q : Manfaat apa yang ingin dicapai dari program ini?

A : Manfaatnya sama seperti tadi untuk menjaga keseimbangan dengan masyarakat, sehingga mereka mengakui keberadaan PTP.

Q : Manfaatnya sudah dapat dirasakan PTP?

A : Sudah ya...buktinya hubungan kita dengan masyarakat sekitar baik..jarang sekali terjadi konflik...dan lingkungan kerja kita juga aman.

Q : Berdasarkan kedua hal itu menunjukkan adanya keseimbangan ?

A : Ya.

Q : Apakah penyusunan Program Bina Lingkungan ini disesuaikan dengan visi dan misi ?

A : Jelas iya, penyusunan tujuan saja kita sesuaikan dengan visi dan misi.

Q : Apakah penyusunan program dilakukan dengan teratur dan kontinu ?

A : Ya, kita laksanakan tiap awal tahun anggaran. Kita susun dalam RKA, format penyusunannya kita susun berdasarkan SK No. 236. Kamu bisa lihat detilnya di SK nanti.

Q : Apa saja yang tersusun dalam RKA itu?

A : RKA itu terdiri dari anggaran biaya dan program kerja kita apa dalam satu tahun anggaran.

Q : Bisa digambarkan seperti apa penyusunan RKA itu?

A : RKA kita susun setiap awal tahun anggaran, yang menyusun RKA PKBL ya kita unit PKBL ini. Alokasi dana kita bagi menurut prioritas objek bantuan dalam satu tahun itu.

Q : Apakah ada aturan yang mengatur berapa besar presentase alokasi dana pada tiap objek bantuan yang menjadi prioritas utama?

A : Nggak ada aturan ya..alokasi dana menurut pengamatan kita. Kan nggak bisa langsung diatur berapa besar presentase untuk objek bantuan peringkat pertama, kedua, atau terus dibawahnya. Kalau ternyata alokasi dananya lebih besar kan susah nantinya. Harus kita sesuaikanlah dengan keadaan di lapangan. kalau soal persentase, presentase pembagian antara Jambi dan Sumbar, karena Jambi lebih luas dana yang diberikan 70% dari dana seluruhnya. 30 % lagi untuk Sumbar.

Q : Kembali pada soal penyusunan RKA, setelah disusun unit ini, apakah langsung disetujui untuk dilaksanakan?

A : Nggak langsung disetujui, diajukan dulu ke Kabag Kemitraan/Umum, Kabag setuju, diajukan ke Direksi SDM/UMUM, dapat disposisi barulah RKA bisa dijalankan.

Q : Dalam pelaksanaan program, apakah karyawan dan manajemen ikut terjun ke lapangan?

A : maksudnya seperti apa ya?

Q : Maksudnya apakah dalam pelaksanaan program, karyawan pernah dilibatkan untuk terjun ke lapangan dalam kegiatan sosial ? atau PTP ada semacam ngasih waktu untuk karyawan melakukan kontak komunikasi dengan warga setempat ?

A : Kita event sosial paling ya..sesuai dengan SK no. 236. Kita ada program kesehatan untuk panti jompo, orang – orang cacat gitu...kita datangkan dokter, saya ikut mengawasi saja.

Q : Berarti hanya sebagai pengawas saja ?

A : Iya, sebagai pengawas. Kan kita sudah bekerjasama dengan pihak yang lebih ahli. Kayak dinas kesehatan.

Q : Kenapa tidak ada ?

A : Belum ada ya...seperti ketika kita mengadakan pelatihan untuk mitra binaan, kita mendatangkan pihak luar. Lagipula manajemen berpikir bahwa karyawan tidak memiliki keahlian yang cukup untuk ikut terjun langsung. Seperti pada pengobatan cuma-cuma, yang tau kan dari pihak Rumah Sakit yang kita ajak kerjasama. Kalau tentang pendidikan, seperti ngajarin anak-anak di desa juga belum...selain belum pernah berpikir sampai ke arah sana, hal itu juga pengaruhnya besar dari ADM kebun.

Dulu memang pernah kita punya ide mau berikan program pembibitan gratis untuk penduduk di Solok. Kan karyawan kita punya skillnya di bidang kelapa

sawit. Ternyata, setelah kita cek ulang ide ini makan uang yang banyak, sedangkan perusahaan belum mampu. Jadi, kita batalkan niat kita itu dan belum bisa direalisasikan sampai sekarang.

Q : Menurut unit PKBL apakah keterlibatan karyawan penting dalam pelaksanaan program?

A : Tidak terlalu punya pengaruh besar ya, apalagi karyawan tidak punya skill yang dibutuhkan, bisa – bisa mengacaukan program kita. Memang, bisa buat masyarakat kenal sama karyawan PTP atau top manajemennya, tapi itu kan bisa dijalin dengan cara silaturahmi. Bukan hanya dengan ikut dalam pelaksanaan program.

Q : Saluran komunikasi apa yang digunakan dalam tahapan pelaksanaan program Bina Lingkungan?

A : Saluran komunikasi? Ya, ada. Ini untuk antar BUMN. Namanya Forum koordinator BUMN...jadi setiap ada hasil penyaluran gitu ya..kita ada koordinasi..ada rapat koordinasinya...kebetulan sekarang di Jambi koordinatonya itu PT PUSRI

Q: Forum itu apakah memang koordinatonya PUSRI saja atau ada diganti ?

A: Setiap dua tahun sekali diganti jadi....gantian yang jadi koordinatonya...beberapa tahun yang lalu PTPN VI sebagai koordinator.

Q : Fungsinya untuk apa Bu?

A : Fungsinya untuk mengkoordinasikan bantuan tiap BUMN sudah sejauh mana, menghindari bantuan yang dobel itu.

Q : Apakah dalam pelaksanaan program Bina Lingkungan, unit PKBL berkoordinasi dengan unit lain ?

A : Iya, kita sering koordinasi. Paling sering dengan PU kebun ya..soalnya kan mereka yang tau bagaimana keadaan masyarakat di sana, termasuk yang memohon bantuan itu. Jadi PU-lah yang bisa mengecek apakah bantuan itu memang perlu atau bohong-bohongan saja. Di SOP pun dibilang kalau Unit ini dan PU kerjasama dalam buat laporan dan menyerahkan bantuan.

Selain dengan PU, kita juga kerjasama dengan bagian – bagian lain. Seperti dulu kita pernah buat acara pengobatan gratis untuk masyarakat di sungai bahar, kita kerjasama dengan Bagian SDM. Soalnya, mereka yang tau tentang pengobatan...walaupun kita juga kerjasama dengan dinas kesehatan. Caranya ya..kita kirim memo..minta bantuan..ya...biasanya mereka juga langsung membantu..enaklah kerjasamanya.

Q : Apakah program CSR pernah digunakan dengan tujuan menyelesaikan konflik?

A : Ada, selalu ya...itu tiap kali kita buat RKA, kita selalu ada pos untuk menanggulangi konflik, untukantisipasi. Waktu membuat RKA, kita pasti ada pos – pos yang dianggarkan untuk menanggulangi hal – hal yang tidak

terduga. Seringnya kalau ada konflik, ya...taulah kalau PTPN VI (Persero) rawan dengan konflik sama penduduk. Nah, pos-pos itu kita gunakan untuk itu.

Misalnya saja kemaren itu kejadian di PKS Rimbo Dua, disana ada masalah limbah. Jadi limbah pabrik kita mencemari...mungkin kamu pernah baca koran ya...pernah keluar itu ya.. salah satu solusinya yang sudah kita laksanakan disitu kita memberikan bantuan..bantuan untuk masyarakat sekitar. ini bukan berarti *money politic* ya...bukan apalah ya..maksudnya pendekatannya sarana supaya agar jangan terjadi gejolak gitu.kita kasih...yang masalah limbah tetap diselesaikan, dan kita juga membina hubungan supaya mereka mau menerima keberadaan PTPN VI. Dananya ya..dari pos-pos tadi. Dikasih bantuan berupa sarana jalan, sarana dan prasarana umum yang mendukung kegiatan sosial masyarakat. Itu kan sudah dicantumkan di SK itu, kegiatan sosial apa saja.

Q : Setelah program selesai dilaksanakan, apakah ada semacam evaluasi terhadap keberhasilan program tersebut ?

A : Ada, laporan akhir tahun..nanti ada SK 100 dari Kementrian. Jadi disana dilihat berapa sudah disalurkan, dan berapa dana yang tersedia.

Q : Bagaimana perusahaan menilai keberhasilan program – program CSR yang telah dilaksanakan? Apakah ada parameter yang menjadi ukuran keberhasilan program?

A : Kalau program Kemitraan ada, kayak kualitas pinjaman itu ada kita ukur, tapi kalau Bina Lingkungan ya dana habis dipakai. Nggak ada parameter khusus kayak program kemitraan. Parameternya hanya kita lihat ada nggak gejolak dari masyarakat, kalau tidak berarti program berhasil. Dan selama ini nggak pernah ada gejolak yang sangat kuat dari masyarakat. Dia mengakui keberadaan kita dan tidak melakukan macam – macam, itu sudah cukup menyatakan bahwa program kami berhasil.

Q : Apakah setelah bantuan diberikan kepada masyarakat, ada semacam peninjauan kembali oleh PTP untuk melihat apakah bantuan benar – benar digunakan atau tidak ?

A : ada...kayak kemarin kita bangun di..apa...di..Sungai Bahar bikin pos polisi supaya dia membantu...kalau dia (polisi) *stand by* disitu..dia membantu supaya buah – buah itu...buah milik petani plasma tidak keluar dari pabrik kita. Kalau bangunannya dah selesai kita liat, sebagai bahan evaluasi.

Bisa dibilang, monitoring itu dilakukan sebelum kita ngasih bantuannya ya..biasanya kita survei dulu daerah yang hendak diberikan bantuan itu. Misalnya, pernah ada proposal masuk ke PKBL minta bantuan berupa uang tunai untuk bangun masjid. Saya survei ke sana, lihat apakah memang mau bangun masjid atau nggak, kalau bantuan sudah diberikan pun saya harus lihat lagi apakah masjidnya sudah jadi dan masyarakatnya juga harus kasih copy laporan keuangan mereka.

Q : Saya baca di SK itu ada juga kegiatan untuk pendidikan, itu bentuknya seperti apa ?

A : Ya..kita ada kegiatan pendidikan. Kita kasih bantuan beasiswa, kita kasih juga.

Q : Apakah menetapkan kriteria khusus dalam memberikan beasiswa ?

A : Kriteria khusus sih nggak ada. Cuma kita melihat ada nilai tambah nggak..kita kan juga punya kegiatan MTQ, maksudnya pelaksanaan musabaqoh, itu di tingkat PTP Nusantara seluruh Indonesia. begitu kan, kita kan punya... qoriah-qoriahnya itu...jadi kalau umpamanya qoriah – qoriahnya itu dibina PTP, nanti kalau mereka ada yang berminat sekolah ke Mesir, nanti ada PTP kasih beasiswa, walaupun nggak penuh.

Selain MTQ itu, kita juga ngasih beasiswa untuk yang berprestasi. Kayak kemaren, ada kegiatan kita kumpulkan masing – masing kebun..sekolah yang ada disekitar kebun...mulai dari SD sampai SMP, yang berprestasi sekolahnya kita kasih bantuan.

Q : Bagaimana dengan bantuan kesehatan ?

A : Ya, kita ada kayak kegiatan amal pengobatan cuma – cuma

Q : Apakah program bantuan dana dan kegiatan sosial itu sering diliput media massa, seperti mengundang wartawan ?

A : Nggak terlalu sering ya..paling kalau kegiatannya besar sifatnya. Itupun kalau disetujui sama unit humas, tapi kalau nggak ya nggak dimuat. Itu kan tidak terlalu penting ya...yang penting adalah bantuan nyata untuk masyarakat ya....

Q : Bagaimana dengan SAD ? apakah pernah dibuat program untuk memberdayakan mereka ?

A : Kita ada tanggung jawab moral ya..karena dia kan ada di sekitar wilayah kita..ada tanggung jawab moral...pernah juga dikasih bantuan untuk mereka.

Q : Bagaimana dengan perekrutan masyarakat sekitar untuk bergabung bersama PTP ? apakah ada kebijakan perusahaan untuk membuka kesempatan bagi masyarakat yang ingin bekerja di PTP ?

A : Ada ya, walaupun nggak ada kebijakan tertulis. Tapi itu sudah menjadi aturan main kita ya...nggak langsung rekrut jadi karyawan ya..karena kebanyakan tingkat pendidikan mereka kan tidak memenuhi syarat menjadi karyawan. Maka, mereka banyak yang mulai jadi BHL (Buruh Harian Lepas), honor dulu. Meningkatkan, meningkat..barulah mereka diterima jadi karyawan tetap. Sudah banyak juga yang menjadi karyawan tetap PTP.

Buktinya banyak orang PTP itu orang asli situ, kayak di sumbar itu kan banyaknya orang Padang. Jambi ini juga begitu.

Q : Kalau di Sumbar, apakah ada juga Suku asli yang masih primitif seperti SAD? Kalau ada, apakah PTP pernah melakukan kontak komunikasi dan memberikan kegiatan sosial kepada mereka ?

A : Nggak ada, hanya Jambi aja...

Unit Humas

Q : Bagaimana pandangan Bapak sebagai staf humas PTP tentang CSR ?

A : CSR itu penting untuk dijalankan oleh PTP. CSR itu bentuk kontribusi nyata perusahaan terhadap masyarakat sekitar dalam beroperasi.

Q : Apa ada tertuang dalam visi dan misi perusahaan ?

A : Ya, ada. Itu harus ya, itu menunjukkan manajemen memandang penting atau tidak CSR dilaksanakan. Dan PTP ada, terkandunglah dalam visi dan misi PTP.

Q : Terkandung di bagian mananya Pak ?

A : Salah satu misi kita kan buat pembangunan masyarakat, CSR kan membangun masyarakat.

Q : Bapak tadi mengatakan CSR itu penting dijalankan. Mengapa CSR penting untuk dilaksanakan PTP ?

A : Kalau dilihat dari sudut humas kan, CSR itu punya dampak citra positif buat perusahaan. ada nilai plus-lah istilahnya. Jadi, kalau melaksanakan CSR, dalam memberikan bantuan misalnya, itu harus berkaitan dengan core bisnis PTP. Biar citra yang ingin dibangun bisa dibangun. Misalnya, PTP kan gak mungkin jadi sponsor acara musik mahasiswa, beda dengan spesifikasi PTP. Kalau dana bantuan untuk kelapa sawit masyarakat atau pendidikan untuk masyarakat kebun, pasti kita kasih. CSR juga tidak hanya untung bagi perusahaan, tapi juga bagi masyarakat.

Q : Bisa dijelaskan keuntungan apa yang masyarakat peroleh ?

A : CSR itu kan pada akhirnya memberikan manfaat nyata dan membangun kemandirian masyarakat sekitar.

Q : Kemandiriannya digambarkan seperti apa Pak ?

A : Kemandirian itu keadaan masyarakat yang tidak selalu tergantung dengan perusahaan. Perusahaan melalui CSRnya harus mampu mewujudkan kemandirian itu. Kalau di PTP, misalnya saja membuat mandiri masyarakat dengan mendidik mereka untuk mengembangkan perkebunan kelapa sawit sendiri. Jadi, seandainya keadaan terburuk, PTP tutup masyarakat tidak kehilangan mata pencaharian yang selama ini diperoleh dari PTP. Nggak mengalami kemunduranlah istilahnya.

Q : Hal ini sudah dilaksanakan PTP ?

A : Ini dia..agak bingung juga kamu kalau menangkapnya. Kalau kemandirian sudah dibentuk melalui PIR. Program ini kan membentuk petani plasma, tetapi program ini kan bukan CSR.

Q : Kenapa bukan Pak ?

A : Iyalah...kan PIR itu ada untung yang kita terima, bunga pinjaman mereka kan diterima PTP. Itu namanya bukan CSR, kalau CSR kan nggak ada untung kita terima. Paling – paling nama baik itu tadi. Sedangkan program CSR PTP kan Bina Lingkungan. Setahu saya, Bina Lingkungan itu belum ada buat kegiatan seperti itu tadi.

Q : Jadi, kalau disimpulkan, CSR yang dilaksanakan belum membangun kemandirian masyarakat Pak ?

A : Tidak juga ya, kemandirian kan tidak hanya melalui yang saya bilang tadi. Ada saja cara yang lain ya..tapi kalau soal Bina Lingkungan lebih lanjut saya kurang menguasai, nanti kamu tanyakan ke unit PKBL saja.

Q : Tadi Bapak menyebutkan selain kemandirian, CSR juga memberikan manfaat nyata kepada masyarakat. Manfaat nyata yang seperti apa ?

A : Manfaat nyatanya ya kemajuan ekonomi misalnya, atau kemajuan sosial. Kemajuan sosial itu...misalnya, kemajuan pendidikan masyarakat. *Kayak gitu lah...*

Q : Selain nama baik, apakah ada manfaat lain yang PTP ingin capai dari masyarakat ?

A : Kalau dari konteks humas, bangun *sense of belonging* dari masyarakat.

Q : Bagaimana dengan dasar pelaksanaan CSR di PTP, apa yang menjadi pedoman manajemen ?

A : Dasar kita ya peraturan pemerintah, SK Menteri BUMN. Dalam memahami tanggung jawab kita (PTP) ..bukan hanya sekedar dari pengaruh pemerintah saja, namun juga standard ISO. Standard ini lumayan mempengaruhi kebijakan kita, walaupun tidak banyak memang.

Q : Selain dari Peraturan Pemerintah, apakah ada kebijakan murni dari manajemen ?

A : Kalau yang kamu maksud diluar peraturan, ya..nggak ada. Tetapi pelaksanaan itu jauh lebih penting dari kebijakan. Itu tidak begitu penting darimana asalnya. Yang penting pelaksanaan ada inisiatif dari manajemen yang melebihi dari apa yang diatur dan diwajibkan. Kan dari situ kelihatan ada kepedulian nggak dari manajemen. Ini juga yang harus dikomunikasikan ke publik, supaya citra tadi terbangun dan tetap bertahan.

Q : Fungsi humas PTP VI dijalankan oleh bagian mana ?

A : Kalau di kantor direksi (kantor pusat) , humas masuk ke dalam Sekretariat Perusahaan. Kalau di kebun, humas masuk ke dalam bagian Umum.

Kenapa dia masuk ke dalam Sekretariat Perusahaan ? Sekretariat Perusahaan itu kan mendampingi Direksi terus, macam Pak Karim... dia mendampingi Direksi ke mana.. Jadi dialah sebenarnya Kabag Humas, saya pelaksananya. Tapi karena dia berkegiatan banyak di sekretariat, maka beberapa hal khususnya berkaitan dengan kehumasan, unit ini yang *handle*.

Karena Sekretaris Perusahaan harus memfasilitasi semua kegiatan Direksi, semua bentuk rapat dan lain sebagainya. maka dia (Sekretaris Perusahaan) dijadikan humas. Tidak berdiri sendiri.

Q : Bagaimana dengan fungsi yang dijalankan unit humas ? lebih condong ke mana ?

A : Kalau fungsi yang dijalankan humas kantor Direksi umumnya ya... kerjanya itu hanya menangani pembentukan *image* kepada media massa. Jadi, kalau kebetulan ada berita yang terlalu tendensius, kita buat *release*.. semacam bantahan.. kita cerita yang sebenarnya. Kalau humas disini, lebih sering menerima tamu dari pers.

Q : Kalau LSM itu masuk ke mana?

A : Ya, LSM masuk ke Humas juga. Tapi lihat konteksnya, dia nanya masalah apa? Kalau masalah umum, kita fasilitasi ke Bagian Umum. Tergantung dia nanya apa, kita fasilitasi ke bagian terkait. Jadi, secara teknis, LSM ini menerima penjelasan dari kita sebelum diantar ke bagian terkait.

Q : Kalau misalnya LSM ada yang mau buat program sosial untuk masyarakat kebun, itu dibawa ke mana ?

A : LSM ? kalau dia mau buat program sosial, konteksnya dia mau minta biaya. Biasanya, kita bawa ke Bagian Umum. Tapi sebelumnya kita cek dulu ke Bagian Umum, ada nggak anggaran di Bagian Umum. Kalau nggak ada, kita bilang nggak ada.

Q : Tapi kalau misalnya permohonan bantuan itu memenuhi syarat PTP bakal dipenuhi ?

A : Biasanya iya, walaupun tidak sepenuhnya kita kasih sebanyak yang mereka minta. Tapi dasarnya gini..... kalau proposalnya minta biaya nggak semuanya kita kasih. Yang ada hubungannya dengan kegiatan *core* bisnis PTP VI, itu mungkin Direksi punya pertimbangan lain. Tapi kalau misalnya ada event musik, kita jadi sponsor, ya... kita tidak akan fasilitasi. *Core* bisnis kita kan bukan musik.

Tapi kalau berhubungan dengan masalah perkebunan, pemberdayaan gimana supaya kebun itu bagus, diterima masyarakat setempat, tidak ada friksi, ketersinggungan dengan masalah sosialnya, LSM yang memfasilitasi gitu... mungkin Direksi punya pertimbangan lain.. begitu. Nah, selama ini pengalaman LSMnya nggak seperti itu. Proposal – proposal yang masuk semua kegiatan sosial yang tidak ada hubungan langsung dengan kegiatan PTP VI. PTP VI kan punya kegiatan *community development* yang termasuk

CSR tadi sendiri. Mereka punya biaya, anggaran untuk kegiatan sosial yang melalui Bagian Umum.

Q : Bagaimana dengan humas kebun ?

A : Kalau humas di kebun kebanyakan menangani masalah internal... hubungan antar karyawan.. gitu. Kalau dengan masyarakat iya juga, menjalin silaturahmi dan komunikasi. Menjaln kemitraan dengan masyarakat setempat.

Q : Kalau begitu berkaitan dengan masalah hubungan dengan masyarakat setempat ditangani oleh Bagian Umum dan Kemitraan ?

A : Ya... Tapi kalau misalnya ada, selama pengalaman saya disini, misalnya ada *clash* gitu..ketersinggungan antara masyarakat setempat dengan manajemen kebun PTP VI, di kebun mana pun, humasnya ikut terkait, humas kantor direksinya ikut terkait dalam hal membendung supaya pers-nya pemberitaannya jangan melenceng dari situasi dan kondisi pada saat itu. Kita kasih aja dia memberitakan apa, itu hak dia ya..membuat pemberitaannya..tapi jangan keluar dari konteks apa yang diminta demo... maaf.. apa yang diminta si unjuk rasa. Jangan dikembangkan kemana-mana.. gitu kan. Pemberitaannya harus *balance*. Kita mem-*back-up* itu.

Q : Berarti hubungan komunikasi antara manajemen PTP dengan masyarakat di areal perkebunan, apa humasnya ikut terkait ?

A : Ada...itu tugasnya PU. Skup bidang dia kan kehumasan. Baru – baru ini kan ada berita , yang menurut saya sih pemberitaannya surat kabar ini nggak *balance*. Karena dia mengutip statement salah satu pejabat tentang limbah kita, dan dia tidak konfirmasi kemari. Ketika ditanya, dia bilang masuk ke kebun itu ketemu humas ada ring 1 ring 2 katanya. Wilayah – wilayah ring 1, ring 2 kalau Presiden masuk kan ada ring 1 untuk wartawan ini, ring 2 untuk wartawan model gini, ring 3 untuk wartawan ini. Alasan si persnya. Sebenarnya, dia salah masuk. Dia harus mengganti pola dia masuk ke satu daerah. Jadi dia buat berita, dia kutip bulat – bulat *statement* dari salah seorang pejabat tentang PKSbun bocor. Sebenarnya bukan bocor tapi merembes.

Kita punya pabrik baru, tapi yang namanya pabrik masih dicoba kan ada yang belum beres. Jadinya ada yang salah dalam pemasangannya dan lain sebagainya kan..dia buat berita tapi tidak konfirmasi mem-*balancing* dengan humas di kantor direksi atau di kebun.

Untuk menangani ini, saya bawa wartawan itu ke PKS kebun untuk melihat langsung seperti apa kejadian disana. Supaya dia bisa menilai keadaan sebenarnya bagaimana. Bocor kan berbeda dengan merembes. Inilah bentuk transparansi kita kepada pers. Dan ada statement dari kelompok masyarakat didareah itu yang menyatakan berita itu tidak benar dan mohon untuk diluruskan. Mereka sampai kirim surat pernyataan dan ditandatangani. Itu kan sudah bukti, bahwa berita tidak benar. Tapi pers ragu dan bilang bahwa masyarakat itu kita bayar. Padahal nggak sama sekali, kamu bisa lihat suratnya nanti.

Padahal dia sama sekali tidak dibayar. Mereka sendiri mengatakan bahwa “*Saya tidak dibayar kok*”..karena mereka merasakan dampak positif dengan adanya pabrik itu. Itu kan *sense of belongingnya* tinggi. Nah, kalau dikaitkan dengan CSR, maka CSR juga harus mampu membangun *sense of belonging* yang baik dari masyarakat.

Q : Jadi, fungsi humas kantor direksi itu apa ?

A : Humas kantor direksi banyak *memback-up*, membentuk *image* perusahaan secara keseluruhan. Untuk menyeimbangkan opini publik.

Q : Image seperti apa yang ingin dibentuk oleh PTP ?

A : Image yang ingin dibentuk ya.. seperti yang tercantum dalam visi dan misi.

Q : Apakah selama ini, ada semacam bentuk evaluasi atau pengawasan untuk mengukur apakah image perusahaan yang sesuai dengan visi – misi itu terwujud?

A : Nggak ada ya, semacam analisis atau evaluasi itu.

Q : Apakah ada menetapkan kriteria khusus atau parameter untuk mengukur keberhasilan terbangunnya dan terjaganya image PTP ?

A : Begini...kalau kita memparameterkannya selama tidak ada pemberitaan yang mengganggu kita berasumsi image kita tetap terjaga.

Q : Kenapa tidak melakukan evaluasi atau pengawasan, ataupun penetapan kriteria yang khusus dan detail ? apa yang menjadi alasan ?

A : Kita belum memandang itu penting ya...manajemen juga tidak menganggap itu penting. Toh selama ini belum ada masalah dengan hal ini.

Q : Selama ini, berarti informasi dari pihak luar terutama media berasal dari humas. Lalu, apakah humas berperan dalam memberikan informasi itu sebagai masukan kepada manajemen ?

A : Ya, humas berperan. Terutama ketika ada isu negatif, masukan dari kita yang paling utama.

Q : Kalau dengan masyarakat setempat, aktivitas kehumasan dilakukan tidak ?

A : Kalau secara resmi dari Unit Humas tidak ada, hanya saya sebagai humas PTP diluar kerja, menjalin hubungan silaturahmi dengan masyarakat sekitar sini agar tidak ada kesalahpahaman mengenai keberadaan PTPN VI.

Saya melakukan hal ini diluar jam kerja, dengan visi masyarakat akan merasa bahwa keberadaan PTPN VI harus didukung. Karena banyak dari dana *community development* yang kita keluarkan untuk mereka.

Tapi kadang – kadang masyarakat salah memahaminya, mereka meminta dana itu langsung diberikan kepada mereka. Ya..nggak dong..ada masyarakat yang kurang uang dikasih uang..ya nggaklah..kita harus melalui kegiatan sosial, kenapa kegiatan sosial ? karena uangnya juga ada di pos kegiatan sosial.

Q : Yang dijalankan sekarang ini seperti aktivitas silaturahmi diluar jam kerja itu dilakukan secara individu ?

A : Ya! Tapi kan melekat citra PTP VI didalamnya.

Q : Kalau aktivitas yang resmi dari manajemen dan mengatasnamakan PTP VI secara gamblang, apakah ada dilakukan ?

A : Kalau kandir jarang ya..

Q : Bagaimana dengan humas kebun ?

A : Ya, ada. Misalnya, kalau di masyarakat kebun ada kegiatan peresmian apa, kan ADMnya diundang humasnya harus mendampingi..kalau ADMnya nggak bisa humasnya yang mewakili. Itu kan memupuk interaksi sosial antara manajemen dengan masyarakat setempat.

Q : Kalau misalnya peringatan atau perayaan hari – hari besar, masyarakat ada turut serta nggak dengan manajemen ?

A : Ada, malah kita undang masyarakat setempat. Cuma..itu kan manajemen sosial yang kita bikin ya...kalau masyarakatnya memandang secara personal, secara per kelompok, mereka enggan datang karena liat pejabat PTP VI itu pejabat negara gitu..mereka enggan bergabung..padahal sebenarnya kan tidak. Pokoknya kegiatan yang sifatnya meramaikan hari – hari besar kita gabung aja, nggak masalah. Sering diadakan kok itu.

Q : Berkaitan dengan program PKBL, apakah ada koordinasi antara unit PKBL dengan unit humas ?

A : Harus..

Q : Bagaimana bentuk koordinasinya ?

A : Kalau di humas kebun, yang ditangani humas kebun itu mengenai PKBL itu ada masyarakat setempat yang minta bantuan dana..dia harus melalui humas kebun setempat. Kalau diserahkan ke ADM, di ACC ADM diteruskan ke bagian Kemitraan.

Q : Berarti humas kebun itu istilahnya sebagai sumber informasi seperti apa keadaan masyarakat di sana kepada bagian kemitraan, maksudnya dia yang tahu bagaimana kondisi di lapangan lalu confirm ke bagian Kemitraan.

A : Ya, betul...seperti itulah. Ada juga laporan kalau tidak salah dari PU untuk bagian masyarakat kepada bagian kemitraan. Lapornya itu kalau tidak salah diserahkan sebulan sekali.

Q : Bagaimana dengan komunikasi dengan masyarakat setempat, semisal ada sesuatu yang baru dari perusahaan yang memiliki dampak kepada masyarakat?

A : Ada, misalnya saja baru – baru ini kan kita membangun PKS (Pabrik Kelapa Sawit) baru dan kita pasti sosialisasikan ke masyarakat setempat. *“Ini lho kita mo bangun PKS baru”*..PTPN VI mau bangun PKS baru, mungkin ada

dampaknya..keadaan tidak akan sama seperti yang sebelumnya. Nah, itu kita sosialisasikan dulu. Nanti kan mereka nanya “kira-kira apa Pak dampaknya?” Ya...kita jelaskan..ada perubahan dalam suasananya...tidak akan sama seperti dulu...akan lebih bising..kesegaran udara berkurang..hanya beberapa saat..itu kan nanti dieliminasi..dan ditekan yang kaitannya dengan dampak lingkungan. itu kita jelaskan. Dan kita saring juga pendapat mereka, dan disampaikan kepada ADM. Dan jika berkaitan dengan kebijakan strategis akan disampaikan kepada pusat, tapi kalau masih bisa ditangani kebun ya kebun tangani sendiri. Tapi kalau masyarakat tidak keberatan ya tetap kita bangun.

Q : Berarti manajemen komunikasi dengan masyarakat setempat di setiap kebun berbeda – beda ?

A : Ya, kan karakter tiap masyarakat kebun itu berbeda – beda. Tidak bisa disamakan.

Q : Bagaimana dengan keberadaan dan aktivitas humas di PTPN VI secara keseluruhan, apakah direksi *welcome* dan mendukung keberadaan unit ini dan PU sebagai humas kebun ?

A : Sangat *welcome*.

Q : Bagaimana dengan akses ke direksi ?

A : Kita tidak pernah dipersulit sih ya...tapi kan dalam struktur unit ini tidak bisa langsung ke direksi, harus melalui sekretariat perusahaan dulu.

Q : Kembali lagi ke topik... masih berkaitan dengan program PKBL..menurut staf unit PKBL..menyatakan bahwa dalam hari – hari tertentu atau event – event tertentu, kegiatan sosial PTP VI itu diliput oleh media massa. Dan dalam hal ini unit PKBL bekerjasama dengan unit humas?

A : Ya, benar..kita yang buat release atau undang wartawan ke kegiatan sosial itu.

Q : Apakah ada kriteria tertentu yang menyebabkan kegiatan sosial itu perlu diliput atau dimuat di media massa? Atau semua kegiatan sosialnya diliput atau mau dimuat di media ?

A : Kita lihat *eventnya* dulu, pilih – pilih.. kriterianya itu kalau Dirut (Direktur Utama) atau Direksi ikut dalam kegiatan sosial, atau kegiatan sosial itu memberikan bantuan yang lebih besar dari jumlah bantuan yang biasa atau tiap hari kita berikan, atau lagi kalau kegiatan itu memperingati sesuatu. Kayak yang terakhir ini ada kegiatan menanam pohon dalam rangka peringatan hari bumi. Itu kita ekspos, karena memenuhi kriteria itu. Kita lalu undang wartawan, kalau misalnya mereka tidak datang yaa..kita kirim release. Supaya masyarakat juga tahu kalau kita juga peduli pada lingkungan.

Q : Itu kan kalau kegiatan sosial, bagaimana dengan pemberian bantuan dana di kebun ? apakah itu pernah wartawan diundang untuk meliput ?

A : Yaa...sebenarnya itu bagus juga ya sebagai informasi ke publik. Tapi. Humas disana (di kebun) sering tidak sempat memanggil wartawan untuk datang. Ya mungkin karena banyak juga kerjaan humas kebun, jadi jarang sekali. Supaya masyarakat juga tahu bahwa PTP VI ada kontribusi ke masyarakat sekitar, dan tidak bertanya – tanya apa gunanya ada PTP VI. Sekarang itu memang agak terlambat.

Q : Kenapa terjadi seperti itu ? apakah tidak ada koordinasi ?

A : Seharusnya sih memang ada forum komunikasi antar humas tiap kebun dan humas di kantor pusat. Sehingga tiap humas tahu perkembangan mengenai masyarakat. Tapi sayangnya sekarang ini masih lewat ADM dulu, jadi belum ada garis koordinasi antar unit humas. Kalau soal koordinasi, kita nggak ada koordinasi dengan PU di kebun. paling hanya kalo mereka hubungi kita minta diliput kegiatannya. Itupun harus lewat ADM dulu. Susahnya, kalo ada wartawan datang, nanya-nanya soal masyarakat di sekitar kebun, saya agak lama jawabnya. Bisa memang saya jawab, cuma kan jadi lama...ya..kan gara-gara harus hubungi PU di kebun dulu. Saya kan nggak bisa ambil kebijakan seenaknya.

Q : Apakah ada keinginan inisiatif ini dijalankan ?

A : Ada, cuma belum disampaikan kepada yang diatas. Lama juga itu prosesnya.

Q : Misalnya saja, jika itu disampaikan kepada direksi, apakah akan disambut dengan terbuka ?

A : Saya yakin iya, sebenarnya petinggi – petinggi atau direksi itu *welcome*, cuma nggak kepikiran ke situ. Humasnya yang seharusnya punya ide, ajukan namanya draft pertama gitu ya..namanya saya nggak tahu...untuk bentuk forum komunikasi humas. Makan biaya, pasti iya. Humas kan kerjanya memang ngabisin biaya..tapi manfaat dari habisin biaya itu jika berhasil efeknya besar. Produknya adalah image, reputasi yang baik.

Bagian Kemitraan/Umum

Q : Menurut Bapak, yang dimaksud dengan CSR itu seperti apa ?

A : CSR itu tanggung jawab sosial perusahaan, merupakan bentuk kepedulian perusahaan kepada masyarakat sekitar perusahaan.

Q : Bisa dijelaskan bentuk kepeduliannya seperti apa ?

A : Bentuk kepeduliannya itu...ya berupa pemberdayaan masyarakat, perusahaan ikut dalam memberdayakan masyarakat. Atau kata lainnya masyarakat maju ekonominya, perusahaan ikut membangun kemajuan ekonomi itu. Kalau sosialnya, ya keadaan sosialnya berlangsung dengan baik. Kalaupun ada masalah bukan masalah yang pelik.

Q : Bisa lebih dijelaskan lagi Pak, seperti apa keadaan sosial yang baik tadi ?

A : Misalnya saja, tidak ada angka kemiskinan yang tinggi, atau nggak ada sekolah, konflik antar masyarakat. Itu adalah keadaan sosial yang baik.

Q : Menurut Bapak, CSR yang Bapak sebut tadi, sudah dilaksanakan belum oleh PTP?

A : O iya, jelas. CSR seperti itulah yang kita laksanakan di PTP ini. Kita ada Program Kemitraan dan Bina Lingkungan itu.

Q : Apa yang PTP ingin capai dengan melaksanakan CSR itu ?

A : Salah satu kekhasan PTP kan adanya kemitraan antara perusahaan dan masyarakat. Jadi CSR itu bisa membantu terwujudnya kemitraan yang baik dengan masyarakat. Termasuk itu petani plasma, dan masyarakat sekitar kebun.

Q : Bisa dijelaskan lagi Pak, hubungan antara CSR dengan kemitraan ?

A : Begini, program kemitraan utama kita kan PIR (Program Inti Rakyat), tapi ini kan tujuannya bukan untuk sosial ya, jadi bukan CSR. Program CSR kita itu Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, nah kalau program PKBL ini berjalan baik dan efektif, bisa menciptakan kondisi yang aman dan menguntungkan kita, juga termasuk dalam menjalankan program PIR tadi. Petani plasma yang jadi mitra kita kan termasuk masyarakat biasa juga yang termasuk dalam target program PKBL.

Kalau CSRnya bagus, masyarakat kan merasa dekat dengan PTP. Ini kan termasuk keadaan yang menciptakan kemitraan.

Q : Kalau begitu, prinsip kemitraan yang ingin dicapai PTP seperti apa?

A : PTP dan masyarakat kan mitra, yaa..seperti partner kerjalah..nah, prinsip kemitraan itu tidak ada jarak antara PTP dan masyarakat dalam kegiatan sehari-hari. Yang ingin dicapai PTP itu keadaan yang saling menguntungkan atau *win-win solutions*. PTP dan masyarakat sama – sama untung.

Q : Keuntungan untuk PTP seperti apa Pak ?

A : Kita tidak muluk – muluk ya...keadaan yang aman dan kondusif untuk PTP itu sudah merupakan keuntungan yang harus kita capai. Ini kan sangat membantu kita untuk menjalankan kegiatan operasional kita sehari – hari. Kalau tidak ada gangguan dari masyarakat, kita kan bisa produksi dengan lancar.

Q : Kalau untuk masyarakat ?

A : Ya, seperti yang saya bilang tadi ada kemajuan ekonomi di masyarakat.

Q : Keadaan yang Bapak bilang tadi apakah sudah tercapai di PTP ?

A : Ya, kita punya hubungan yang baik dengan masyarakat, dan sejak kita berdiri di wilayah Jambi ini, masyarakat juga mengalami kemajuan, dan kita ada andil.

Q : Apa yang menjadi dasar diterapkannya CSR dalam PTP ?

A : Dasarnya ya..SK Mentri no. 236 itu, kan wajib untuk dilaksanakan BUMN seperti PTP ini. Berdasarkan SK ini juga kenapa saya bilang hanya PKBL saja yang program CSR PTP tidak termasuk PIR. PIR beda lagi SK-nya.

Q : Kalau dilihat dari pemahaman CSR PTP ini, apakah CSR itu berdasarkan tindakan dermawan yang artinya nggak dapat untung ?

A : Tidak ya, CSR itu kan tidak penting mendatangkan untung bagi perusahaan atau tidak, yang penting mendatangkan manfaat bagi masyarakat.

Q : Selain dari peraturan pemerintah, apakah ada kebijakan dari perusahaan juga yang menjadi dasar penerapan CSR di PTP ?

A : Ini maksudnya bagaimana ? Kalau murni kebijakan perusahaan dulu ya nggak ada... kita kan BUMN jadi harus ada peraturan pemerintah dulu. Tetapi kalau kebijakan manajemen berdasarkan SK no. 236 itu ada.

Lagipula, CSR tidak begitu penting apakah berasal dari peraturan yang bersifat wajib atau berdasarkan inisiatif manajemen. Namun yang penting adalah bagaimana CSR tersebut dapat dirasakan manfaatnya oleh PTP dan masyarakat.

Q : Apa manfaat yang ingin diperoleh PTP dengan menjalankan CSR ini ?

A : Kalau manfaat langsung ya, selain keadaan aman dan kondusif tadi ya...penilaian kesehatan perusahaan, kan CSR ini juga kriteria untuk dinilai pemerintah.

Tapi CSR itu kan lama dan butuh proses panjang..Nggak bisa langsung dirasakan manfaatnya..Tapi kalau sudah berjalan baik, ada manfaat yang cukup berpengaruh, bagus untuk citra PTP. Citra positif yang selama ini dibangun PTP.

Karena lama prosesnya, harus diterapkan dalam keseharian perusahaan. Program jalan terus dalam keseharian, bukan hanya karena ada event atau konflik dengan warga.

Q : Dalam pelaksanaan CSR, PTP menerapkannya seperti apa Pak ?

A : Kita ada Program PKBL kepanjangannya Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. Itu penerapan CSR PTP, lebih lanjutnya kamu ke unit khususnya unit PKBL.

Q : Selain PKBL itu, apakah ada bentuk lain selain program ? Kebijakan – kebijakan perusahaan misalnya ?

A : Sepertinya tidak ada ya...CSR itu ya wujudnya PKBL.

PU (Petugas Umum) Unit Kebun Tanjung Lebar

Q : Menurut Bapak, yang dimaksud dengan CSR itu seperti apa ?

A : CSR itu bentuk kepedulian perusahaan terhadap masyarakat sekitar kebun.

Q : Bisa dijelaskan lebih lanjut Pak, bentuk kepedulian itu seperti apa ?

A : Bentuk kepedulian itu berupa tanggung jawab, mulai yang diwujudkan dalam kebijakan perusahaan saja sampai pada program – program sosial dan ekonomi. Nah, ini sangat dipengaruhi kondisi finansial perusahaan.

Q : Maksudnya dipengaruhi kondisi finansial Pak ?

A : Kebijakan itu diturunkan menjadi program tergantung keuangan perusahaan. Jika perusahaan secara keuangan belum mampu mewujudkan tanggung jawab menjadi program, yang diwujudkan melalui kebijakan. Program itu kan memakan cukup banyak biaya.

Q : Bisa diberi contoh Pak ?

A : Misalnya saja, dengan Suku Anak Dalam (SAD). Kan banyak mereka di wilayah kerja kita. Tapi kita belum mampu memberdayakan mereka, tanggung jawab kita ya berupa tanggung jawab moral. Tanggung jawab moral itu berupa kita tidak mengganggu mereka untuk berkeliaran dan beraktivitas di wilayah kerja, selama itu tidak merusak.

Q : Apa yang menjadi tujuan PTP dalam melaksanakan praktek CSR ?

A : Tujuannya ya untuk mewujudkan prinsip kemitraan, mendukung terwujudnya kemitraan yang serasi. Sama halnya dengan prinsip kemitraan yang bilang bahwa dua pihak sama – sama untung, CSR juga begitu kan ?..jadi keduanya saling mendukung. Walaupun nggak semudah ini, banyak halangan juga.

Q : Bisa dijelaskan Pak, seperti apa keadaan yang saling menguntungkan itu ?

A : Saling untung itu...PTP untungya dengan lingkungan kerja yang aman dan terkendali. Sedangkan untuk masyarakat maju ekonomi dan sosialnya. Lapangan kerja nambah, pengangguran kurang, nggak ada kemiskinan yang tinggi, konflik, dan lainnya. Itu keadaan yang menguntungkan dua pihak. Pada akhirnya, tujuan adanya CSR di PTP ini juga untuk mendukung kegiatan bisnis PTP.

Q : Maksudnya Pak ?

A : Begini, jika masyarakat memandang PTP peduli sama mereka, tidak akan ada konflik atau gangguan dari masyarakat. Dengan terhindarnya konflik dan gangguan tadi, kondisi lingkungan kerja akan aman dan terkendali. Kalau lingkungan kerja terkendali, lancar lah PTP berproduksi, lancar pula bisnisnya.

Q : Bentuk perwujudan CSR PTP diwujudkan dalam bentuk apa Pak ?

A : Wujudnya program, ada 3. PKBL dan PIR.

Q : Unit PKBL menyatakan bahwa PU paling sering koordinasi dengan unit PKBL, seperti apa koordinasinya ?

A : Iya, gini..kalau ada permohonan bantuan biasanya kalau nggak langsung dikasih ke unit PKBL, ya diberikan kepada saya. Lalu saya berikan kepada unit PKBL. Kedua, sebelum itu disetujui saya disuruh lihat apakah bantuan itu memang perlu atau hanya bohong.

Pas penyerahan bantuan pun, PU dan unit PKBL itu sama – sama ke lapangan. Dan kalau sudah selesai, nanti dicek lagi benar nggak bantuan itu digunakan sesuai dengan permohonan atau malah diselewengkan. Itu kalau unit KBL tidak bisa mengecek, saya yang lakukan.

Q : Saya baca di job description bahwa salah satu tugas PU menjalin hubungan dengan masyarakat setempat ?

A : Iya, itu memang benar. Tapi saya akui ini kurang dijalankan maksimal. Banyak kekurangan juga ya...Punya tiap kebun cuma satu, kayak saya misalnya. Punya asisten pun cuma satu. Padahal, saya punya tugas banyak, bukan hanya menjalin hubungan dengan penduduk sekitar. ngurusin karyawan, pemerintah daerah dan yang lainnya. Mana desa sekitar kebun tanjung lebar bukan hanya satu, tapi banyak, jaraknya cukup jauh satu sama lain. ditambah pula dengan kondisi jalan yang belum mulus. Tambah susah saya untuk bisa pergi mengunjungi mereka. Maka, saya hanya bisa sering – sering ke desa terdekat.

Q : Kalau mengenai program sosial, apakah penduduk desa – desa sekitar sini tahu ada program sosial dari PTP?

A : Ya..mungkin tidak semua ya..tapi kalau pun dia tidak tahu, kan tidak perlu segan meminta bantuan kepada kita. Lagipula, kalau memang kita punya dana dan bisa mengabdikan, kan kita bantu. Kami juga sudah dekat dengan tokoh – tokoh masyarakat disini.

Komunitas

1. Kepala Desa Sei Tanjung Lebar

Q : Apa tanggapan Datuk tentang keberadaan PTP ? Apakah sejauh ini memberikan dampak yang positif ?

A : Ya, keberadaan PTP itu memberikan manfaat bagi penduduk disini. Misalnya saja, dulu waktu belum ada PTP, kemana – mana melalui sungai. Tapi sejak PTP berdiri, ada pembangunan, ada pasar, jadi penduduk pun mudah kalau mau keluar.

Q : Apakah selama ini PTP pernah memberikan bantuan, menyelenggarakan kegiatan sosial, atau sekedar memberikan sumbangan untuk membangun desa atau memberdayakan masyarakat ?

A : Belum pernah ada pemberian baik itu pembangunan desa atau pemberdayaan.

Q : Kalau dari masyarakat desa ini sendiri, apakah pernah meminta bantuan ataupun memasukkan proposal permohonan bantuan kepada PTP ?

A : Kalau masalah bantuan, disini memang tidak pernah minta bantuan. Kalau 17an itu memang karang teruna itu mengadakan kegiatan dan meminta bantuan untuk mengadakan kegiatan karang teruna. Tapi kalau untuk yang dua itu belum pernah.

Q : Kalau bantuan untuk pendidikan anak – anak disini, atau sarana ibadah ?

A : Kalau sekolah, ya itu dari pemerintah bukan dari PTP. Sarana Ibadah belum juga.

Q : Kenapa tidak pernah memasukkan bantuan ke PTP ?

A : Memang ada ya Mbak ? Saya sama penduduk sini itu nggak tau... kalau ada PTP bikin kayak gitu.

Q : Jadi Datuk dan penduduk disini belum pernah diberitahu oleh PTP ?

A : Belum ya..

Q : Sekarang Datuk sudah tahu, apa ada rencana mohon bantuan ?

A : Belum tahu juga..nanti kami pikirkan..karena selama ini saya tiap kali ada rakor..kan ada wakil dari saya, itu ketua – ketua RT. Jadi, apa keluhan pas rakor itu bisa disampaikan ketua RT yang juga karyawan ke PTP. Selama ini sih seperti itu.

Q : Dan keluhan itu pernah ditanggapi oleh PTP ?

A : Sejauh ini sih belum pernah diwujudkan oleh PTP. Saya juga nggak tahu mana yang salah, ketua RT saya yang tidak pernah menyampaikan atau PTPnya yang tidak menanggapi.

Q : Datuk tidak bertanya kepada ketua RTnya ?

A : Tidak, saya tidak lihat lebih lanjut lagi siapa yang salah.

Q : Kenapa ?

A : Belum perlu menurut saya, lagipula sudah ada program yang Mbak bilang tadi, saya pikir melalui program itu saja.

Q : Kalau soal komunikasi, apakah orang kebun itu sering datang dan bergaul dengan penduduk disini ?

A : Kalau hubungan dengan PTP..biasa..kita akrab..RT-RT saya pun sebagian saya ambil dari karyawan PTP. Jadi bisa membaur kita, hubungan kekeluargaan itu sudah ada.

Q : Kalau resmi dari PTP datang silaturahmi, begitu ?

A : Ada, Pak PU suka main ke sini..ngobrol – ngobrol dengan penduduk sini. Pak ADM yang lama – lama juga baik dan ramah, suka main ke sini. Tapi kalau

yang baru ini belum pernah, padahal Pak ADM sudah lama menjabat. Tapi biasanya kalo baru pergantian itu, orang PTP datang kenalan dengan kami.

Q : Kalau dilihat, berarti perkembangan PTP ini membantu perkembangan penduduk sini Datuk ?

A : Kalau sampai saat ini, bisa membantu ya. Karena dulunya kan masyarakat kita kan kekurangan lapangan kerja. Sekarang lumayan banyak warga sini yang telah diterima sebagai karyawan di PTP.

Q : Jumlahnya kira – kira berapa orang Datuk ?

A : Jumlahnya kira – kira 20 orang yang kerja di PTP.

Q : Cukup mewakilikah?

A : Ya, itu cukup mewakili ya.

Q : Disini kan banyak SAD ya Datuk..apakah ada dari mereka yang menjadi karyawan PTP ?

A : Yang sudah maju ada Mbak. Tapi kalau yang masih tradisional, yang berpindah – pindah itu belum pernah. Kalo perhatian PTP untuk suku anak dalam belum ada. Pemberdayaan Suku Anak Dalam masih dilakukan oleh dinas sosial saja. Malah hilang pula mata pencaharian mereka. SAD itu kan mayoritasnya cari ikan di sungai ini. Tapi sejak PTP berdiri dan punya pabrik, walaupun tidak langsung mencemari tapi kena polusi juga. Ikan – ikan jadi jarang sekali, mereka pun rugi kan.

Q : Kalau konflik dengan masyarakat sekitar atau dengan SAD ?

A : Kalau dengan penduduk sini belum pernah Mbak. Kalau soal konflik PTP dengan SAD belum pernah terjadi ya mbak...yang saya tahu juga kalau soal tanah adat, ada memang yang dijadikan kebun plasma.

Q : Dengan semua ini, apa yang menjadi harapan Datuk kepada PTP ?

A : Ya..tidak muluk - muluk yaa..supaya PTP mau bantu kami, ikut kerja sama dengan masyarakat sini. Karena kami merasa bantuan Pemerintah selama ini masih kurang. Misalnya kayak SAD yang hilang mata pencahariannya itulah..harapan supaya PTP mau bina SAD itu. Kasian kan mbak, makannya dari mana..

2. Kepala Desa Sei Merkanding

Q : Apa tanggapan Datuk tentang keberadaan PTP ? Apakah sejauh ini memberikan dampak yang positif ?

A : Keberadaan PTP sejauh ini ikut mengembangkan desa ya. Kan sejak ada PTP banyak aktivitas. Daerah – daerah ikut berkembang, desa ini juga berkembang kan.

- Q : Bagaimana dengan peran PTP atau kontribusi PTP untuk perkembangan desa dan penduduk disini ?
- A : Peran maksudnya, seperti apa?
- Q : Peran seperti membangun desa, memberdayakan masyarakat seperti bantuan sosial, kegiatan sosial?
- A : Ohh... kalau soal itu, PTP rajin ya ngasih bantuan. Mereka cukup bekerjasama soal bantuan sosial. Desa ini banyak mendapat bantuan dari PTP.
- Q : Masalah bantuan itu, masyarakat disini yang meminta ? atau PTP langsung datang dan melihat kondisi, nanya – nanya sama penduduk lalu memberikan bantuan atau mengadakan kegiatan ?
- A : Kalau itu kami yang datang ke PTP. Minta bantuan.
- Q : Berarti Datuk tahu kalau ada program khusus dari PTP untuk kegiatan semacam itu ?
- A : Iya, saya tahu itu ada, tapi lupa namanya apa.
- Q : Kalau soal komunikasi, bagaimana tanggapan Datuk ? Apakah selama ini PTP rajin menjalin hubungan dengan desa ini ? sering datang atau sering mengundang tokoh masyarakat atau pemerintah desa untuk datang ke PTP ?
- A : Nah.. ini dia.. selama ini jarang sekali... kalau karyawan, ya... jelas.. mereka kan banyak yang dari penduduk sini. Tapi kalau pejabat – pejabatnya macam Pak ADM atau Pak PU jarang sekali datang kesini.
Tapi itu memang sudah dari dulu ya... kalau butuh saja baru datang. Kayak dulu, beberapa tahun sejak berdiri tak pernah ada datang ke desa kenalan, tapi sejak ada konflik sama penduduk desa ini dan beberapa desa lain yang dekat sini juga, barulah datang mereka.
- Q : Berarti kalau dilihat bantuan sering datang tapi komunikasi jarang ?
- A : Iya, dan akhirnya timbul salah paham. Kayak pernah kejadian. Biasanya PTP itu selalu memberikan dana untuk satu tahun untuk pembangunan desa, tapi setahun yang lalu, bantuan itu gak diberikan. Kita pun bertanya – tanya kenapa, dan sempat kecewa, PTP kok tanpa ada alasan yang jelas hentikan bantuan. Akhirnya, kita beramai – ramai ke kebun bertanya. Ternyata, alasan PTP karena keadaan perusahaan merugi. Barulah kami paham. Kalau tidak kami yang bertanya, mungkin kecewa kami terus berlanjut sampai sekarang.
- Q : Jadi, menurut Datuk PTP itu kurang akrab dengan penduduk sini ?
- A : Iya, walaupun bantuan cukup sering diberikan pada desa ini, tapi kok ya.. kita merasa tetap ada jarak dengan PTP... agak sombong menurut saya.. hal ini mungkin karena ADM dan bawahannya jarang sekali berinteraksi dengan masyarakat disini
- Q : Kalau mengenai perekrutan penduduk menjadi karyawan PTP ?
- A : Kalau itu memang ada, cukup banyak penduduk sini jadi karyawan.
- Q : Kalau begitu apa yang menjadi keinginan masyarakat terkait dengan PTP ?

A : Inginnya, ya..sering-seringlah datang ke sini. Jalin komunikasi dengan kami. Kami kan nggak enak, kalau kami yang harus datang ke sana. Kemudian, mengenai mata pencaharian penduduk sini yang hilang akibat sungai yang disini itu kena limbah dari PTP. Inginnya, supaya PTP bantu arahkan penduduk yang dulunya bisa cari ikan tapi sekarang tidak bisa lagi..supaya bisa punya mata pencaharian sendiri.



LAMPIRAN 4





MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
NOMOR KEP-236/MBU/2003

TENTANG

PROGRAM KEMITRAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA DENGAN USAHA KECIL
DAN PROGRAM BINA LINGKUNGAN

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong kegiatan dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan serta terciptanya pemerataan pembangunan melalui perluasan lapangan kerja, kesempatan berusaha dan pemberdayaan masyarakat, perlu ditingkatkan partisipasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk memberdayakan dan mengembangkan kondisi ekonomi, kondisi sosial masyarakat dan lingkungan sekitarnya, melalui program kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan program bina lingkungan;
- b. bahwa program kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan program bina lingkungan perlu ditingkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaannya, untuk itu Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 266/KMK.016/1997 tanggal 11 Juni 1997, Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia/Kepala Badan Pembina Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep-197/M-PBUMN/1999 tanggal 29 Juli 1999 dan Nomor Kep-216/M-PBUMN/1999 tanggal 28 September 1999, perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1989);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Pencetakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
4. Peraturan .../2



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA

- 2 -

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 15; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3731) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4101);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 tentang Perusahaan Umum (PERUM) (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 16; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3732);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2001 tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 117; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4137);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG PROGRAM KEMITRAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA DENGAN USAHA KECIL DAN PROGRAM BINA LINGKUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2001 dan Perusahaan Umum (PERUM) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998.
2. Menteri adalah Menteri Badan Usaha Milik Negara.
3. Program Kemitraan BUMN Dengan Usaha Kecil yang selanjutnya disebut Program Kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.
4. Program Bina Lingkungan yang selanjutnya disebut Program BL adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN di wilayah usaha BUMN tersebut melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.

5. Usaha ... /?



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA

- 3 -

5. Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam Keputusan ini.
6. Unit Program Kemitraan dan Program BL adalah unit organisasi khusus yang mengelola Program Kemitraan dan Program BL yang merupakan bagian dari organisasi BUMN Pembina serta bertanggungjawab langsung kepada Direksi BUMN Pembina.
7. Beban Operasional adalah beban pelaksanaan operasi unit Program Kemitraan dan Program BL diluar beban pegawai yang dananya berasal dari dana Program Kemitraan dan Program BL.
8. Mitra Binaan adalah Usaha Kecil yang mendapatkan pinjaman dari Program Kemitraan.
9. BUMN Pembina adalah BUMN yang melaksanakan Program Kemitraan dan Program BL.
10. Koordinator BUMN Pembina adalah BUMN yang ditunjuk oleh Menteri untuk mengkoordinasikan BUMN Pembina di dalam suatu provinsi tertentu.
11. Kualitas pinjaman adalah status kondisi pinjaman yang terdiri dari pinjaman lancar, pinjaman kurang lancar, pinjaman diragukan dan pinjaman macet.
12. Pemulihan pinjaman adalah usaha untuk memperbaiki kualitas pinjaman kurang lancar, pinjaman diragukan dan pinjaman macet agar menjadi lebih baik kategorinya.

BAB II

PROGRAM KEMITRAAN DAN PROGRAM BL

Pasal 2

- (1) BUMN wajib melaksanakan Program Kemitraan dan Program BL dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Keputusan ini.
- (2) PERSERO Terbuka dapat melaksanakan Program Kemitraan dan Program BL dengan berpedoman pada Keputusan ini yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Pasal 3

Usaha Kecil yang dapat ikut serta dalam Program Kemitraan adalah sebagai berikut :

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- c. Milik Warga Negara Indonesia;
- d. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar;

c. Berbentuk/4



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA

- 4 -

- c. Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.
- f. Telah melakukan kegiatan usaha minimal 1 (satu) tahun serta mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan.

Pasal 4

Mitra Binaan mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. Melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan rencana yang telah disetujui oleh BUMN Pembina;
- b. Menyelenggarakan pencatatan/pembukuan dengan tertib;
- c. Membayar kembali pinjaman secara tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati;
- d. Menyampaikan laporan perkembangan usaha setiap triwulan kepada BUMN Pembina.

Pasal 5

BUMN Pembina mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. Membentuk unit Program Kemitraan dan Program BL;
- b. Menyusun *Standard Operating Procedure (SOP)* untuk pelaksanaan Program Kemitraan dan Program BL yang dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi;
- c. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Program Kemitraan dan Program BL;
- d. Melakukan evaluasi dan seleksi atas kelayakan usaha dan menetapkan calon Mitra Binaan secara langsung;
- e. Menyiapkan dan menyalurkan dana Program Kemitraan kepada Mitra Binaan dan dana Program BL kepada masyarakat;
- f. Melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap Mitra Binaan;
- g. Mengadministrasikan kegiatan pembinaan;
- h. Melakukan pembukuan atas Program Kemitraan dan Program BL;
- i. Menyampaikan laporan pelaksanaan Program Kemitraan dan Program BL yang meliputi laporan berkala baik triwulanan maupun tahunan kepada Menteri;
- j. Menyampaikan laporan berkala baik triwulanan maupun tahunan kepada Koordinator BUMN Pembina di wilayah masing-masing.

Pasal 6

Koordinator BUMN Pembina mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. Melakukan koordinasi atas perencanaan dan pengalokasian dana Program Kemitraan dan Program BL yang dilakukan oleh BUMN Pembina;
- b. Memberikan informasi kepada BUMN Pembina mengenai calon Mitra Binaan untuk menghindari duplikasi pemberian pinjaman dana Program Kemitraan;
- c. Menyampaikan laporan triwulanan dan tahunan pelaksanaan Program Kemitraan dan Program BL kepada Menteri dan tembusannya kepada BUMN Pembina di wilayah koordinasinya.

Pasal 7/5



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA

- 5 -

Pasal 7

- (1) BUMN Pembina yang memiliki kantor cabang/perwakilan di daerah dapat menyalurkan dana Program Kemitraan dan Program BL di wilayah kantor cabang/perwakilannya dengan mempertimbangkan dana yang tersedia dan kondisi wilayahnya.
- (2) Dalam hal BUMN Pembina tidak memiliki kantor cabang/perwakilan di daerah tertentu, BUMN Pembina yang bersangkutan dapat melimpahkan penyaluran dana Program Kemitraan kepada BUMN Pembina lain dengan persetujuan Menteri.
- (3) Pelimpahan penyaluran dana Program Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditarik kembali dengan persetujuan Menteri.
- (4) Dalam rangka pemenuhan dana Program Kemitraan, BUMN Pembina dapat melakukan kerjasama dengan BUMN Pembina lain dengan persetujuan Menteri.

BAB III

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN
DANA PROGRAM KEMITRAAN DAN PROGRAM BL

Pasal 8

- (1) Dana Program Kemitraan bersumber dari :
 - a. Penyisihan laba setelah pajak sebesar 1% (satu persen) sampai dengan 3% (tiga persen);
 - b. Hasil bunga pinjaman, bunga deposito dan atau jasa giro dari dana Program Kemitraan setelah dikurangi beban operasional;
 - c. Pelimpahan dana Program Kemitraan dari BUMN lain, jika ada.
- (2) Dana Program BL bersumber dari :
 - a. Penyisihan laba setelah pajak maksimal sebesar 1% (satu persen);
 - b. Hasil bunga deposito dan atau jasa giro dari dana Program BL.
- (3) Besarnya dana Program Kemitraan dan Program BL yang berasal dari penyisihan laba setelah pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh :
 - a. RUPS untuk PERSERO;
 - b. Menteri untuk PERUM.
- (4) Dalam kondisi tertentu besarnya dana Program BL yang berasal dari penyisihan laba setelah pajak dapat ditetapkan lain dengan persetujuan Menteri/RUPS
- (5) Dana Program Kemitraan dan Program BL yang berasal dari penyisihan laba setelah pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disetorkan kepada unit Program Kemitraan dan Program BL selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Pembukuan dana Program Kemitraan dan Program BL dilaksanakan secara terpisah dari pembukuan BUMN Pembina.

Pasal 9

Menteri setiap tahun menetapkan :

- a. BUMN Pembina dan Koordinator BUMN Pembina pada masing-masing Provinsi;
- b. Besarnya alokasi dana Program Kemitraan setiap BUMN Pembina pada masing-masing Provinsi.

Pasal 10/6



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA

- 6 -

Pasal 10

- (1) Dana Program Kemitraan diberikan dalam bentuk :
- a. Pinjaman untuk membiayai modal kerja dan atau pembelian aktiva tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan;
 - b. Pinjaman khusus :
 - 1) Untuk membiayai kebutuhan dana pelaksanaan kegiatan usaha Mitra Binaan yang bersifat jangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha Mitra Binaan.;
 - 2) Perjanjian pinjaman dilaksanakan antara 3 (tiga) pihak yaitu BUMN Pembina, Mitra Binaan dan rekanan usaha Mitra Binaan dengan kondisi yang ditetapkan oleh BUMN Pembina.
 - c. Hibah :
 - 1) Untuk membiayai pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi, dan hal-hal lain yang menyangkut peningkatan produktivitas Mitra Binaan serta untuk pengkajian/pencelitian;
 - 2) Besarnya dana hibah ditetapkan maksimal 20% (dua puluh persen) dari dana Program Kemitraan yang disalurkan pada tahun berjalan.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c hanya dapat diberikan kepada Mitra Binaan.
- (3) Dana Program BL digunakan untuk tujuan yang memberikan manfaat kepada masyarakat di wilayah usaha BUMN dalam bentuk bantuan :
- a. Korban bencana alam ;
 - b. Pendidikan dan atau pelatihan;
 - c. Peningkatan kesehatan;
 - d. Pengembangan prasarana dan sarana umum;
 - e. Sarana ibadah.

BAB IV

MEKANISME PENYALURAN
DANA PROGRAM KEMITRAAN DAN PROGRAM BL

Pasal 11

- (1) Tata cara pemberian pinjaman dana Program Kemitraan :
- a. Calon Mitra Binaan menyampaikan rencana penggunaan dana pinjaman dalam rangka pengembangan usahanya untuk diajukan kepada BUMN Pembina, dengan memuat sekurang-kurangnya data sebagai berikut :
 - 1) Nama dan alamat unit usaha;
 - 2) Nama dan alamat pemilik/pengurus unit usaha;
 - 3) Bukti identitas diri pemilik/pengurus;
 - 4) Bidang usaha;
 - 5) Izin usaha atau surat keterangan usaha dari pihak yang berwenang (jika ada);
 - 6) Perkembangan/7



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA

- 7 -

- 6) Perkembangan kinerja usaha (arus kas, perhitungan pendapatan/beban dan neraca atau data yang menunjukkan keadaan keuangan serta hasil usaha); dan
 - 7) Rencana usaha dan kebutuhan dana.
- b. BUMN Pembina melaksanakan evaluasi dan seleksi secara langsung atas permohonan yang diajukan oleh calon Mitra Binaan setelah berkoordinasi dengan Koordinator BUMN Pembina;
 - c. Calon Mitra Binaan yang layak bina, menyelesaikan proses administrasi pinjaman dengan BUMN Pembina bersangkutan;
 - d. Pemberian pinjaman kepada calon Mitra Binaan dituangkan dalam surat perjanjian/kontrak yang sekurang-kurangnya memuat :
 - 1) Nama dan alamat BUMN Pembina dan Mitra Binaan;
 - 2) Hak dan kewajiban BUMN Pembina dan Mitra Binaan;
 - 3) Jumlah pinjaman dan peruntukannya;
 - 4) Syarat-syarat pinjaman (jangka waktu pinjaman, jadwal angsuran pokok dan bunga).
 - e. BUMN Pembina dilarang memberikan pinjaman kepada calon Mitra Binaan yang menjadi Mitra Binaan BUMN Pembina lain.
- (2) Besarnya bunga pinjaman dana Program Kemitraan maksimal 12% (duabelas persen) per tahun dengan sistem perhitungan bunga efektif.

Pasal 12

Tata cara penyaluran dana Program BL :

- a. BUMN Pembina terlebih dahulu melakukan survei dan identifikasi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di wilayah usaha BUMN Pembina setempat;
- b. Pelaksanaan Program BL dilakukan secara langsung oleh BUMN Pembina yang bersangkutan.

BAB V

BEBAN OPERASIONAL PROGRAM KEMITRAAN DAN PROGRAM BL

Pasal 13

- (1) Beban Operasional Program Kemitraan bersumber dari hasil bunga pinjaman, bunga deposito dan atau jasa giro dana Program Kemitraan.
- (2) Besarnya Beban Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimal 70% (tujuh puluh persen) dari hasil bunga pinjaman, bunga deposito dan atau jasa giro dana Program Kemitraan tahun berjalan.
- (3) Khusus BUMN Pembina yang ditunjuk sebagai Koordinator BUMN Pembina, besarnya Beban Operasional maksimal 80% (delapan puluh persen) dari hasil bunga pinjaman, bunga deposito dan atau jasa giro dana Program Kemitraan tahun berjalan.

(4) Dalam/8



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA

- 8 -

- (4) Dalam hal Beban Operasional yang menjadi beban dana Program Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, maka kekurangan tersebut dibebankan kepada anggaran biaya BUMN Pembina yang bersangkutan dengan mata anggaran Beban Operasional Program Kemitraan.
- (5) Dalam hal Beban Operasional Program Kemitraan bagi BUMN Pembina yang menerima pelimpahan dari BUMN Pembina lain tidak mencukupi, maka kekurangan tersebut menjadi beban BUMN Pembina yang menerima pelimpahan.

Pasal 14

- (1) Beban operasional Program BL dibiayai dari dana Program BL.
- (2) Besarnya Beban Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimal 3% (tiga persen) dari dana Program BL yang disalurkan pada tahun yang bersangkutan.

Pasal 15

Beban Operasional Program Kemitraan dan Program BL dituangkan dalam RKA Program Kemitraan dan Program BL.

Pasal 16

BUMN Pembina dilarang menggunakan dana Program Kemitraan dan Program BL untuk hal-hal diluar ketentuan yang diatur dalam Keputusan ini.

BAB VI

PENYUSUNAN DAN PENGESAIAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 17

- (1) Setiap BUMN Pembina wajib menyusun RKA Program Kemitraan dan Program BL.
- (2) RKA Program Kemitraan dan Program BL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpisah dari Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) BUMN Pembina.
- (3) RKA Program Kemitraan dan Program BL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Rencana kerja Program Kemitraan dan Program BL, dirinci menurut wilayah binaan;
 - b. Anggaran Program Kemitraan dan Program BL, terdiri atas sumber dana, dana yang tersedia dan rencana penggunaan dana sesuai dengan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. Proyeksi Perhitungan Pendapatan dan Beban Program Kemitraan;
 - d. Proyeksi Neraca Program Kemitraan;
 - e. Masalah yang dihadapi dan langkah-langkah penyelesaiannya.

(4) Penyusunan/9



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA

- 9 -

- (4) Penyusunan RKA Program Kemitraan dan Program BL secara lebih rinci dilakukan berdasarkan pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 18

- (1) Direksi BUMN Pembina wajib menyampaikan RKA Program Kemitraan dan Program BL kepada Menteri/Pemegang Saham dengan tembusan kepada Komisaris/Dewan Pengawas paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum memasuki tahun anggaran.
- (2) Menteri/RUPS mengesahkan RKA Program Kemitraan dan Program BL paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan.
- (3) Dalam hal RKA Program Kemitraan dan Program BL belum memperoleh pengesahan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka RKA Program Kemitraan dan Program BL tersebut dianggap telah disahkan dan dapat dilaksanakan sepanjang telah memenuhi ketentuan Pasal 17 dan ayat (1) pasal ini.
- (4) Direksi BUMN Pembina bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pencapaian sasaran dalam RKA Program Kemitraan dan Program BL.
- (5) Komisaris/Dewan Pengawas BUMN Pembina bertanggung jawab atas pengawasan pelaksanaan Program Kemitraan dan Program BL.

BAB VII

PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN LAPORAN

Pasal 19

- (1) Setiap BUMN Pembina wajib menyusun laporan pelaksanaan Program Kemitraan dan Program BL.
- (2) Laporan pelaksanaan Program Kemitraan dan Program BL terdiri dari Laporan Triwulanan dan Laporan Tahunan.
- (3) Laporan pelaksanaan Program Kemitraan dan Program BL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara terpisah dari Laporan Berkala dan Laporan Tahunan BUMN Pembina.
- (4) Laporan Triwulanan dan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Program BL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat :
- Realisasi pelaksanaan Program Kemitraan dan Program BL, dirinci menurut wilayah binaan;
 - Realisasi anggaran Program Kemitraan dan Program BL, terdiri atas sumber dana, dan yang tersedia dan realisasi penggunaan dana sesuai dengan pelaksanaan Program Kemitraan dan Program BL sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - Perhitungan Pendapatan dan Behan Program Kemitraan;
 - Neraca Program Kemitraan;
 - Perkembangan usaha Mitra Binaan
 - Masalah yang dihadapi dan langkah-langkah penyelesaiannya;

(5) Penyusunan /10



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA

- 10 -

- (5) Penyusunan laporan pelaksanaan Program Kemitraan dan Program BL secara lebih rinci dilakukan berdasarkan pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini.

Pasal 20

- (1) Direksi BUMN Pembina wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Program Kemitraan dan Program BL kepada Menteri/Pemegang Saham dengan tembusan kepada Komisaris/Dewan Pengawas, sebagai berikut :
- Laporan Triwulanan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan;
 - Laporan Tahunan (*audited*) paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.
- (2) Menteri/RUPS mengesahkan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Program BL (*audited*) paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.
- (3) Pengesahan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Program BL sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggungjawab (*acquite at de charge*) kepada Direksi dan Komisaris/Dewan Pengawas atas pengurusan dan pengawasan Program Kemitraan dan Program BL sejauh tindakan tersebut ternyata dalam Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Program BL yang telah diaudit oleh Auditor.

Pasal 21

Auditor yang memeriksa Laporan Tahunan pelaksanaan Program Kemitraan dan Program BL ditetapkan oleh :

- RUPS untuk PERSERO;
- Menteri untuk PERUM.

BAB VIII

KUALITAS PINJAMAN DANA PROGRAM KEMITRAAN

Pasal 22

Kualitas pinjaman dana Program Kemitraan dinilai berdasarkan pada ketepatan waktu pembayaran kembali pokok dan bunga pinjaman Mitra Binaan.

Pasal 23

Dalam hal Mitra Binaan hanya membayar sebagian angsuran, maka pembayaran tersebut terlebih dahulu diperhitungkan untuk pembayaran bunga pinjaman dan sisanya bila ada untuk pembayaran pokok pinjaman.

Pasal 24/11



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA

- 11 -

Pasal 24

Penggolongan kualitas pinjaman ditetapkan sebagai berikut :

- a. Lancar, adalah pembayaran angsuran pokok dan bunga tepat waktu;
- b. Kurang lancar, apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 1 (satu) hari dan belum melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama;
- c. Diragukan, apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari dan belum melampaui 360 (tiga ratus enam puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama;
- d. Macet, apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 360 (tiga ratus enam puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama;

Pasal 25

- (1) Terhadap kualitas pinjaman kurang lancar, diragukan dan macet dapat dilakukan usaha-usaha pemulihan pinjaman dengan cara penjadwalan kembali (*rescheduling*) atau penyesuaian persyaratan (*reconditioning*) apabila memenuhi kriteria :
 - a. Mitra Binaan beritikad baik atau kooperatif terhadap upaya penyelamatan yang akan dilakukan;
 - b. Usaha Mitra Binaan masih berjalan dan mempunyai prospek usaha;
 - c. Mitra Binaan masih mempunyai kemampuan untuk membayar angsuran.
- (2) Dalam hal dilakukan tindakan penyesuaian persyaratan (*reconditioning*), tunggakan bunga pinjaman dapat dikapitalisasi menjadi pokok pinjaman atau dihapuskan tunggakan beban bunganya dan beban bunga selanjutnya.
- (3) Tindakan penyesuaian persyaratan (*reconditioning*) dilakukan setelah adanya tindakan penjadwalan kembali (*rescheduling*).

Pasal 26

- (1) Pinjaman macet yang telah diupayakan pemulihannya namun tidak terpulihkan, dikelompokkan dalam aktiva lain-lain dengan pos Pinjaman Bermasalah;
- (2) Terhadap pinjaman bermasalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan dihapusbukukan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri/RUTS;
- (3) Terhadap pinjaman bermasalah yang telah dihapusbukukan tetap diupayakan penagihannya dan hasilnya dicatat dalam pos Pinjaman Bermasalah yang Diterima Kembali.
- (4) Jumlah dan mutasi rekening Pinjaman Bermasalah dan Pinjaman Bermasalah yang Diterima Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), dilaporkan secara periodik dalam laporan triwulanan.

BAB IX...../12



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA

- 12 -

BAB IX
KINERJA PROGRAM KEMITRAAN

Pasal 27

- (1) Kinerja Program Kemitraan merupakan salah satu indikator penilaian tingkat keschatan BUMN Pembina.
- (2) Perhitungan kinerja Program Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang Penilaian Tingkat Keschatan Badan Usaha Milik Negara.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

Ketentuan-ketentuan dalam Keputusan ini berlaku pula bagi anak perusahaan BUMN dan perusahaan patungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah atau dengan pihak lainnya, dengan ketentuan pemberlakuan Keputusan ini dikukuhkan dalam RUPS masing-masing perusahaan dimaksud.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka :

1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994 tentang Pedoman Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi Melalui Penanaman Dana dari Bagian Laba Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 266/KMK.016/1997 tanggal 11 Juni 1997;
2. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia/Kepala Badan Pembina Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep-197/M-PBUMN/1999 tanggal 29 Juli 1999 tentang Pedoman Penentuan Kualitas dan Penghapusbukuan (*Write-Off*) Pinjaman Dana Program Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK) dari Bagian Laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
3. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia/Kepala Badan Pembina Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep-216/M-PBUMN/1999 tanggal 28 September 1999 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan BUMN;
4. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-101/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Badan Usaha Milik Negara, sepanjang yang mengatur mengenai Program Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi;
5. Ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini, dinyatakan tidak berlaku bagi BUMN.

Pasal 30...../13



Keputusan Menteri
Badan Usaha Milik Negara
Nomor : KEP-236/MBU/2003
Tanggal : 17 Juni 2003

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA

- 13 -

Pasal 30

Program Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi dan Program Bina Lingkungan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan-ketentuan sebelum berlakunya Keputusan ini tetap dilanjutkan pelaksanaannya dengan berpedoman pada Keputusan ini.

**BAB XII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 31

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Perekonomian;
3. Menteri Keuangan;
4. Para Deputi dan Asisten Deputi di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 17 Juni 2003

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA

Ttd

LAKSAMANA SUKARDI





MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
PROGRAM KEMITRAAN DAN PROGRAM BINA LINGKUNGAN

1. Judul
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA)
PROGRAM KEMITRAAN DAN PROGRAM BINA LINGKUNGAN
PT / PERUM
TAHUN X
2. Kata Pengantar
3. Daftar Isi
4. Daftar Lampiran
5. BAB I : PENDAHULUAN
Sekurang-kurangnya memuat :
 - Informasi bidang usaha BUMN Pembina
 - Landasan Hukum
 - Struktur Organisasi BUMN Pembina termasuk didalamnya Unit Program Kemitraan dan Program BL
 - Gambaran Umum Mitra Binaan
6. BAB II : PELAKSANAAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PROGRAM KEMITRAAN DAN PROGRAM BINA LINGKUNGAN TAHUN X-1
 - A. PROGRAM KEMITRAAN
 1. Realisasi Rencana Kerja.
Sekurang-kurangnya memuat informasi jumlah Mitra Binaan, Perkembangan Kinerja Mitra Binaan
 2. Realisasi Anggaran.
 - 2.1. Sumber Dana
 - 2.2. Dana Tersedia dan Penggunaan Dana
 - 2.3. Penyaluran per Wilayah dan Sektor
 - 2.4. Mutasi Pinjaman Bermasalah
 - 2.5. Pendapatan dan Beban
 - 2.6. Neraca
 - B. PROGRAM BINA LINGKUNGAN
 1. Realisasi Rencana Kerja
Sekurang-kurangnya memuat realisasi sasaran yang meliputi bentuk dan jumlah penerima bantuan per wilayah usaha BUMN Pembina.
 2. Realisasi Anggaran
 - 2.1. Sumber Dana
 - 2.2. Dana Tersedia dan Penggunaan Dana
 - 2.3. Penyaluran per bentuk bantuan per wilayah usaha BUMN Pembina

7. BAB III.....



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA

7. BAB III : RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PROGRAM KEMITRAAN DAN PROGRAM BINA LINGKUNGAN TAJIUN X

A. PROGRAM KEMITRAAN

1. Rencana Kerja.
 - 1.1. Program Pembinaan.
Sekurang-kurangnya memuat Sasaran, Strategi dan Kebijakan Pembinaan.
 - 1.2. Perkembangan Mitra Binaan.
Sekurang-kurangnya memuat informasi jumlah Mitra Binaan, Perkembangan Kinerja Mitra Binaan.
2. Anggaran.
 - 2.1. Sumber Dana
 - 2.2. Dana Tersedia dan Penggunaan Dana
 - 2.3. Proyeksi Penyaluran per Wilayah dan Sektor
 - 2.4. Mutasi Pinjaman Bermasalah
 - 2.5. Pendapatan dan Beban
 - 2.6. Neraca

B. PROGRAM BINA LINGKUNGAN

1. Rencana Kerja
Sekurang-kurangnya memuat sasaran yang meliputi bentuk dan jumlah penerima bantuan per wilayah usaha BUMN Pembina.
2. Anggaran
 - 2.1. Sumber Dana
 - 2.2. Dana Tersedia dan Penggunaan Dana
 - 2.3. Proyeksi penyaluran per bentuk bantuan per wilayah usaha BUMN Pembina

8. BAB IV : LAIN-LAIN

- A. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian
- B. Hal-hal yang perlu mendapat persetujuan Menteri/RUPS
- C. Masalah yang dihadapi dan tindak lanjut penyelesaiannya

9. LAMPIRAN-LAMPIRAN



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA

PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN TRIWULANAN
PROGRAM KEMITRAAN DAN PROGRAM BINA LINGKUNGAN

1. Judul
LAPORAN TRIWULAN
PROGRAM KEMITRAAN DAN PROGRAM BINA LINGKUNGAN
PT / PERUM
TAHUN X
2. Kata Pengantar
3. Daftar Isi
4. Daftar Lampiran
5. BAB I : PENDAHULUAN
Sekurang-kurangnya memuat informasi pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan dalam Triwulan ...
6. BAB II : REALISASI RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PROGRAM KEMITRAAN DAN PROGRAM BINA LINGKUNGAN TRIWULAN TAHUN X
 - A. PROGRAM KEMITRAAN
 1. Realisasi Rencana Kerja.
Sekurang-kurangnya memuat informasi jumlah Mitra Binaan, Perkembangan Kinerja Mitra Binaan selama Triwulan ... Tahun X
 2. Realisasi Anggaran.
 - 2.1. Sumber Dana
 - 2.2. Dana Tersedia dan Penggunaan Dana
 - 2.3. Penyaluran per Wilayah dan Sektor
 - 2.4. Mutasi Pinjaman Bermasalah
 - B. PROGRAM BINA LINGKUNGAN
 1. Realisasi Rencana Kerja
Sekurang-kurangnya memuat realisasi sasaran yang meliputi bentuk dan jumlah penerima bantuan per wilayah usaha BUMN Pembina selama Triwulan Tahun X
 2. Realisasi Anggaran
 - 2.4. Sumber Dana
 - 2.5. Dana Tersedia dan Penggunaan Dana
 - 2.6. Penyaluran per bentuk bantuan per wilayah usaha BUMN Pembina.
7. LAMPIRAN-LAMPIRAN



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA

PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN
PROGRAM KEMITRAAN DAN PROGRAM BINA LINGKUNGAN

1. **Judul**
LAPORAN TAHUNAN
PROGRAM KEMITRAAN DAN PROGRAM BINA LINGKUNGAN
PT / PERUM
TAHUN X
2. **Kata Pengantar**
3. **Daftar Isi**
4. **Daftar Lampiran**
5. **BAB I : PENDAHULUAN**
Sekurang-kurangnya memuat :
 - Informasi bidang usaha BUMN Pembina
 - Landasan Hukum
 - Struktur Organisasi BUMN Pembina termasuk didalamnya Unit Program Kemitraan dan Program BL
 - Gambaran Umum Mitra Binaan
6. **BAB II : PELAKSANAAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PROGRAM KEMITRAAN DAN PROGRAM BINA LINGKUNGAN TAHUN X**
 - A. **PROGRAM KEMITRAAN**
 1. **Realisasi Rencana Kerja.**
Sekurang-kurangnya memuat informasi jumlah Mitra Binaan, Perkembangan Kinerja Mitra Binaan
 2. **Realisasi Anggaran.**
 - 2.1. Sumber Dana
 - 2.2. Dana Tersedia dan Penggunaan Dana
 - 2.3. Penyaluran per Wilayah dan Sektor
 - 2.4. Mutasi Pinjaman Bermasalah
 - 2.5. Pendapatan dan Beban
 - 2.6. Neraca
 - B. **PROGRAM BINA LINGKUNGAN**
 1. **Realisasi Rencana Kerja**
Sekurang-kurangnya memuat realisasi sasaran yang meliputi bentuk dan jumlah penerima bantuan per wilayah usaha BUMN Pembina.
 2. **Realisasi Anggaran**
 - 2.1. Sumber Dana
 - 2.2. Dana Tersedia dan Penggunaan Dana
 - 2.3. Penyaluran per bentuk bantuan per wilayah usaha BUMN Pembina
7. **BAB IV : LAIN-LAIN**
 - A. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian
 - B. Hal-hal yang perlu mendapat persetujuan Menteri/RUPS
 - C. Masalah yang dihadapi dan tindak lanjut penyelesaiannya.
8. **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



Lampiran III-2/6
Keputusan Menteri
Badan Usaha Milik Negara
Nomor : KEP-236/MBU/2003
Tanggal : 17 Juni 2003

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA

**LAPORAN AKTIVITAS PROGRAM KEMITRAAN
UNTUK TAHUN BUKU YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER X**

A. Dana yang Tersedia :			
Saldo Awal Dana, 1 Januari X		Rp.....	
Alokasi Penyisihan Laba yang Diterima		Rp.....	
Penerimaan Pengembalian Pokok Pinjaman		Rp.....	
Jumlah Dana yang Tersedia			Rp.....
B. Penggunaan Dana :			
Pinjaman			
Sektor Industri	Rp.....		
Sektor Perdagangan	Rp.....		
Sektor Pertanian	Rp.....		
Sektor Peternakan	Rp.....		
Sektor Perkebunan	Rp.....		
Sektor Perikanan	Rp.....		
Sektor Jasa	Rp.....		
Sektor Lainnya	Rp.....		
Jumlah Pinjaman		Rp.....	
Pinjaman Khusus			
Sektor Industri	Rp.....		
Sektor Perdagangan	Rp.....		
Sektor Pertanian	Rp.....		
Sektor Peternakan	Rp.....		
Sektor Perkebunan	Rp.....		
Sektor Perikanan	Rp.....		
Sektor Jasa	Rp.....		
Sektor Lainnya	Rp.....		
Jumlah Pinjaman Khusus		Rp.....	
Hibah			
Sektor Industri	Rp.....		
Sektor Perdagangan	Rp.....		
Sektor Pertanian	Rp.....		
Sektor Peternakan	Rp.....		
Sektor Perkebunan	Rp.....		
Sektor Perikanan	Rp.....		
Sektor Jasa	Rp.....		
Sektor Lainnya	Rp.....		
Jumlah Hibah		Rp.....	
Jumlah Penggunaan Dana			Rp.....
C. Sisa Dana yang Tersedia (A-B)			Rp.....
D. Pendapatan Tahun X			
Bunga Pinjaman	Rp.....		
Jasa Giro	Rp.....		
Bunga Deposito	Rp.....		
Pendapatan Lain-lain	Rp.....		
		Rp.....	
E. Beban Operasional Tahun X			
Beban Sarvai	Rp.....		
Beban Monitoring	Rp.....		
Beban Penagihan	Rp.....		
Beban Administrasi	Rp.....		
		Rp.....	
F. Surplus (Defisit) (D-E)			Rp.....
G. Saldo Akhir Dana 31 Desember X (C+E)			Rp.....



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA

**LAPORAN AKUMULASI DANA PROGRAM KEMITRAAN
UNTUK TAHUN BUKU YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER X**

I. Akumulasi Sumber Dana :

Akumulasi Alokasi Penyisihan Laba s.d Tahun X Rp.....

Akumulasi Penerimaan Pendapatan s.d Tahun X :

Bunga Pinjaman Rp.....
Bunga Deposito Rp.....
Jasa Giro Rp.....
Pendapatan Lain-lain Rp..... Rp.....

Jumlah Akumulasi Sumber Dana s.d 31 Desember X Rp.....

II. Akumulasi Penyaluran Dana :

Akumulasi Penyaluran Dana s.d Tahun X :

Pinjaman

Sektor Industri Rp.....
Sektor Perdagangan Rp.....
Sektor Pertanian Rp.....
Sektor Peternakan Rp.....
Sektor Perkebunan Rp.....
Sektor Perikanan Rp.....
Sektor Jasa Rp.....
Sektor Lainnya Rp.....
Jumlah Pinjaman Rp.....

Pinjaman Khusus

Sektor Industri Rp.....
Sektor Perdagangan Rp.....
Sektor Pertanian Rp.....
Sektor Peternakan Rp.....
Sektor Perkebunan Rp.....
Sektor Perikanan Rp.....
Sektor Jasa Rp.....
Sektor Lainnya Rp.....
Jumlah Pinjaman Khusus Rp.....

Hibah

Sektor Industri Rp.....
Sektor Perdagangan Rp.....
Sektor Pertanian Rp.....
Sektor Peternakan Rp.....
Sektor Perkebunan Rp.....
Sektor Perikanan Rp.....
Sektor Jasa Rp.....
Sektor Lainnya Rp.....
Jumlah Hibah Rp.....

Jumlah Akumulasi Penyaluran Dana s.d 31 Desember X Rp.....



Lampiran III-4/6
Keputusan Menteri
Badan Usaha Milik Negara
Nomor : KEP-236/MBU/2003
Tanggal : 17 Juni 2003

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA

PENYALURAN DANA PROGRAM KEMITRAAN PER WILAYAH
MENURUT SEKTOR USAHA
S.D 31 DESEMBER X

No	Wilayah Binaan	Sektor Industri		Sektor Perdagangan		Sektor Pertanian		Sektor Perikanan		Sektor Perkebunan		Sektor Perikanan		Sektor Jasa		Sektor Lainnya		Jumlah		
		P1	H	P1	H	P1	H	P1	H	P1	H	P1	H	P1	H	P1	H	P1	H	P1
1	Prop. NAD																			
	a. Kab. R																			
	b. Kab. S																			
	c. Kab. T																			
	Jumlah																			
2	Prop. Sumut																			
	a. Kab. X																			
	b. Kab. Y																			
	c. Kab. Z																			
Jumlah																				
3	Propinsi ...																			
	Total																			

Keterangan :
P1 = Penyaluran
P2 = Pinjaman
T = Tunggakan
H = Hibah



Lampiran III-5/6
Keputusan Menteri
Badan Usaha Milik Negara
Nomor : KEP-236/MBU/2003
Tanggal : 17 Juni 2003

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA

KUALITAS PENJAMAN PROGRAM KEMITRAAN
MENURUT SEKTOR USAHA
S.D 31 DESEMBER X

No	Kualitas Pinjanaan	Sektor Industri		Sektor Perdagangan		Sektor Pertanian		Sektor Perikanan		Sektor Perkebunan		Sektor Perikanan		Sektor Jasa		Sektor Lainnya		Jumlah		
		Unit	Rp.	Unit	Rp.	Unit	Rp.	Unit	Rp.	Unit	Rp.	Unit	Rp.	Unit	Rp.	Unit	Rp.	Unit	Rp.	
A.	Prop. NAD																			
	Lancar																			
	Kurang Lancar																			
	Diragukan																			
	Macet																			
	Jumlah																			
B.	Prop. Sumut																			
	Lancar																			
	Kurang Lancar																			
	Diragukan																			
	Macet																			
	Jumlah																			
C.	Propinsi ...																			
Z.	Jumlah Seluruhnya																			
	Lancar																			
	Kurang Lancar																			
	Diragukan																			
	Macet																			
	Total																			



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA

**NERACA PROGRAM KEMITRAAN
PER 31 DESEMBER X**

AKTIVA

Aktiva Lancar

Kas	Rp.	
Giro	Rp.	
Deposito	Rp.	
Piutang Pinjaman Mitra Binaan	Rp.	
Piutang Alokasi Laba	Rp.	
Aktiva Lancar Lainnya	Rp.	
Jumlah Aktiva Lancar		Rp.

Aktiva Tetap

Kendaraan	Rp.	
Akum. Penyusutan Kendaraan	(Rp.)	Rp.
Inventaris Kantor	Rp.	
Akum. Penyusutan Inventaris Kantor	(Rp.)	Rp.
Aktiva Tetap Lainnya	Rp.	
Akum. Penyusutan Aktiva Tetap Lainnya	(Rp.)	Rp.
Jumlah Nilai Buku Aktiva Tetap		Rp.

Aktiva Lain-lain

Piutang Bermasalah	Rp.	
Jumlah Aktiva Lain-lain		Rp.

Jumlah Aktiva

Rp.

KEWAJIBAN DAN EKUITAS

Kewajiban

Kewajiban Lancar	Rp.	
Kewajiban Tidak Lancar	Rp.	
Jumlah Kewajiban		Rp.

Ekuitas

Saldo Awal Ekuitas*	Rp.	
Alokasi Laba Tahun Berjalan	Rp.	
Surplus (Defisit)	Rp.	
Jumlah Ekuitas		Rp.

Jumlah Kewajiban dan Ekuitas

Rp.

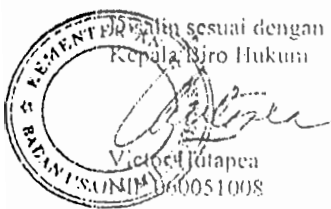
Keterangan :

* Saldo Awal Ekuitas terdiri = akumulasi alokasi laba sejak tahun pertama penyaluran + Akumulasi Surplus (Defisit) sejak tahun pertama penyaluran.

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA

Ttd

LAKSAMANA SUKARDI



LAMPIRAN 5



STANDARD OPERATING PROCEDURE

(SOP)

PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN

PTP. NUSANTARA VI (PERSERO)



JL. H. ZAINIR HAVIZ NO. 1 KOTA JAMBI
TELEPHONE : (0741) 445603 - 445609
FAX : (0741) 445500

A. Program Kemitraan Dengan Usaha Kecil (PK)

I. Penyaluran pinjaman dana :

1. Usaha Kecil yang dapat ikut serta dalam Program Kemitraan adalah sebagai berikut :
 - a). Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau,
 - b). Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah);
 - c). Milik warga negara Indonesia;
 - d). Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar
 - e). Berbentuk usaha orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.
 - f). Telah melakukan kegiatan usaha minimal satu tahun serta mempunyai potensi dan prospek untuk dikembangkan.
2. Calon mitra binaan menyampaikan permohonan pinjaman dana pembinaan dengan data pendukung sebagai berikut :
 - a). Nama dan alamat unit usaha;
 - b). Nama dan alamat pemilik/pengurus usaha dengan dikuatkan surat keterangan dari Lurah/Wali Nagari/Camat;
 - c). Bidang Usaha yang dikelola;
 - d). Bukti identitas diri pemilik/pengurus;
 - e). Izin usaha (jika ada) atau surat keterangan usaha dari pihak yang berwenang;
 - f). Rencana usaha dan penggunaan dana pinjaman;
 - g). Perkembangan kinerja usaha mencakup arus kas, perhitungan pendapatan, beban dan neraca keuangan serta hasil usaha tenaga kerja, pemasaran/penjualan;
 - h). Kebutuhan pinjaman dan kemampuan pengembalian pinjaman;
3. PTP. Nusantara VI (Persero) dilarang memberikan pinjaman kepada calon mitra binaan BUMN Pembina lain.
4. Sebelum permohonan pinjaman mitra binaan disetujui, terlebih dahulu dilaksanakan evaluasi dan seleksi awal secara langsung serta survey ke lapangan / lokasi atas permohonan / proposal calon mitra binaan mencakup :
 - a). Konfirmasi / koordinasi dengan BUMN Pembinaan Jambi / Sumatera Barat.

- b). Kelayakan proposal terhadap prospek perkembangan usaha, wawancara ditempat dengan pemilik / pengurus dan diupayakan dengan masyarakat, lingkungan / Lurah.
 - c). Alokasi dana Program Kemitraan masing-masing wilayah usaha.
5. Kepala Urusan PKBL dan Staf membuat kajian evaluasi yang ditandatangani Kepala Urusan PKBL minimal sebagai berikut :
- a). Prospek pengembangan usaha.
 - b). Nilai perkiraan pemberian bantuan pinjaman
 - c). Jangka waktu pengembalian
 - d). Kondisi jaminan yang diajukan serta informasi pendukung lainnya.

Untuk diajukan kepada Kepala Bagian Kemitraan/Umum dan usulan calon mitra binaan untuk persetujuan penanggungjawab (Direktur SDM/Umum).

6. Calon mitra binaan yang layak dibina, diharuskan menyelesaikan proses administrasi pinjaman dengan unit PKBL PTP. Nusantara VI (Persero).
7. Pemberian pinjaman kepada calon mitra binaan dituangkan dalam surat perjanjian / kontrak yang memuat pasal-pasal sesuai dengan kesepakatan meliputi besarnya bunga pinjaman maksimal 12% /tahun dengan system perhitungan bunga efektif :

No	Jumlah Pinjaman	Tingkat Bunga
a.	s/d Rp. 10.000.000	6 %
b.	> Rp. 10.000.000 s/d Rp. 30.000.000	8 %
c.	> Rp. 30.000.000 s/d Rp. 50.000.000	10 %
d.	diatas Rp. 50.000.000	12 %

Jangka waktu dan jadwal pengembalian pinjaman antara 1-3 tahun yang dilengkapi berita acara penyerahan dana pinjaman tersebut.

8. Setelah surat perjanjian ditandatangani oleh mitra binaan dan Direksi PTPN VI (Persero), maka penyerahan dana pinjaman direalisasi melalui rekening bank mitra binaan.

II. Monitoring terhadap penerimaan cicilan dan pembinaan mitra binaan.

1. Monitoring terhadap penerimaan cicilan mitra binaan :

- a). Monitoring bertujuan untuk mengetahui perkembangan usaha mitra binaan dan perkembangan pengembalian pinjaman agar apabila terdapat kendala dalam usahanya dapat dilakukan pembinaan dengan dana hibah.

- b). Monitoring ini dimulai dari pembayaran angsuran, menganalisa kualitas pinjaman dan upaya untuk penyelesaian pinjaman bermasalah.
- c). Analisa terhadap kualitas pinjaman sebagai berikut :
- Lancar, adalah pembayaran angsuran pokok dan bunga tepat waktu.
 - Kurang lancar, apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 1 (satu) hari dan belum melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama;
 - Diragukan, apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari dan belum melampaui 360 (tiga ratus enam puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama;
 - Macet, apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 360 (tiga ratus enam puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama.
- d). Terhadap kualitas pinjaman kurang lancar, diragukan dan macet harus segera diupayakan penagihan dan apabila kualitas pinjaman tidak membaik dapat dilakukan usaha-usaha pemulihan pinjaman dengan cara penjadwalan kembali (rescheduling) atau penyesuaian persyaratan (reconditioning) apabila memenuhi kriteria :
- Mitra binaan beritikad baik dan kooperatif terhadap upaya penyelesaian yang akan dilakukan.
 - Usaha mitra binaan masih berjalan dan mempunyai prospek usaha.
 - Mitra binaan masih mempunyai kemauan untuk membayar angsuran.

2. Pembinaan bagi mitra binaan

Selain melalui upaya pemulihan pinjaman, untuk pinjaman dengan kategori kurang lancar dan diragukan dapat diberikan bantuan pembinaan setelah diketahui dengan pasti kendala usahanya. Kendala usaha mitra binaan dapat diketahui setelah dilakukan peninjauan ke lapangan, wawancara dan pemeriksaan administrasi. Pembinaan tersebut dapat berupa pengarahan atau saran dan pembinaan dalam bentuk pendidikan/pelatihan dan pemasaran dari dana hibah.

III. Penerimaan dan pencatatan angsuran mitra binaan.

- a). Mitra binaan melakukan pembayaran dengan menyetorkan/ mentransfer angsuran melalui Bank ke rekening Program Kemitraan pada Bank Mandiri Cabang Lapangan Imam Bonjol Padang atas nama PUKK PTPN VI (Persero) AC. 111 - 0097003368, dan diwajibkan untuk menyerahkan copy bukti bank kepada unit PKBL.
- b). Pencatatan angsuran mitra binaan dilakukan secara komputerisasi.

IV. Penyaluran Hibah.

- a). Dana hibah bertujuan untuk memberikan bantuan kepada mitra binaan dalam bentuk bantuan pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi dan hal-hal lain yang menyangkut produktivitas mitra binaan serta untuk pengkajian/penelitian;
- b). Besarnya dana hibah maksimal 20% (dua puluh persen) dari dana Program Kemitraan yang disalurkan pada tahun berjalan.

Program Bina Lingkungan (BL)

Program Bina Lingkungan merupakan program kepedulian BUMN yang memberi manfaat kepada masyarakat dilingkungan wilayah usaha.

1. Sumber dana
 - Penyisihan laba perusahaan setelah pajak maksimal 1 %
 - Hasil bunga deposito dan atau jasa giro dana Program Bina Lingkungan.
2. Bentuk bantuan dalam program bina lingkungan
 - Korban bencana alam
 - Pendidikan dan atau pelatihan
 - Peningkatan kesehatan
 - Pengembangan prasarana dan sarana umum
 - Sarana ibadah.
3. Tata cara penyaluran dana bina lingkungan
 - Surat permohonan / proposal diterima bagian sekretariat
 - Permohonan yang diajukan harus diketahui atau ditandatangani oleh:
 - a. Lurah / Camat
 - b. Kepala Sekolah / Dekan / Rektor
 - c. Kepala Instansi / Lembaga
 - d. Ketua / Pengurus Organisasi

LAMPIRAN 6





LEMBARAN KENDALI SEKRETARIAT

Sah Rahasia Segera Rahasia

No Agenda	: 30. 3136	<input type="checkbox"/> Dipelajari
Tanggal	: 01 Oktober 2003	<input type="checkbox"/> Soran
Hubungan Agenda Nomor	: -	<input type="checkbox"/> Dilaksanakan
Surat Fax rasel dari	: Meneg. BUMN	<input type="checkbox"/> Dipedomani
Nomor	: SE-433/MBU/2003	<input type="checkbox"/> Masalah Untuk diikuti
Tanggal	: 16 September 2003	<input type="checkbox"/> B.D.S
		<input type="checkbox"/> Dijawab
		<input type="checkbox"/> Arsip

DITERUSKAN KEPADA	Tanggal		Pamal	Disposisi
	Masuk	Keluar		
05.D1 DIR. UTAMA				
06.D2 DIR. PRODUKSI				
06.D3 DIR. KEUANGAN	✓			
06.D4 DIR. SDM UMUM	✓			
06.D5 DIR. PEMASARAN				
01 Bagian Tanaman				
02 Bagian Teknik				
03 Bagian Pembayaran				
04 Bagian Komersil				
05 Bagian SDN	✓			
06 Bagian Umum	✓			
07 Bagian Sekretariat	02/10		6	
08 Bagian S P I				
09 Inspektur Wil. Jambi				
10 Bagian Teknologi				
11 Bagian Pengembangan				

*- 70
- 177 m...
- 316 p...
- 201 p...
- 177 m...*

Catatan : Disposisi Direksi agar ditindak lanjuti dalam waktu maksimum 3 hari



KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

Nomor : SE-433/MBU/2003

16 September 2003

Lampiran : 1 (satu) berkas

Isi : Petunjuk Pelaksanaan Program Kemitraan
BUMN dengan Usaha Kecil dan Program
Bina Lingkungan

1. Direksi BUMN Persero/Perum
Pelaksana Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan
Tempat

Sehubungan dengan telah diterbitkannya keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-236/MBU/2003 tanggal 17 Juni 2003 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, maka untuk keseragaman pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban program tersebut dipandang perlu untuk menerbitkan petunjuk pelaksanaannya. Untuk itu terlampir kami sampaikan petunjuk pelaksanaan dimaksud untuk dapat dilaksanakan.

Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Badan Usaha Milik Negara
Sekretaris Kementerian BUMN


Bacellus Ruru
NIP. 060043093

Keputusan Yth. ,
Menteri BUMN, sebagai laporan;
Kepala Deputi dan Asisten Deputi di lingkungan Kementerian BUMN;
Komisaris/Dewan Pengawas BUMN Persero/Perum Pelaksana PKBL;
Asisten Deputi Urusan Informasi dan Administrasi Kekayaan BUMN.



Lampiran Surat Edaran Menteri BUMN
Nomor : SE-433/MBU/2003
Tanggal : 16 September 2003

KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM KEMITRAAN BUMN DENGAN USAHA KECIL DAN PROGRAM BINA LINGKUNGAN (PKBL)

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional disamping usaha swasta dan koperasi. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, BUMN, swasta dan koperasi melaksanakan peran masing-masing mendukung berdasarkan demokrasi ekonomi.

Disamping menghasilkan barang dan/atau jasa untuk kemakmuran masyarakat, BUMN dipandang memiliki peran yang strategis dalam membantu pembinaan dan pengembangan usaha swasta dan koperasi (khususnya yang berskala kecil), oleh karena Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 telah mengamankan BUMN untuk turut serta membantu pengembangan usaha kecil. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1983, telah diterbitkan keputusan-keputusan Menteri sebagai pedoman pelaksanaan pembinaan usaha kecil oleh BUMN, yaitu Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1232/KMK.013/1989, Nomor 316/KMK.016/1994 to Nomor 60/KMK.016/19 dan Nomor 266/KMK.016/19, Keputusan Menteri Negara Pemandayagunaan BUMN/ Kepala Badan Pengelola BUMN Nomor Kep-197/M-UMN/1997 dan Nomor Kep-216/M-PBUMN/1997.

Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat yang sangat pesat, pedoman yang telah diterbitkan tersebut ternyata belum dapat memenuhi harapan masyarakat pelaku usaha kecil dan kebutuhan pengelola dalam pelaksanaan program. Atas dasar pertimbangan tersebut maka pemerintah cq. Kementerian BUMN memandang perlu menerbitkan keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-236/MBU/2003 tanggal 17 Juni 2003 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan (PKBL) yang mengatur kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan pelaksanaan bina lingkungan yang lebih komprehensif dan sesuai dengan perkembangan ekonomi dan kondisi lingkungan sosial masyarakat sekitar BUMN.

PEMBENTUKAN UNIT KHUSUS

1. Agar tujuan pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan dapat tercapai, dibentuk unit tersendiri yang khusus melaksanakan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (selanjutnya disebut Unit PKBL) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari organisasi perusahaan, secara keseluruhan.

2. Unit .../2



Lampiran Surat Edaran Menteri BUMN
Nomor : SE-433/MBU/2003
Tanggal : 16 September 2003

KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

2. Unit PKBL sekurang-kurangnya melakukan fungsi pembinaan (evaluasi, penyaluran, penagihan, pelatihan, monitoring, promosi, dan lainnya), fungsi administrasi dan keuangan.

Unit PKBL di Kantor Pusat dibentuk dengan memperhatikan jumlah dana yang dikelola, luas wilayah binaan dan jumlah mitra binaan serta mempertimbangkan kondisi perusahaan, sedangkan bentuk pelaksanaan di kantor cabang/perwakilan disesuaikan dengan kebutuhan.

Unit PKBL bertanggungjawab langsung kepada salah satu anggota Direksi yang ditetapkan dalam rapat Direksi.

Karyawan yang ditunjuk untuk menangani unit PKBL memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan karyawan lain di BUMN Pembina yang bersangkutan.

PROGRAM KEMITRAAN

Bentuk Program Kemitraan.

1. Pemberian pinjaman, dalam bentuk :

- a. Pinjaman untuk modal kerja dan atau untuk pembelian barang-barang modal (aktiva tetap produktif) seperti mesin dan alat produksi, alat bantu produksi, dan lain sebagainya yang dapat meningkatkan produksi dan penjualan produk mitra binaan.
- b. Pinjaman khusus, yaitu pemberian pinjaman yang dapat diberikan oleh BUMN Pembina yang bersifat jangka pendek dengan waktu maksimum 1 (satu) tahun serta dengan nilai pinjaman yang cukup material bagi mitra binaan.

2. Hibah, dalam bentuk :

- a. Bantuan pendidikan dan pelatihan serta pemagangan untuk mitra binaan dalam rangka :
 - Meningkatkan keterampilan manajerial dan teknik produksi/ pengolahan,
 - Meningkatkan pengendalian mutu produksi,
 - Meningkatkan pemenuhan standarisasi teknologi,
 - Meningkatkan rancang bangun dan perekayasaan.

b. Bantuan .../3



Lampiran Surat Edaran Menteri BUMN
Nomor : SE-433/MBU/2003
Tanggal : 16 September 2003

KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

3. Rencana penggunaan dana operasional dijabarkan secara terinci dalam RKA-PKBL.
4. Usulan penghapusbukuan aktiva tetap diusulkan dalam RKA-PKBL.

C. Penanganan Pinjaman Bermasalah.

1. Pelaksanaan pemindahan pencatatan pinjaman macet yang telah melalui proses pemulihan kedalam pos pinjaman bermasalah dilakukan 1 (satu) tahun setelah pinjaman dikategorikan macet.
2. Pinjaman bermasalah yang akan dihapusbukuan terlebih dahulu diusulkan kepada Menteri/RUPS melalui mekanisme Rencana Kerja dan Anggaran PKBL (RKA-PKBL).

D. Prioritas Program Kemitraan.

1. Program Kemitraan ditujukan terutama bagi usaha kecil yang belum memiliki kemampuan akses perbankan.
2. Program kemitraan dapat dilakukan kepada usaha kecil yang tidak memiliki kaitan usaha maupun yang memiliki kaitan usaha dengan BUMN Pembina, namun diupayakan kearah terwujudnya keterkaitan usaha.

E. Tingkat bunga pinjaman.

1. Tingkat bunga yang dikenakan kepada mitra binaan bersifat regresif proporsional, yaitu semakin besar jumlah pinjaman semakin besar pula tingkat bunga yang dikenakan dengan batasan sebagai berikut :

No.	Jumlah pinjaman yang diberikan	Tingkat bunga
a.	s/d Rp 10.000.000	6%
b.	> Rp 10.000.000 s/d Rp 30.000.000	8%
c.	> Rp 30.000.000 s/d Rp 50.000.000	10%
d.	Diatas Rp. 50.000.000	12%

2. Penetapan bunga pinjaman dihitung dengan sistem bunga efektif, atau dapat juga dihitung dengan sistem flat atau sistem bagi hasil sepanjang nilainya setara dengan bunga efektif.

3. Tingkat .../5



Lampiran Surat Edaran Menteri BUMN
Nomor : SE-433/MBU/2003
Tanggal : 16 September 2003

KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

3. Tingkat bunga yang diperhitungkan sebelum ketetapan (keputusan) ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa pinjaman.
4. Apabila masa pinjaman telah berakhir namun mitra binaan belum melunasi pinjamannya, maka tingkat bunga atas sisa pinjaman tersebut disesuaikan dengan ketentuan ini.

Pelaksanaan Program Kemitraan oleh Persero Terbuka.

1. Pembinaan dan pengembangan usaha kecil merupakan tanggungjawab bersama Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, oleh karena itu bagi Persero Terbuka dianjurkan melaksanakan Program Kemitraan.
2. Pelaksanaan Program Kemitraan bagi Persero Terbuka berpedoman pada RKA-PKBL yang telah disetujui oleh Komisaris sedangkan sumber pendanaannya berasal dari laba bersih setelah pajak yang besarnya ditetapkan RUPS.

PROGRAM BINA LINGKUNGAN

Kegiatan Bina Lingkungan meliputi :

- a. Bantuan kepada korban bencana alam, yaitu bantuan yang diberikan untuk meringankan beban para korban yang diakibatkan bencana alam (force major);
- b. Bantuan pendidikan dan atau pelatihan, yaitu bantuan yang diberikan dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM);
- c. Bantuan peningkatan kesehatan, yaitu bantuan yang diberikan dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat;
- d. Bantuan pengembangan prasarana dan sarana umum, yaitu bantuan yang diberikan dalam rangka meningkatkan fasilitas kesejahteraan masyarakat;
- e. Bantuan sarana ibadah, yaitu bantuan untuk meningkatkan kualitas sarana ibadah masyarakat.

2. Objek .../6



Lampiran Surat Edaran Menteri BUMN
Nomor : SE-433/MBU/2003
Tanggal : 16 September 2003

KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

2. Objek bantuan Bina Lingkungan :

- a. Bantuan kepada korban bencana alam :
 - Penyediaan bahan-bahan kebutuhan pokok, air bersih dan MCK pengungsi,
 - Bantuan obat-obatan dan atau tenaga medis,
 - Bantuan perahu karet, tenda pengungsi/tempat penampungan sementara,
 - Penyediaan dana untuk sewa angkutan/transportasi pengungsi, sewa alat-alat berat.
- b. Bantuan pendidikan dan atau pelatihan :
 - Pengadaan peralatan sekolah, baik untuk sekolah umum maupun pesantren dan madrasah,
 - Bantuan biaya pendidikan/beasiswa,
 - Pelatihan dan atau pemagangan bagi anak putus sekolah,
 - Penyuluhan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat,
- c. Bantuan peningkatan kesehatan :
 - Renovasi balai pengobatan masyarakat,
 - Bantuan untuk kegiatan yang bersifat kesehatan masyarakat,
- d. Bantuan pengembangan prasarana dan sarana umum :
 - Rehabilitasi prasarana pendidikan,
 - Pembangunan dan rehabilitasi prasarana dan sarana umum,
 - Pembangunan dan atau rehabilitasi panti asuhan dan panti jompo.
- e. Bantuan sarana ibadah :
 - Bantuan pembangunan / rehabilitasi rumah ibadah,
 - Pengadaan perlengkapan ibadah,
 - Bantuan dana untuk menunjang pelaksanaan kegiatan-kegiatan keagamaan,

3. Pelaksanaan Program Bina Lingkungan diadministrasikan bersamaan dengan administrasi dana kemitraan oleh Unit PKBL. Pembukaan dan rekening Program Kemitraan dan Program Bina lingkungan dilakukan secara terpisah.

4. Untuk menunjang pelaksanaan Program Bina Lingkungan, disediakan dana untuk operasional Program Bina Lingkungan sebesar maksimal 3% (tiga persen) dari jumlah dana Bina Lingkungan yang disalurkan pada tahun yang bersangkutan. Dana operasional Program Bina Lingkungan digunakan untuk :

- Beban .../7



Lampiran Surat Edaran Menteri BUMN
Nomor : SE-433 /MBU/2003
Tanggal : 16 September 2003

KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

- Beban perjalanan dinas petugas dalam rangka survai/meneliti, monitoring/ evaluasi dan penyerahan bantuan Bina Lingkungan,
 - Beban-beban yang terkait dengan pengiriman barang bantuan Bina Lingkungan,
 - Beban administrasi, antara lain beban administrasi bank, beban surat menyurat dan sejenisnya.
5. Bentuk laporan arus dana Program Bina Lingkungan mengacu pada halaman 8 lampiran Surat Edaran ini.

AUDIT PELAKSANAAN PKBL

Pelaksanaan audit PKBL merupakan satu kesatuan dengan audit BUMN Pembina.

KOORDINASI

1. Untuk meningkatkan pelaksanaan Program Kemitraan disuatu provinsi, Menteri BUMN menunjuk salah satu BUMN Pembina yang menyalurkan dana kemitraan di provinsi tersebut sebagai koordinator BUMN Pembina.
2. Koordinasi yang dimaksudkan dalam pasal 11 ayat (1) butir b keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-236/MBU/2003 tanggal 17 Juni 2003 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, minimal dalam bentuk menyampaikan daftar calon mitra binaan yang akan diberikan dana pinjaman kepada BUMN Koordinator untuk menghindari duplikasi pinjaman.

LAIN-LAIN

Khusus untuk penyusunan laporan berkala (triwulan, Semester dan tahunan) Program Kemitraan, bentuk dan isi laporan harus telah mengacu sepenuhnya pada keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-236/MBU/2003 tanggal 17 Juni 2003 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, paling lambat pada tahun anggaran 2004.

Jakarta, September 2003

Mengetahui Menteri Badan Usaha Milik Negara
Sekretaris Kementerian BUMN


Basoeki Ruru
NIP. 060043993



Lampiran Surat Edaran Menteri BUMN

Nomor : SE-433 /MBU/2003

Tanggal : 16 September 2003

KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

ARUS DANA PROGRAM BINA LINGKUNGAN
PT / PERUM...Tahun X

No.	Uraian	Nilai Rp.000
A.	Dana Tersedia : 1. Saldo awal 1 Januari Tahun X 2. Penerimaan alokasi laba - eks laba sebelum tahun X-1 - eks laba tahun X-1 3. Penerimaan jasa giro/bunga deposito 4. Lain-lain Jumlah dana tersedia	
B.	Penggunaan Dana : 1. Program Bina Lingkungan a. Bantuan korban bencana alam b. Bantuan pendidikan dan atau pelatihan - Pendidikan - Pelatihan c. Bantuan peningkatan kesehatan d. Pengembangan prasarana dan sarana umum e. Bantuan sarana ibadah Jumlah bantuan Bina Lingkungan 2. Beban Operasional a. Beban survai/penelitian, monitoring/evaluasi dan penyerahan bantuan b. Beban-beban pengiriman barang c. Beban administrasi Jumlah beban operasional Jumlah Penggunaan Dana (1+2)	
C.	Saldo akhir Dana 31 Desember Tahun X (A-B)	

Penjelasan :

- Saldo awal 1 Januari Tahun X, yaitu sisa dana Program Bina Lingkungan tahun sebelumnya (Tahun X-1) yang belum dan/atau tidak tersalurkan, termasuk sisa dana yang dialokasikan untuk biaya operasional.
- Alokasi laba eks laba sebelum Tahun X-1, yaitu alokasi laba untuk Program Bina Lingkungan tahun-tahun sebelum Tahun X-1 yang baru diterima unit PKBL pada Tahun X.
- Alokasi laba eks laba Tahun X-1, yaitu realisasi besarnya alokasi laba Tahun X-1 untuk Program Bina Lingkungan yang diterima pada tahun X.
- Penerimaan jasa giro / bunga deposito, yaitu realisasi penerimaan jasa giro dan/atau bunga deposito pada tahun tersebut yang berasal dari penempatan sementara dana Program Bina Lingkungan.

LAMPIRAN 7





MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA

Nomor : S-273 /MBU/2005

Jakarta, 19 Juli 2005

Lampiran : 1 berkas

Tema : Penetapan Alokasi Dana Program Kemitraan,
BUMN Pembina dan Koordinator BUMN Pembina
di setiap Propinsi tahun 2005

1. Direksi BUMN (PT/Perum)

2. Kepala Pembina Usaha Kecil Program Kemitraan

Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan perihal tersebut diatas, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

Pelaksanaan penyaluran dana Program Kemitraan tahun 2005 mengacu kepada Keputusan Menteri BUMN Nomor : Kep-236/MBU/2003. Dalam rangka penyaluran dana Program Kemitraan tersebut terlampir ditetapkan alokasi dana Program Kemitraan untuk masing-masing BUMN Pembina dengan wilayah binaan dan Koordinator BUMN Pembina untuk setiap Propinsi.

Bagi BUMN yang belum tercantum dalam surat penetapan alokasi dana Program Kemitraan tahun 2005, diminta untuk tetap menyalurkan dana Program Kemitraan tersebut sesuai dengan jumlah dana yang tersedia dan wilayah binaan yang sama seperti tahun sebelumnya.

Penetapan alokasi dana Program Kemitraan tahun 2005 didasarkan pada usulan masing-masing BUMN Pembina yang disampaikan melalui RKA PKBL tahun 2005 dengan telah mempertimbangkan tingkat pengembalian pinjaman, daerah operasional BUMN Pembina, penyebaran usaha kecil di setiap propinsi serta daya serap tahun-tahun sebelumnya.

Alokasi dana yang telah ditetapkan bukan merupakan batas maksimal penyaluran, apabila realisasi penerimaan lebih besar atau lebih kecil dari yang telah ditetapkan dalam surat ini, maka penambahan atau pengurangannya dialokasikan secara proporsional pada wilayah binaan yang sama tanpa harus mengajukan permohonan revisi alokasi dana kepada Menteri BUMN. Sedangkan apabila dilakukan perubahan wilayah binaan perlu mendapatkan persetujuan Menteri BUMN.

Sumber pendanaan Program Kemitraan yang ditetapkan alokasinya, berasal dari saldo kas awal tahun, perkiraan penyisihan laba, perkiraan pengembalian pinjaman dan dari hasil pengembangan. Dengan demikian dana yang ditetapkan alokasinya ini tidak dalam bentuk dana yang telah tersedia (*cash*), tapi masih bersifat anggaran perkiraan yang pemenuhannya bergantung kepada penerimaan pada tahun berjalan yang berasal dari angsuran pinjaman mitra binaan daerah setempat (dana bergulir), dana hasil pengembangan dan perkiraan penerimaan dari laba BUMN.

Jumlah penetapan alokasi dana ini berlaku untuk tahun 2005, apabila tidak dapat terserap pada tahun bersangkutan maka akan dievaluasi ulang untuk anggaran tahun berikutnya.

Dalam pelaksanaan penyaluran dana Program Kemitraan tahun 2005 agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Penyaluran dana Program Kemitraan diberikan kepada usaha kecil (perorangan atau badan usaha, termasuk koperasi) yang memenuhi persyaratan, baik yang mempunyai keterkaitan langsung atau tidak langsung dengan bidang usaha BUMN, belum bankable dan tidak dalam status sebagai mitra binaan BUMN Pembina lainnya.
- b. Proses seleksi terhadap calon mitra binaan agar diputuskan lebih cepat dengan memberikan kewenangan kepada kantor cabang BUMN di daerah.
- c. Koordinator BUMN Pembina agar melaksanakan fungsinya sesuai dengan tugas dan kewajibannya sebagaimana yang ditentukan dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor : Kep-236/MBU/2003.

Pelaksanaan atas penyaluran dana Program Kemitraan tahun 2005 dilaporkan secara periodik dalam laporan triwulanan dan tahunan 2005 yang terpisah dari laporan kegiatan usaha BUMN kepada Menteri BUMN. Sedangkan untuk rencana penyaluran tahun 2006 disampaikan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan tahun 2006 selambat-lambatnya 60 hari sebelum memasuki tahun anggaran baru.

Demikian kami sampaikan untuk dapat dilaksanakan sebaik-baiknya dan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Menteri BUMN



Sugiharto

Yth.

Menteri Keuangan;

Menteri Koperasi dan UKM;

Para Gubernur Propinsi seluruh Indonesia;

Komisaris/Dewan Pengawas BUMN Pembina.

02/03/2005

Lampiran Surat Menteri BUMN
 Nomor : S-273 /MBU/2005
 Tanggal : 19 Juli 2005

**ALOKASI DANA PROGRAM KEMITRAAN, BUMN PEMBINA
 DAN KOORDINATOR BUMN PEMBINA
 DI SETIAP PROPINSI TAHUN 2005**

(dalam Rp juta)

Daerah Pembinaan/ Koordinator BUMN Pembina	BUMN Pembina	Dana Pembinaan	Prosentase	
			BUMN	Propins
GGROE ACEH DARUSSALAM Perkebunan Nusantara I)	1 PT Bank Rakyat Indonesia Tbk	65.000	74,67	
	2 PT Bank Negara Indonesia Tbk	6.000	6,89	
	3 PT Pertamina	5.602	6,44	
	4 PT Telkom Tbk	2.065	2,37	
	5 PT Bank Mandiri Tbk	2.000	2,30	
	6 PT Pupuk Iskandar Muda	1.230	1,41	
	7 PT Pelabuhan Indonesia I	730	0,84	
	8 PT Jamsostek	700	0,80	
	9 PT Bank Tabungan Negara	625	0,72	
	10 PT Jasa Raharja	600	0,69	
	11 PT Perkebunan Nusantara I	675	0,78	
	12 PT Angkasa Pura II	500	0,57	
	13 PT Pos Indonesia	500	0,57	
	14 PT Perusahaan Listrik Negara	350	0,40	
	15 PT Taspen	200	0,23	
	16 PT Asuransi Kesehatan Indonesia	200	0,23	
	17 Perum Pegadalan	75	0,09	
	Jumlah	87.052	100,00	8,18
ATERA UTARA Perkebunan Nusantara IV)	1 PT Pertamina	17.704	27,95	
	2 PT Telkom Tbk	8.259	13,04	
	3 PT Perkebunan Nusantara II	5.610	8,86	
	4 PT Bank Negara Indonesia Tbk	4.506	7,10	
	5 PT Pelabuhan Indonesia I	4.390	6,93	
	6 PT Perkebunan Nusantara III	4.200	6,33	
	7 PT Perkebunan Nusantara IV	3.680	5,81	
	8 PT Bank Rakyat Indonesia Tbk	2.070	3,27	
	9 PT Pos Indonesia	2.000	3,16	
	10 PT Bank Mandiri Tbk	2.000	3,16	
	11 PT Jamsostek	1.350	2,13	
	12 PT Jasa Raharja	1.000	1,58	
	13 PT Jasa Marga	945	1,49	
	14 PT Angkasa Pura II	900	1,42	
	15 PT Sucofindo	720	1,14	
	16 PT Bank Ekspor Indonesia	550	0,87	
	17 PT Asuransi Ekspor Indonesia	500	0,79	
	18 PT Perusahaan Gas Negara Tbk	474	0,75	
	19 PT Asuransi Kesehatan Indonesia	400	0,63	
	20 PT Bank Tabungan Negara	375	0,59	
	21 PT Asuransi Kredit Indonesia	360	0,57	
	22 PT Perusahaan Listrik Negara	350	0,55	
	23 PT Taspen	250	0,39	
	24 Perum Pegadalan	250	0,39	
	25 PT Surveyor Indonesia	150	0,24	
	26 PT Permodalan Nasional Madani	100	0,16	
	27 PT Pelni	75	0,12	
	28 PT Inhutani IV	60	0,09	
	29 PT Kawasan Industri Medan	57	0,09	
	30 Perum Perumnas	50	0,08	
	31 PT Sang Hyang Seri	15	0,02	
	Jumlah	63.344	100,00	5,95

Daerah Pembinaan/ ordinator BUMN Pembina	BUMN Pembina		Dana Pembinaan	Prosentase	
				BUMN	Propinsi
DAERAH BAPAT (Sumatera Barat)	1	PT Telkom Tbk	4.405	18,25	
	2	PT Pertamina	3.554	14,73	
	3	PT Bank Rakyat Indonesia Tbk	2.760	11,44	
	4	PT Bank Negara Indonesia Tbk	2.140	8,87	
	5	PT Semen Padang	2.000	8,29	
	6	PT Pos Indonesia	2.000	8,29	
	7	PT Jamsostek	1.150	4,77	
	8	PT Jasa Raharja	900	3,73	
	9	PT Angkasa Pura II	850	3,52	
	10	PT Pelabuhan Indonesia II	840	3,48	
	11	PT Sucofindo	705	2,92	
	12	PT Tambang Bukit Asam Tbk	500	2,07	
	13	PT Pupuk Sriwijaya	480	1,99	
	14	PT Perusahaan Listrik Negara	300	1,24	
	15	PT Taspen	300	1,24	
	16	PT Asuransi Kredit Indonesia	270	1,12	
	17	PT Asuransi Kesehatan Indonesia	200	0,83	
	18	PT Asuransi Jiwasraya	150	0,62	
	19	PT Perkebunan Nusantara VI	125	0,52	
	20	PT Asuransi Jasa Indonesia	100	0,41	
	21	PT Bank Mandiri Tbk	100	0,41	
	22	PT Permodalan Nasional Madani	100	0,41	
	23	Perum Pegadalan	100	0,41	
	24	PT Inhutani IV	60	0,25	
	25	Perum Perumnas	28	0,12	
	26	PT Sang Hyang Seri	15	0,06	
		Jumlah	24.132	100,00	2,27
DAERAH BAPAT (Pelabuhan Indonesia I)	1	PT Pertamina	10.171	29,18	
	2	PT Pelabuhan Indonesia I	4.415	12,66	
	3	PT Perkebunan Nusantara V	3.600	10,33	
	4	PT Bank Rakyat Indonesia Tbk	2.760	7,92	
	5	PT Telkom Tbk	2.753	7,90	
	6	PT Pos Indonesia	1.900	5,45	
	7	PT Bank Mandiri Tbk	1.500	4,30	
	8	PT Bank Negara Indonesia Tbk	1.485	4,26	
	9	PT Angkasa Pura II	1.250	3,59	
	10	PT Jamsostek	1.000	2,87	
	11	PT Jasa Raharja	900	2,58	
	12	PT Sucofindo	616	1,77	
	13	PT PDI Pulau Batam	375	1,08	
	14	PT Perusahaan Gas Negara Tbk	340	0,98	
	15	PT Surveyor Indonesia	300	0,86	
	16	PT Asuransi Kesehatan Indonesia	300	0,86	
	17	PT Asuransi Kredit Indonesia	270	0,77	
	18	PT Perusahaan Listrik Negara	150	0,43	
	19	PT Permodalan Nasional Madani	150	0,43	
	20	Perum Sarana Pengembangan Usaha	140	0,40	
	21	PT Pelni	100	0,29	
	22	PT Taspen	100	0,29	
	23	PT Waskita Karya	75	0,22	
	24	PT Hutama Karya	70	0,20	
	25	PT Inhutani IV	70	0,20	
	26	Perum Pegadalan	50	0,14	
	27	Perum Perumnas	20	0,06	
		Jumlah	34.860	100,00	3,28
DAERAH BAPAT (Pupuk Sriwijaya)	1	PT Pertamina	6.711	40,73	
	2	PT Pos Indonesia	2.300	13,96	
	3	PT Telkom Tbk	1.652	10,03	
	4	PT Bank Rakyat Indonesia Tbk	1.390	8,44	
	5	PT Jamsostek	700	4,25	
	6	PT Pelabuhan Indonesia II	550	3,34	
	7	PT Jasa Raharja	500	3,03	
	8	PT Perkebunan Nusantara VI	482	2,93	
	9	PT Pupuk Sriwijaya	463	2,81	
	10	PT Perusahaan Gas Negara Tbk	460	2,79	

(dalam Rp juta)

Daerah Pembinaan/ Koordinator BUMN Pembina	BUMN Pembina	Dana Pembinaan	Presentase	
			BUMN	Propinsi
	11 PT Asuransi Kredit Indonesia	270	1,64	
	12 PT Asuransi Jasa Indonesia	200	1,21	
	13 PT Perusahaan Listrik Negara	150	0,91	
	14 PT Asuransi Jiwasraya	150	0,91	
	15 PT Semen Baturaja	140	0,85	
	16 PT Bank Mandiri Tbk	100	0,61	
	17 PT Taspen	100	0,61	
	18 PT Asuransi Kesehatan Indonesia	100	0,61	
	19 Perum Pegadalan	25	0,15	
	20 Perum Perumnas	20	0,12	
	21 PT Indah Karya	15	0,09	
	Jumlah	16.478	100,00	1,55
NTERA SELATAN (Semen Baturaja)	1 PT Pertamina	14.491	29,08	
	2 PT Pupuk Sriwijaya	7.166	14,38	
	3 PT Tambang Bukit Asam Tbk	6.700	13,45	
	4 PT Telkom Tbk	6.807	13,28	
	5 PT Bank Rakyat Indonesia Tbk	2.760	5,54	
	6 PT Pos Indonesia	1.800	3,61	
	7 PT Bank Mandiri Tbk	1.500	3,01	
	8 PT Jamsostek	1.300	2,61	
	9 PT Bank Negara Indonesia Tbk	1.000	2,01	
	10 PT Angkasa Pura II	900	1,81	
	11 PT Perusahaan Gas Negara Tbk	840	1,69	
	12 PT Pelabuhan Indonesia II	765	1,54	
	13 PT Jasa Raharja	600	1,20	
	14 PT Perkebunan Nusantara VII	590	1,18	
	15 PT Asuransi Kesehatan Indonesia	500	1,00	
	16 PT Sucofindo	490	0,98	
	17 PT Perusahaan Listrik Negara	450	0,90	
	18 PT Semen Baturaja	385	0,77	
	19 PT Asuransi Kredit Indonesia	270	0,54	
	20 PT Surveyor Indonesia	150	0,30	
	21 PT Taspen	150	0,30	
	22 Perum Pegadalan	100	0,20	
	23 PT Kereta Api	100	0,20	
	24 PT Adhi Karya	80	0,16	
	25 PT Waskita Karya	75	0,15	
	26 Perum Sarana Pengembangan Usaha	42	0,08	
	27 Perum Perumnas	20	0,04	
	Jumlah	49.831	100,00	4,60
KA BELITUNG (Timah Tbk)	1 PT Timah Tbk	7.000	48,65	
	2 PT Pertamina	2.232	15,51	
	3 PT Bank Rakyat Indonesia Tbk	2.070	14,39	
	4 PT Telkom Tbk	1.101	7,65	
	5 PT Jamsostek	700	4,37	
	6 PT Pelabuhan Indonesia II	325	2,26	
	7 PT Jasa Raharja	300	2,03	
	8 PT Pupuk Sriwijaya	200	1,39	
	9 PT Pos Indonesia	200	1,39	
	10 PT Perusahaan Listrik Negara	100	0,70	
	11 PT Bank Mandiri Tbk	100	0,70	
	12 PT Semen Baturaja	60	0,42	
	Jumlah	14.388	100,00	1,35
KULU (Perkebunan Nusantara VII)	1 PT Pertamina	4.465	36,25	
	2 PT Pos Indonesia	2.000	16,24	
	3 PT Bank Rakyat Indonesia Tbk	1.390	11,29	
	4 PT Telkom Tbk	1.239	10,06	
	5 PT Jamsostek	750	6,09	
	6 PT Jasa Raharja	500	4,06	
	7 PT Perkebunan Nusantara VII	491	3,99	
	8 PT Pelabuhan Indonesia II	370	3,00	
	9 PT Pupuk Sriwijaya	352	2,86	
	10 PT Asuransi Kesehatan Indonesia	200	1,62	
	11 PT Perusahaan Listrik Negara	150	1,22	

(dalam Rp juta)

Daerah Pembinaan/ Koordinator BUMN Pembina	BUMN Pembina	Dana Pembinaan	Prosentase	
			BUMN	Propinsi
	12 PT Asuransi Jiwasraya	150	1,22	
	13 PT Bank Mandiri Tbk	100	0,82	
	14 PT Taspen	100	0,82	
	15 Perum PNPI	50	0,41	
	16 Perum Perumnas	10	0,08	
	Jumlah	12.265	100,00	7,16
M P U N G (Tambang Bukit Asam Tbk)	1 PT Pertamina	7.823	32,31	
	2 PT Pos Indonesia	2.800	11,56	
	3 PT Bank Rakyat Indonesia Tbk	2.760	11,40	
	4 PT Bank Negara Indonesia Tbk	1.450	5,99	
	5 PT Tambang Bukit Asam Tbk	1.300	5,37	
	6 PT Telkom Tbk	1.239	5,12	
	7 PT Pelabuhan Indonesia II	1.100	4,54	
	8 PT Perkebunan Nusantara VII	884	3,65	
	9 PT Sucofindo	832	3,44	
	10 PT Jasa Raharja	800	3,30	
	11 PT Jamsostek	700	2,89	
	12 PT Perusahaan Gas Negara Tbk	563	2,33	
	13 PT Semen Baturaja	421	1,74	
	14 PT Asuransi Kredit Indonesia	270	1,12	
	15 PT Perusahaan Listrik Negara	200	0,83	
	16 PT Asuransi Jasa Indonesia	200	0,83	
	17 PT Bank Tabungan Negara	200	0,83	
	18 PT Asuransi Kesehatan Indonesia	200	0,83	
	19 PT Bank Mandiri Tbk	100	0,41	
	20 PT Taspen	100	0,41	
	21 PT Hutama Karya	70	0,29	
	22 PT Kereta Api	70	0,29	
	23 PT Waskita Karya	50	0,21	
	24 Perum Pegadalan	50	0,21	
	25 PT Sang Hyang Seri	30	0,12	
Jumlah	24.214	100,00	2,30	
M T E N (Kratatau Steel)	1 PT Krakatau Steel	8.330	28,1	
	2 PT Pertamina	6.605	22,29	
	3 PT Telkom Tbk	2.812	9,49	
	4 PT Bank Rakyat Indonesia Tbk	2.070	6,99	
	5 PT Angkasa Pura II	1.999	6,75	
	6 PT Bank Negara Indonesia Tbk	1.000	3,37	
	7 PT Jasa Marga	945	3,19	
	8 PT Perusahaan Gas Negara Tbk	744	2,51	
	9 PT Jamsostek	700	2,36	
	10 PT Sucofindo	502	1,69	
	11 PT Asuransi Ekspor Indonesia	500	1,69	
	12 PT Bank Tabungan Negara	488	1,65	
	13 PT Jasa Raharja	450	1,52	
	14 PT Pelabuhan Indonesia II	320	1,08	
	15 PT Asuransi Kredit Indonesia	270	0,91	
	16 PT Asuransi Kesehatan Indonesia	250	0,84	
	17 Perum Pegadalan	225	0,76	
	18 PT Pos Indonesia	200	0,67	
	19 PT Perkebunan Nusantara VIII	170	0,57	
	20 PT Waskita Karya	150	0,51	
	21 PT Batan Teknologi	145	0,49	
	22 PT Pembangunan Perumahan	125	0,42	
	23 PT Peini	125	0,42	
	24 Perum PNRI	125	0,42	
	25 PT Perusahaan Listrik Negara	100	0,34	
	26 PT Bank Mandiri Tbk	100	0,34	
	27 PT Taspen	80	0,27	
	28 PT Adhi Karya	50	0,17	
	29 PT ASDP	39	0,13	
	30 Perum Perumnas	10	0,03	
	31 PT Yodya Karya	5	0,02	
Jumlah	29.634	100,00	2,81	

(dalam Rp juta)

Daerah Pembinaan/ Peminat BUMN Pembina	BUMN Pembina	Dana Pembinaan	Prosentase	
			BUMN	Propinsi
RTA (larga)	1 PT Telkom Tbk	11.727	15,88	
	2 PT Pertamina	11.473	15,54	
	3 PT Jasa Raharja	4.500	6,09	
	4 PT Rekayasa Industri	4.000	5,42	
	5 PT Kawason Berikat Nusantara	3.830	4,92	
	6 PT Pelabuhan Indonesia II	3.210	4,35	
	7 PT Bank Negara Indonesia Tbk	2.600	3,52	
	8 PT Bank Mandiri Tbk	2.500	3,39	
	9 PT Jasa Marga	2.361	3,20	
	10 PT Jamsostek	1.850	2,51	
	11 PT Sucofindo	1.635	2,21	
	12 PT Pos Indonesia	1.400	1,90	
	13 PT Asuransi Ekspor Indonesia	1.400	1,90	
	14 PT Asuransi Jasa Indonesia	1.400	1,90	
	15 PT Bank Rakyat Indonesia Tbk	1.390	1,88	
	16 PT Bhandha Ghara Reksa	1.280	1,73	
	17 PT Angkasa Pura I	1.207	1,63	
	18 PT Rajawali Nusantara Indonesia	1.200	1,63	
	19 PT Perusahaan Gas Negara Tbk	1.156	1,57	
	20 PT Angkasa Pura II	1.000	1,35	
	21 PT Asabri	1.000	1,35	
	22 Perum Sarana Pengembangan Usaha	685	0,93	
	23 PT PANN Multi Finance	611	0,83	
	24 PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung	600	0,81	
	25 PT Asuransi Kredit Indonesia	600	0,81	
	26 PT Bank Ekspor Indonesia	550	0,74	
	27 PT Wijaya Karya	540	0,73	
	28 Perum Perhutani	500	0,68	
	29 Perum Pegadalan	500	0,68	
	30 PT Berdikari	470	0,64	
	31 PT Surveyor Indonesia	422	0,57	
	32 PT Nindya Karya	415	0,56	
	33 PT Perusahaan Listrik Negara	400	0,54	
	34 PT Asuransi Kesehatan Indonesia	400	0,54	
	35 PT Pupuk Sriwijaya	390	0,53	
	36 Perum PNRI	380	0,51	
	37 PT Hutama Karya	350	0,47	
	38 PT Reasuransi Umum Indonesia	350	0,47	
	39 PT Pelayaran Bahtera Adhiguna	335	0,45	
	40 PT Pembangunan Perumahan	300	0,41	
	41 PT Asuransi Jiwasraya	300	0,41	
	42 PT Adhi Karya	292	0,40	
	43 PT Tambang Bukit Asam Tbk	250	0,34	
	44 PT Waskita Karya	250	0,34	
	45 PT Taspen	250	0,34	
	46 Perum Peruri	235	0,32	
	47 PT Pelni	200	0,27	
	48 PT Biro Klasifikasi Indonesia	200	0,27	
	49 PT Inhutani I	160	0,22	
	50 PT Virama Karya	150	0,20	
	51 PT Inhutani II	125	0,17	
	52 Perum Perumnas	105	0,14	
	53 PT Hotel Indonesia Natour	100	0,14	
	54 PT Permodalan Nasional Madani	100	0,14	
	55 PT Istaka Karya	95	0,13	
	56 PT Kliring Berjangka Indonesia	72	0,10	
	57 PT Pengerukan Indonesia	50	0,07	
	58 PT Perusahaan Perdagangan Indonesia	45	0,06	
	59 PT Indah Karya	42	0,06	
	60 PT Inhutani III	40	0,05	
	61 PT Yodya Karya	30	0,04	
	62 PT Brantas Abipraya	20	0,03	
	63 PT Bina Karya	15	0,02	
	Jumlah	73.843	100,00	6,93

Daerah Pembinaan/ Koordinator BUMN Pembina	BUMN Pembina	Danz Pembinaan	Prosentase	
			BUMN	Propinsi
DAERAH BARAT (Telkom Tbk)	1 PT Pertamina	37.602	31,64	
	2 PT Telkom Tbk	25.773	21,69	
	3 PT Pupuk Kujang	5.395	4,54	
	4 PT Bank Negara Indonesia Tbk	5.350	4,50	
	5 PT Bio Farma	3.980	3,35	
	6 PT Jasa Marga	3.308	2,78	
	7 PT Pos Indonesia	2.400	2,02	
	8 PT Bank Rakyat Indonesia Tbk	2.070	1,74	
	9 PT Bank Mandiri Tbk	2.000	1,68	
	10 PT Rajawali Nusantara Indonesia	2.000	1,68	
	11 PT Dahana	1.975	1,66	
	12 PT Perkebunan Nusantara VIII	1.794	1,51	
	13 PT Sucofindo	1.787	1,50	
	14 Perum Perhutani	1.500	1,26	
	15 PT Perusahaan Listrik Negara	1.400	1,18	
	16 PT INTI	1.350	1,14	
	17 PT Jamsostek	1.350	1,14	
	18 PT Pelabuhan Indonesia II	1.160	0,98	
	19 PT Bank Ekspor Indonesia	1.100	0,93	
	20 PT Perusahaan Gas Negara Tbk	1.068	0,90	
	21 Perum Jasa Tirta II	1.020	0,86	
	22 PT PINDAD	1.000	0,84	
	23 PT Angkasa Pura II	1.000	0,84	
	24 PT Asuransi Ekspor Indonesia	1.000	0,84	
	25 PT Jasa Raharja	1.000	0,84	
	26 PT Krakatau Steel	870	0,73	
	27 PT Pupuk Sriwijaya	795	0,67	
	28 PT Indah Karya	707	0,59	
	29 PT Wijaya Karya	640	0,54	
	30 PT Taspen	600	0,50	
	31 PT Asuransi Kesehatan Indonesia	500	0,42	
	32 Perum Peruri	425	0,36	
	33 PT Adhi Karya	420	0,35	
	34 PT Asuransi Kredit Indonesia	360	0,30	
	35 PT Tambang Bukit Asam Tbk	350	0,29	
	36 PT Berdikari	340	0,29	
	37 Perum Pegadalan	325	0,27	
	38 PT Sarinah	260	0,22	
	39 PT Bank Tabungan Negara	250	0,21	
	40 PT Surveyor Indonesia	250	0,21	
	41 Perum Sarana Pengembangan Usaha	230	0,19	
	42 PT Kereta Api	225	0,19	
	43 PT LEN Industri	207	0,17	
	44 PT Kertas padalarang	205	0,17	
	45 Perum Perumnas	202	0,17	
	46 PT Pembangunan Perumahan	200	0,17	
	47 PT Waskita Karya	200	0,17	
	48 PT Peini	200	0,17	
	49 PT Permodalan Nasional Madani	150	0,13	
	50 Perum PNRI	125	0,11	
	51 PT ASDP	92	0,08	
	52 PT Inhutani I	90	0,08	
	53 PT Amarta Karya	75	0,06	
	54 PT Hutama Karya	60	0,05	
	55 PT Yodya Karya	40	0,03	
	56 PT Perusahaan Perdagangan Indonesia	30	0,03	
	57 PT Pengerukan Indonesia	20	0,02	
	58 PT Sang Hyang Seri	15	0,01	
	Jumlah	118.938	100,00	11,24

(dalam Rp juta)

Daerah Pembinaan/ Koordinator BUMN Pembina	BUMN Pembina	Dana Pembinaan	Prosentase	
			BUMN	Propinsi
TENGAH (cofindo)	1 PT Pertamina	36.837	41,33	
	2 PT Telkom Tbk	14.120	15,84	
	3 PT Bank Negara Indonesia Tbk	3.900	4,38	
	4 PT Pelabuhan Indonesia III	2.932	3,29	
	5 PT Pos Indonesia	2.800	3,14	
	6 PT Bank Rakyat Indonesia Tbk	2.760	3,10	
	7 PT Bank Mandiri Tbk	2.000	2,24	
	8 PT Sucofindo	1.999	2,24	
	9 PT Angkasa Pura I	1.900	2,13	
	10 PT Bank Ekspor Indonesia	1.650	1,85	
	11 Perum Perhutani	1.500	1,68	
	12 Perum Peruri	1.400	1,57	
	13 PT Jamsostek	1.350	1,51	
	14 PT Asuransi Ekspor Indonesia	1.100	1,23	
	15 PT Asabri	1.100	1,23	
	16 PT Perusahaan Listrik Negara	1.000	1,12	
	17 PT Jasa Raharja	1.000	1,12	
	18 PT Bank Tabungan Negara	1.000	1,12	
	19 PT Jasa Marga	944	1,08	
	20 PT Perusahaan Gas Negara Tbk	803	0,90	
	21 PT Pupuk Sriwijaya	630	0,71	
	22 Perum Pegadalan	650	0,73	
	23 PT Perkebunan Nusantara IX	625	0,70	
	24 PT Taspen	550	0,62	
	25 PT Asuransi Kesehatan Indonesia	500	0,56	
	26 PT INTI	450	0,50	
	27 PT Wijaya Karya	440	0,49	
	28 PT Asuransi Kredit Indonesia	360	0,40	
	29 Perum Sarana Pengembangan Usaha	350	0,39	
	30 PT TWC Borobudur, Pramb & Ratuboko	308	0,35	
	31 PT Petrokimia Gresik	300	0,34	
	32 PT INKA	230	0,26	
	33 PT Asuransi Jasa Indonesia	200	0,22	
	34 PT Kereta Api	180	0,20	
	35 PT Waskita Karya	175	0,20	
	36 Perum Perumnas	165	0,19	
	37 PT Surveyor Indonesia	150	0,17	
	38 PT Permodalan Nasional Madani	150	0,17	
	39 PT Adhi Karya	130	0,15	
	40 PT Primsisima	126	0,14	
	41 PT Pembangunan Perumahan	125	0,14	
	42 PT Kawasan Industri Wijayakusuma	70	0,08	
	43 PT Hutama Karya	70	0,08	
	44 PT Hotel Indonesia Natour	50	0,06	
	45 PT Sang Hyang Seri	30	0,03	
	46 Perum Jasa Tirta I	10	0,01	
	Jumlah	89.119	100,00	9,39

(dalam Rp juta)

Daerah Pembinaan/ Koordinator BUMN Pembina	BUMN Pembina	Data Pembinaan	Presentase	
			BUMN	Propinsi
PMUR (Petroklm Gresik)	1 PT Pertamina	29.486	24,52	
	2 PT Telkom Tbk	22.270	18,52	
	3 PT Perkebunan Nusantara X	11.534	9,59	
	4 PT Pelabuhan Indonesia III	9.500	7,90	
	5 PT Perkebunan Nusantara XI	4.830	4,02	
	6 PT Bank Negara Indonesia Tbk	4.345	3,61	
	7 PT Petroklm Gresik	4.250	3,53	
	8 PT Bank Mandiri Tbk	4.000	3,33	
	9 PT Bank Rakyat Indonesia Tbk	2.760	2,30	
	10 PT Pos Indonesia	2.000	1,66	
	11 PT Rajawali Nusantara Indonesia	2.000	1,66	
	12 PT PAL	1.863	1,55	
	13 PT Sucofindo	1.565	1,30	
	14 Perum Perhutani	1.500	1,25	
	15 PT Jamsostek	1.350	1,12	
	16 PT Angkasa Pura I	1.272	1,06	
	17 PT Perkebunan Nusantara XII	1.025	0,85	
	18 PT Surabaya Industrial Estate Rungkut	1.015	0,84	
	19 PT Jasa Raharja	1.000	0,83	
	20 PT Jasa Marga	944	0,79	
	21 PT Perusahaan Gas Negara Tbk	851	0,71	
	22 PT Taspen	800	0,67	
	23 PT INKA	770	0,64	
	24 PT Asuransi Ekspor Indonesia	750	0,62	
	25 PT Bank Tabungan Negara	750	0,62	
	26 PT Asuransi Kesehatan Indonesia	750	0,62	
	27 PT Pupuk Sriwijaya	710	0,59	
	28 Perum Pegadaian	650	0,54	
	29 PT Danareksa	580	0,48	
	30 PT Bank Ekspor Indonesia	550	0,46	
	31 PT Perusahaan Listrik Negara	500	0,42	
	32 Perum Peruri	425	0,35	
	33 PT Tambang Bukit Asam Tbk	400	0,33	
	34 PT Asuransi Kredit Indonesia	360	0,30	
	35 PT Sarinah	325	0,27	
	36 Perum Sarana Pengembangan Usaha	270	0,22	
	37 Perum Jasa Tirta I	259	0,22	
	38 PT Kereta Api	235	0,20	
	39 PT Asuransi Jasa Indonesia	200	0,17	
	40 PT Garam	154	0,13	
	41 PT PINDAD	150	0,12	
	42 PT Surveyor Indonesia	180	0,12	
	43 PT Permodalan Nasional Madani	150	0,12	
	44 PT Biro Klasifikasi Indonesia	150	0,12	
	45 Perum PNRI	120	0,10	
	46 PT Inhutani I	105	0,09	
	47 PT Waskita Karya	100	0,08	
	48 PT Pelni	100	0,08	
	49 Perum Perumnas	100	0,08	
	50 PT Kertas Leces	65	0,05	
	51 PT Brantas Abipraya	65	0,05	
	52 PT Hotel Indonesia Natour	50	0,04	
	53 PT Industri Soda Indonesia	40	0,03	
	54 PT Boma Blisma Indra	40	0,03	
	55 PT Sang Hyang Seri	30	0,02	
	56 PT Perikanan Samodra Besar	25	0,02	
	Jumlah	120.238	100,00	11,30

Daerah Pembinaan/ Koordinator BUMN Pembina	BUMN Pembina	Dana Pembinaan	Prosentase	
			BUMN	Propinsi
DK Jakarta (Bank Tabungan Negara)	1 PT Pertamina	9.725	27,02	
	2 PT Telkom Tbk	3.922	10,90	
	3 PT Bank Rakyat Indonesia Tbk	3.450	3,58	
	4 PT Pos Indonesia	2.800	7,78	
	5 PT Bank Mandiri Tbk	2.750	7,64	
	6 PT Bank Ekspor Indonesia	1.650	4,58	
	7 PT Angkasa Pura I	1.607	4,46	
	8 PT Bank Negara Indonesia Tbk	1.350	3,75	
	9 PT Jasa Raharja	1.000	2,78	
	10 PT Jamsostek	1.000	2,73	
	11 PT Asuransi Ekspor Indonesia	850	2,36	
	12 PT Pupuk Sriwijaya	805	2,24	
	13 PT Primmisima	500	1,39	
	14 PT Perusahaan Listrik Negara	500	1,39	
	15 PT Bank Tabungan Negara	500	1,39	
	16 PT Asuransi Kesehatan Indonesia	500	1,39	
	17 PT Sarinah	390	1,08	
	18 Perum Peruri	375	1,04	
	19 PT Wijaya Karya	340	0,94	
	20 PT TWC Borobudur, Pramb & Ratuboko	329	0,91	
	21 Perum Pegadalan	325	0,90	
	22 PT Asuransi Kredit Indonesia	270	0,75	
	23 PT Surveyor Indonesia	200	0,56	
	24 PT Taspen	200	0,56	
	25 PT Kereta Api	160	0,44	
	26 PT Pembangunan Perumahan	150	0,42	
	27 PT Biro Klasifikasi Indonesia	150	0,42	
	28 PT Waskita Karya	100	0,28	
	29 PT Hotel Indonesia Natour	50	0,14	
	30 PT Permodalan Nasional Madani	50	0,14	
	Jumlah	35.998	100,00	3,41
DK Jember (Pengembangan Pariwisata Bali)	1 PT Pertamina	4.626	16,06	
	2 PT Bank Mandiri Tbk	3.500	12,15	
	3 PT Bank Rakyat Indonesia Tbk	2.760	9,53	
	4 PT Pengembangan Pariwisata Bali	2.110	7,33	
	5 PT Pos Indonesia	2.000	6,94	
	6 PT Bank Negara Indonesia Tbk	1.830	6,35	
	7 PT Angkasa Pura I	1.797	6,24	
	8 PT Telkom Tbk	1.671	5,80	
	9 PT Jamsostek	1.050	3,65	
	10 PT Suefindo	1.004	3,49	
	11 PT Jasa Raharja	1.000	3,47	
	12 PT Rajawali Nusantara Indonesia	670	2,33	
	13 PT Pupuk Sriwijaya	600	2,08	
	14 PT Asuransi Kesehatan Indonesia	600	2,08	
	15 PT Perusahaan Listrik Negara	500	1,74	
	16 PT Pelabuhan Indonesia III	450	1,56	
	17 PT Asuransi Ekspor Indonesia	400	1,39	
	18 PT Asuransi Kredit Indonesia	360	1,25	
	19 PT Sarinah	325	1,13	
	20 PT Bank Tabungan Negara	250	0,87	
	21 PT Hotel Indonesia Natour	150	0,52	
	22 PT Asuransi Jiwasraya	150	0,52	
	23 PT Permodalan Nasional Madani	150	0,52	
	24 Perum Pegadalan	150	0,52	
	25 PT Pelni	100	0,35	
	26 PT Asuransi Jasa Indonesia	100	0,35	
	27 PT Taspen	100	0,35	
	28 PT Adhi Karya	90	0,31	
	29 PT Waskita Karya	85	0,30	
	30 PT Hutama Karya	80	0,28	
	31 PT Perikanan Samudra Besar	80	0,28	
	32 Perum Sarana Pengembangan Usaha	40	0,14	
	33 Perum Perumnas	20	0,07	
	Jumlah	28.798	100,00	2,72

(dalam Rp juta)

Daerah Pembinaan/ Koordinator BUMN Pembina	BUMN Pembina	Dana Pembinaan	Prosentase	
			BUMN	Propinsi
DAERAH TENGGAH BARAT (Jasa Raharja)	1 PT Pertamina	4.600	28,56	
	2 PT Bank Rakyat Indonesia Tbk	2.760	17,14	
	3 PT Bank Mandiri Tbk	2.000	12,42	
	4 PT Pos Indonesia	1.800	11,18	
	5 PT Angkasa Pura I	1.307	8,11	
	6 PT Telkom Tbk	1.254	7,79	
	7 PT Jamsostek	675	4,19	
	8 PT Jasa Raharja	600	3,73	
	9 PT Pelabuhan Indonesia I'	350	2,17	
	10 PT Perusahaan Listrik Negara	200	1,24	
	11 PT Asuransi Jasa Indonesia	200	1,24	
	12 PT Asuransi Kesehatan Indonesia	150	0,93	
	13 PT Taspen	100	0,62	
	14 Perum Pegadalan	100	0,62	
	15 Perum Perumnas	10	0,06	
	Jumlah	16.108	100,00	1,53
DAERAH TENGGAH TIMUR (Bank Mandiri Tbk)	1 PT Pertamina	4.220	23,92	
	2 PT Bank Mandiri Tbk	3.000	18,42	
	3 PT Bank Negara Indonesia Tbk	2.000	12,28	
	4 PT Bank Rakyat Indonesia Tbk	1.390	8,54	
	5 PT Telkom Tbk	1.254	7,70	
	6 PT Pos Indonesia	1.200	7,37	
	7 PT Angkasa Pura I	756	4,64	
	8 PT Jamsostek	675	4,15	
	9 PT Jasa Raharja	600	3,68	
	10 PT Pelabuhan Indonesia III	400	2,46	
	11 PT Perusahaan Listrik Negara	400	2,46	
	12 PT Asuransi Kesehatan Indonesia	150	0,92	
	13 PT Taspen	100	0,61	
	14 Perum Pegadalan	100	0,61	
	15 PT Semen Kupang	28	0,17	
	16 Perum Perumnas	10	0,06	
	Jumlah	18.283	100,00	2,51
DAERAH SUMATERA BARAT (PT Angkasa Pura II)	1 PT Telkom Tbk	4.390	20,14	
	2 PT Pertamina	3.400	15,59	
	3 PT Pos Indonesia	2.000	9,17	
	4 PT Bank Mandiri Tbk	2.000	9,17	
	5 PT Pupuk Kaltim	1.500	6,88	
	6 PT Bank Negara Indonesia Tbk	1.400	6,42	
	7 PT Bank Rakyat Indonesia Tbk	1.390	6,38	
	8 PT Jamsostek	1.050	4,82	
	9 PT Angkasa Pura II	900	4,13	
	10 PT Perkebunan Nusantara XIII	845	3,88	
	11 PT Pelabuhan Indonesia II	750	3,44	
	12 PT Jasa Raharja	650	2,93	
	13 PT Succfindo	527	2,42	
	14 PT Perusahaan Listrik Negara	300	1,38	
	15 PT Asuransi Kredit Indonesia	270	1,24	
	16 PT Asuransi Kesehatan Indonesia	100	0,46	
	17 PT Permodalan Nasional Madani	100	0,46	
	18 PT Taspen	80	0,37	
	19 PT Inhutani II	50	0,23	
	20 Perum Pegadalan	50	0,23	
	21 Perum Sarana Pengembangan Usaha	40	0,18	
	22 Perum Perumnas	10	0,05	
	Jumlah	21.802	100,00	2,07

Daerah Pembinaan/ ordnator BUMN Pembina	BUMN Pembina	Dana Pembinaan	Prosentase	
			BUMN	Propinsi
ANTAN TENGAH (bukan Indonesia III)	1 PT Telkom Tbk	3.951	26,81	
	2 PT Bank Mandiri Tbk	2.000	13,57	
	3 PT Pos Indonesia	1.800	12,21	
	4 PT Pertamina	1.591	10,80	
	5 PT Bank Rakyat Indonesia Tbk	1.390	9,43	
	6 PT Pupuk Kaltim	1.350	9,16	
	7 PT Jamsostek	1.050	7,12	
	8 PT Jasa Raharja	500	3,39	
	9 PT Pelabuhan Indonesia III	450	3,05	
	10 PT Asuransi Kredit Indonesia	270	1,83	
	11 PT Perusahaan Listrik Negara	100	0,68	
	12 PT Inhutani III	100	0,68	
	13 PT Taspen	70	0,47	
	14 PT Perkebunan Nusantara XIII	65	0,44	
	15 Perum Pegadalan	50	0,34	
	Jumlah	14.737	100,00	1,40
ANTAN SELATAN (Indonesia)	1 PT Telkom Tbk	7.902	32,65	
	2 PT Pertamina	3.014	12,46	
	3 PT Pupuk Kaltim	2.645	10,93	
	4 PT Bank Rakyat Indonesia Tbk	2.070	8,55	
	5 PT Pos Indonesia	2.000	8,26	
	6 PT Bank Negara Indonesia Tbk	1.200	4,96	
	7 PT Angkasa Pura I	1.131	4,67	
	8 PT Jamsostek	1.050	4,34	
	9 PT Jasa Raharja	700	2,89	
	10 PT Pelabuhan Indonesia III	550	2,27	
	11 PT Sucofindo	302	1,25	
	12 PT Perusahaan Listrik Negara	300	1,24	
	13 PT Asuransi Kredit Indonesia	270	1,12	
	14 PT Perkebunan Nusantara XIII	260	1,07	
	15 PT Bank Tabungan Negara	250	1,03	
	16 PT Asuransi Jiwasraya	150	0,62	
	17 PT Bank Mandiri Tbk	100	0,41	
	18 Perum Pegadalan	100	0,41	
	19 PT Inhutani II	75	0,31	
	20 PT Taspen	70	0,29	
	21 PT Inhutani III	60	0,25	
	Jumlah	24.199	100,00	2,29
ANTAN TIMUR (bukan Kaltim)	1 PT Pertamina	9.105	25,15	
	2 PT Pupuk Kaltim	8.700	24,03	
	3 PT Telkom Tbk	2.927	8,08	
	4 PT Bank Rakyat Indonesia Tbk	2.760	7,82	
	5 PT Pos Indonesia	2.400	6,63	
	6 PT Bank Mandiri Tbk	2.000	5,52	
	7 PT Angkasa Pura I	1.817	4,47	
	8 PT Jamsostek	1.350	3,73	
	9 PT Bank Negara Indonesia Tbk	1.300	3,59	
	10 PT Jasa Raharja	700	1,93	
	11 PT Sucofindo	480	1,33	
	12 PT Inhutani I	440	1,22	
	13 PT Pelabuhan Indonesia IV	425	1,17	
	14 PT Perkebunan Nusantara XIII	390	1,08	
	15 PT Asuransi Kredit Indonesia	270	0,75	
	16 PT Bank Tabungan Negara	250	0,69	
	17 PT Perusahaan Listrik Negara	200	0,55	
	18 PT Surveyor Indonesia	200	0,55	
	19 PT Asuransi Jiwasraya	150	0,41	
	20 Perum Pegadalan	150	0,41	
	21 PT Permodalan Nasional Madani	100	0,28	
	22 PT Inhutani II	100	0,28	
	23 PT Taspen	80	0,22	
	24 PT Peln	75	0,21	
	25 Perum Sarana Pengembangan Usaha	40	0,11	
	Jumlah	36.209	100,00	3,43

(dalam Rp juta)

Daerah Pembinaan/ Koordinator BUMN Pembina	BUMN Pembina	Dana Pembinaan	Proporsitas	
			BUMN	Propinsi
WESI UTARA (Bank Rakyat Indonesia Tbk)	1 PT Pertamina	3.530	13,64	
	2 PT Bank Rakyat Indonesia Tbk	2.760	15,36	
	3 PT Telkom Tbk	2.006	11,16	
	4 PT Bank Mandiri Tbk	2.000	11,13	
	5 PT Bank Negara Indonesia Tbk	1.800	10,02	
	6 PT Pos Indonesia	1.200	6,68	
	7 PT Jamsostek	1.050	5,84	
	8 PT Angkasa Pura I	814	4,53	
	9 PT Sucofindo	510	2,84	
	10 PT Jasa Raharja	500	2,78	
	11 PT Asuransi Kesehatan Indonesia	350	1,95	
	12 PT Asuransi Kredit Indonesia	270	1,50	
	13 PT Pupuk Sriwijaya	250	1,39	
	14 Perum Pegadalan	250	1,39	
	15 PT Perusahaan Listrik Negara	200	1,11	
	16 PT Asuransi Jiwasraya	150	0,83	
	17 PT Taspen	100	0,56	
	18 PT Permodalan Nasional Madani	100	0,56	
	19 PT Pelabuhan Indonesia IV	80	0,45	
	20 Perum Perumnas	50	0,28	
	Jumlah	17.970	100,00	1,70
WESI TENGAH (Jamsostek)	1 PT Bank Rakyat Indonesia Tbk	2.070	23,96	
	2 PT Pertamina	1.711	19,80	
	3 PT Bank Negara Indonesia Tbk	1.600	18,52	
	4 PT Telkom Tbk	1.504	17,41	
	5 PT Jamsostek	975	11,28	
	6 PT Jasa Raharja	300	3,47	
	7 PT Pos Indonesia	200	2,31	
	8 PT Perusahaan Listrik Negara	100	1,13	
	9 Perum Pegadalan	100	1,16	
	10 PT Pelabuhan Indonesia IV	80	0,93	
	Jumlah	8.640	100,00	0,83
WESI TENGAH (Taspen)	1 PT Bank Negara Indonesia Tbk	3.000	19,57	
	2 PT Bank Mandiri Tbk	2.500	16,30	
	3 PT Bank Rakyat Indonesia Tbk	2.490	16,24	
	4 PT Pertamina	2.237	14,59	
	5 PT Telkom Tbk	2.006	13,08	
	6 PT Pos Indonesia	1.200	7,83	
	7 PT Jamsostek	1.050	6,85	
	8 PT Jasa Raharja	500	3,26	
	9 PT Perusahaan Listrik Negara	100	0,65	
	10 PT Asuransi Kesehatan Indonesia	100	0,65	
	11 PT Pelabuhan Indonesia IV	80	0,52	
	12 PT Taspen	70	0,46	
	Jumlah	15.333	100,00	1,45
WESI TENGGARA (Bank Tambang Tbk)	1 PT Telkom Tbk	2.006	22,93	
	2 PT Pertamina	2.002	22,89	
	3 PT Bank Rakyat Indonesia Tbk	1.390	15,89	
	4 PT Pos Indonesia	1.300	14,86	
	5 PT Jamsostek	975	11,15	
	6 PT Jasa Raharja	500	5,57	
	7 Perum Pegadalan	125	1,43	
	8 PT Perusahaan Listrik Negara	100	1,14	
	9 PT Bank Mandiri Tbk	100	1,14	
	10 PT Asuransi Kesehatan Indonesia	100	1,14	
	11 PT Pelabuhan Indonesia IV	80	0,91	
	12 PT Taspen	70	0,80	
	Jumlah	8.748	100,00	0,83

Daerah Pembinaan/ Koordinator BUMN Pembina	BUMN Pembina	Dana Pembinaan	Prosentase	
			BUMN	Propinsi
DAERAH Pembinaan Indonesia IV)	1 PT Pertamina	7.118	24,27	
	2 PT Bank Negara Indonesia Tbk	5.700	19,43	
	3 PT Bank Rakyat Indonesia Tbk	2.760	9,41	
	4 PT Telkom Tbk	2.674	9,12	
	5 PT Angkasa Pura I	1.556	5,30	
	6 PT Bank Mandiri Tbk	1.500	5,11	
	7 PT Jamsostek	1.350	4,60	
	8 PT Pos Indonesia	1.300	4,43	
	9 PT Pelabuhan Indonesia IV	945	3,22	
	10 PT Jasa Raharja	900	3,07	
	11 PT Pupuk Sriwijaya	551	1,88	
	12 PT Asuransi Kesehatan Indonesia	500	1,70	
	13 PT Asuransi Kredit Indonesia	360	1,23	
	14 PT Perusahaan Listrik Negara	300	1,02	
	15 PT Sucofindo	288	0,98	
	16 PT Kawasan Industri Makasar	250	0,85	
	17 PT Bank Tabungan Negara	250	0,85	
	18 Perum Pegadalan	200	0,68	
	19 PT Inhutani I	180	0,61	
	20 PT Asuransi Jiwasraya	150	0,51	
	21 Perum Sarana Pengembangan Usaha	110	0,38	
	22 PT Industri Kapal Indonesia	105	0,36	
	23 PT Taspen	100	0,34	
	24 PT Permodalan Nasional Madani	100	0,34	
	25 Perum Perumnas	70	0,24	
	26 PT Sang Hyang Seri	15	0,05	
	Jumlah	29.322	100,00	2,77
DAERAH Pembinaan (Angkasa Pura I)	1 PT Bank Mandiri Tbk	2.500	27,42	
	2 PT Bank Negara Indonesia Tbk	2.300	25,22	
	3 PT Pertamina	1.677	18,39	
	4 PT Telkom Tbk	1.254	13,75	
	5 PT Angkasa Pura I	442	4,95	
	6 PT Jamsostek	375	4,11	
	7 PT Pos Indonesia	200	2,19	
	8 PT Jasa Raharja	200	2,19	
	9 PT Pelabuhan Indonesia IV	80	0,88	
	10 PT Perusahaan Listrik Negara	50	0,55	
	11 PT Taspen	40	0,44	
	Jumlah	9.118	100,00	0,86
DAERAH Pembinaan (Perusahaan Listrik Negara)	1 PT Bank Mandiri Tbk	2.500	27,42	
	2 PT Pertamina	2.355	25,83	
	3 PT Telkom Tbk	1.254	13,75	
	4 PT Jasa Raharja	300	3,29	
	5 PT Pos Indonesia	100	1,10	
	6 PT Pelabuhan Indonesia IV	80	0,88	
	7 PT Perusahaan Listrik Negara	50	0,55	
	Jumlah	6.639	72,81	0,63

(dalam Rp juta)

Daerah Pembinaan/ Koordinator BUMN Pembina	BUMN Pembina	Dana Pembinaan	Presentase	
			BUMN	Propinsi
A (Pertamina)	1 PT Pertamina	5.333	33,61	
	2 PT Telkom Tbk	2.006	12,64	
	3 PT Bank Negara Indonesia Tbk	2.000	12,60	
	4 PT Bank Mandiri Tbk	2.000	12,60	
	5 PT Bank Rakyat Indonesia Tbk	1.390	8,76	
	6 PT Jasa Raharja	1.000	6,30	
	7 PT Angkasa Pura I	760	4,79	
	8 PT Pelabuhan Indonesia IV	450	2,84	
	9 PT Jamsostek	375	2,36	
	10 PT Pos Indonesia	200	1,26	
	11 PT Asuransi Kesehatan Indonesia	200	1,26	
	12 PT Perusahaan Listrik Negara	100	0,63	
	13 PT Taspen	40	0,25	
	14 PT Perikanan Samudra Besar	15	0,09	
	Jumlah	15.869	100,00	1,49
	TOTAL	1.064.069		100,00

Jakarta, 19 Juli 2005

Menteri BUMN



Sugiharto

LAMPIRAN 8



**DAFTAR PENYALURAN DANA PROGRAM BINA LINGKUNGAN
BUMN PEMBINA : PTP. NUSANTARA VI (PERSERO)
TAHUN 2006**

WILAYAH/URAIAN	KAB/KOTA	KEBUN	JUMLAH BANTUAN (RP.)	PROGRAM BANTUAN
Januari				
Jumlah 1			-	
Februari				
1 Ninik Mamak Kampung Lagan Kinali	Pasaman	Ophir	1.000.000	Prasarana / Sarana
2 Mushalla Al-Ikhlâs Kec. Lingkar Selatan	Kota Jambi	Kandir	1.000.000	Sarana Ibadah
3 Mushalla Al-Amin Kel. Mendalo Darat Kec. Jaluko	Muaro Jambi	Kandir	1.000.000	Sarana Ibadah
4 Masjid Ad-Dakwah Desa Kembang Tanjung Kec. Mersam	Batanghari	Kandir	5.000.000	Sarana Ibadah
Jumlah 2			8.000.000	
Maret				
Jumlah 3			-	
Triwulan I			8.000.000	
April				
1 Masjid Nurut Taqwa di Sei Bahar	Muaro Jambi	Kandir	2.000.000	Sarana Ibadah
2 Pondok Santri Ar-Rohman Kel. Lebak Bandung Kec. Jelutung	Kota Jambi	Kandir	1.000.000	Prasarana / Sarana
Jumlah 4			3.000.000	
Mei				
1 Pendidikan a/n. Riswandi di Kota Jambi	Kota Jambi	Kandir	1.000.000	Pendidikan
Jumlah 5			1.000.000	
Juni				
1 Bea Siswa via BAZDA Kota Jambi	Kota Jambi	Kandir	2.500.000	Pendidikan
2 Mushalla Al-Amin Dusun Talang Merindu Sei Markanding	Muaro Jambi	Kandir	2.000.000	Sarana Ibadah
3 Masjid Al-Kautsar di Talang Bakung	Kota Jambi	Kandir	1.000.000	Sarana Ibadah
Jumlah 6			5.500.000	
Triwulan II			9.500.000	
Juli				
Jumlah 7			-	
Agustus				
Jumlah 8			-	
September				
1 Pengembangan Komputer oleh STIKOM Jambi	Kota Jambi	Kandir	1.000.000	Pendidikan
2 Olahraga Tennis Meja di Rt. 04 Pelangi II Telanaipura	Kota Jambi	Kandir	1.000.000	Prasarana / Sarana
3 Jembatan Unit IV Sei Bahar	Muaro Jambi	Kandir	5.000.000	Prasarana / Sarana
4 Masjid Misbahul Jannah Sei Kambang	Kota Jambi	Kandir	5.000.000	Sarana Ibadah
5 Mushalla Al Nawawi Paal V Kota Baru	Kota Jambi	Kandir	1.000.000	Sarana Ibadah
6 Masjid Silaturrahmi Paal V Kota Baru	Kota Jambi	Kandir	2.500.000	Sarana Ibadah
Jumlah 9			15.500.000	
Triwulan III			15.500.000	
Oktober				
1 Masjid Al-Munawwarah (Prumnas Aur Duri Indah)	Kota Jambi	Kandir	2.500.000	Sarana Ibadah
2 Masjid Ad Dakwah (Mersam)	Batanghari	Kandir	5.000.000	Sarana Ibadah
3 Debby Sarianto	Kota Jambi	Kandir	2.000.000	Pendidikan
Jumlah 10			9.500.000	
November				
Jumlah 11			-	
Desember				
1				
2				
Jumlah 12			-	
Triwulan IV			9.500.000	
TOTAL			42.500.000	

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan
PTP. Nusantara VI (Persero)

**PENYALURAN PROGRAM BINA LINGKUNGAN
 PTP. NUSANTARA VI (PERSERO)
 TAHUN 2006 s.d NOPEMBER**

Kab/Prop	Bentuk Bantuan					Jumlah
	Bencana Alam	Pendidikan / Pelatihan	Peningk. Kesehatan	Prasarana & Sarana	Sarana Ibadah	
Prop. Sumbar						
Pasaman	-	-	-	1.000	-	1.000
Solok	-	-	-	-	-	-
50 Kota	-	-	-	-	-	-
Padang	-	2.000	-	-	-	2.000
Swl/Sjj	-	-	-	-	-	-
Tanah Datar	-	-	-	-	-	-
Pesisir Selatan	-	-	-	-	-	-
Sub Jumlah	-	2.000	-	1.000	-	3.000
Prop. Jambi						
Jambi	-	4.500	-	2.000	13.000	19.500
Ma Jambi	-	-	-	5.000	5.000	10.000
Batang Hari	-	-	-	-	10.000	10.000
Kerinci	-	-	-	-	-	-
Tebo	-	-	-	-	-	-
Bungo	-	-	-	-	-	-
Sorolangun	-	-	-	-	-	-
Tj. Jabung Barat	-	-	-	-	-	-
Sub Jumlah	-	4.500	-	7.000	28.000	39.500
Total	-	6.500	-	8.000	28.000	42.500

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan
FTP. Nusantara VI (Persero)

PENYALURAN PROGRAM BINA LINGKUNGAN
 FTP. NUSANTARA VI (PERSERO)
 PERIODE TAHUN 2006 (POSISI NOPEMBER)

Kab/Prop	Bentuk Bantuan					Jumlah
	Bencana Alam	Pendidikan / Pelatihan	Peringk. Kesehatan	Prasarana & Sarana	Sarana Ibadah	
Prop. Sumbar						
Pasaman	5.000	2.480	-	15.500	6.000	28.980
Pulok	9.040	660	17.000	-	1.000	27.700
P0 Kota	-	480	-	52.279	-	52.759
Padang	8.500	6.180	-	2.450	1.600	18.730
Pawi/Sjj	-	10.000	-	-	-	10.000
Panah Datar	3.500	-	-	-	-	3.500
Pesisir Selatan	3.000	-	-	-	-	3.000
Sub Jumlah	29.040	19.800	17.000	70.229	8.600	144.669
Prop. Jambi						
Jambi	3.720	18.880	47.250	7.000	31.750	108.600
Pa Jambi	7.930	18.640	10.000	260.662	48.000	345.232
Patang Hari	3.790	7.080	-	14.700	15.000	40.570
Perinci	3.550	8.680	8.000	-	-	20.230
Pobo	-	480	-	5.000	6.000	11.480
Pungo	-	5.480	-	-	11.000	16.480
Prolangun	3.870	5.480	-	5.000	17.880	32.230
Pi. Jabung Barat	-	2.580	-	-	5.000	7.580
Sub Jumlah	22.860	67.300	65.250	292.362	134.630	582.402
Total	51.900	87.100	82.250	362.591	143.230	727.071

LAMPIRAN 9



**LAPORAN TAHUNAN
PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PTP. NUSANTARA VI (PERSERO)
TAHUN 2005**



**UNIT PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
BAGIAN KEMITRAAN / UMUM**

JL. H ZAINIR HAVIZ NO. 1 JAMBI
TELEPHONE : (0741) 445603 – 445609 (HUNTING)
FAX : (0741) 445500

Lampiran Pengantar

Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PTP. Nusantara VI (Persero) disusun berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor : Kep-236/MBU/2003 tanggal 17 Juni 2003.

Program PKBL yang dilaksanakan adalah pembinaan meliputi penyaluran pinjaman, hibah kepada Usaha Kecil dan Koperasi dan penyaluran dana Bina Lingkungan sebagai wujud kepedulian BUMN di wilayah kerja PTP. Nusantara VI (Persero) yang meliputi Propinsi Sumatera Barat dan Jambi.

Realisasi penyaluran dana Program Kemitraan pada tahun ini sebesar Rp. 600.000.000,00 diberikan kepada 53 mitra binaan, hibah untuk pameran produk mitra binaan dan pelatihan bagi calon dan mitra binaan Rp. 14.750.000 serta realisasi penyaluran dana Program Bina Lingkungan untuk kepedulian masyarakat sebesar Rp. 174.152.000,00

Sisa dana per Desember 2005 sebesar Rp. 28.214.679,27 terdiri dari dana Program Kemitraan sebesar Rp. 5.197.691,32 dan dana Program Bina Lingkungan sebesar Rp. 23.016.987,95.

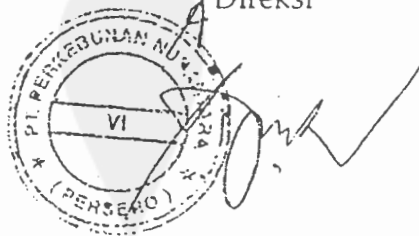
Salah satu bagian dari sisa dana tersebut penyalurannya akan diluncurkan pada tahun anggaran 2006.

Realisasi penerimaan angsuran mitra binaan pada tahun 2005 sebesar Rp. 340.444.834,00 atau 33 % dari jadwal piutang jatuh tempo yang akan diterima sebesar Rp. 477.256.613,00

Demikian Laporan Tahunan disampaikan harap maklum.

Jambi, Januari 2006
PTP. Nusantara VI (Persero)

Direksi



Eddy Yanto
Direktur SDM/Umum

DAFTAR ISI

	Halama
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Lampiran	iii
BAB I : PENDAHULUAN	
1 Bidang Usaha BUMN Pembina	1
2 Landasan Hukum	1
3 Struktur Organisasi	1-2
4 Gambaran Umum Mitra Binaan	2
BAB II : PELAKSANAAN RENCANA KERJA & ANGGARAN PROGRAM KBL TAHUN 2004	
A. PROGRAM KEMITRAAN	
1 Realisasi Rencana Kerja	3
2 Realisasi Anggaran	3
2.1. Sumber Dana	4
2.2. Dana Tersedia dan Penggunaan Dana	4
2.3. Penyaluran per Wilayah dan Sektor	4
2.4. Mutasi Pinjaman Bermasalah	5
2.5. Pendapatan dan Beban	5
2.6. Neraca	5
B. PROGRAM BINA LINGKUNGAN	
1 Realisasi Rencana Kerja	7
2 Realisasi Anggaran	7
2.1. Sumber Dana	7
2.2. Dana Tersedia dan Penggunaan Dana	7
2.3. Penyaluran per Bentuk Bantuan per Wilayah Usaha BUMN Pembina	8
BAB III : LAIN - LAIN.	
1 Hal - hal yang perlu mendapat perhatian	8
2 Hal - hal yang perlu mendapat persetujuan Menteri / RUPS	8
3 Masalah yang dihadapi dan rencana penyelesaiannya	8

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Laporan Aktivitas Program Kemitraan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2005	10
2. Laporan Akumulasi Dana Program Kemitraan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2005	11
3. Penyaluran Dana Program Kemitraan per Wilayah menurut Sektor Usaha s.d Desember 2005	12
4. Kualitas Pinjaman Program Kemitraan menurut Sektor Usaha s.d Desember 2005	13
5. Laporan Arus Kas PKBL Desember 2005	14
6. Risalah Penerimaan & Pengeluaran Kas PKBL Tahun 2005 & 2004	15
7. Arus Dana Program Bina Lingkungan tahun 2005	16
8. Daftar Pembayaran Angsuran Mitra Binaan s.d Desember 2005	17 - 20
9. Daftar Pembayaran Angsuran Kredit Mitra Bermasalah s.d Desember 2005	21
10. Daftar Pembayaran Angsuran Kredit Mitra yang telah lunas s.d Desember 2005	22
11. Tabel Perbandingan Kuantitatif dalam RKA PKBL tahun 2005	23
12. Realisasi Pemberian dan Kualitas Pinjaman Program Kemitraan Tahun 2005 dan 2004	24
13. Realisasi Penyaluran per Wilayah dan Sektor Tahun 2005	25
14. Realisasi Penyaluran per Wilayah dan Sektor sampai dengan Tahun 2005	26
15. Daftar Penerimaan Pendapatan Program Kemitraan Per Tahun	27
16. Daftar Inventaris PKBL per 31 Desember 2005	28
17. Sumber Dana PKBL per 31 Desember 2005	29
18. Realisasi Penyaluran Program Bina Lingkungan per Jenis Bantuan s.d 31 Desember 2005	30

BAB I PENDAHULUAN

Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL) PTP. Nusantara VI (Persero) tahun 2005, berpedoman pada Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : KEP-236/MBU/2003 tanggal 17 Juni 2003 dengan uraian sebagai berikut :

BIDANG USAHA BUMN PEMBINA

PTP. Nusantara VI (Persero) adalah perusahaan agrobisnis perkebunan di Propinsi Sumatera Barat dan Jambi, dengan budi daya tanaman terdiri dari tanaman sawit dan teh serta pabrik pengolahan kelapa sawit dan pengolahan teh.

Luas areal tanaman per komoditi tahun 2004 sesuai dengan tabel sbb :

Wilayah	Luas per Budi Daya (Ha)		
	Kelapa Sawit	Teh	Jumlah
Sumatera Barat	10.391,41	577,11	10.968,52
Jambi	20.971,52	2.624,69	23.596,21
Jumlah	31.362,93	3.201,80	34.564,73

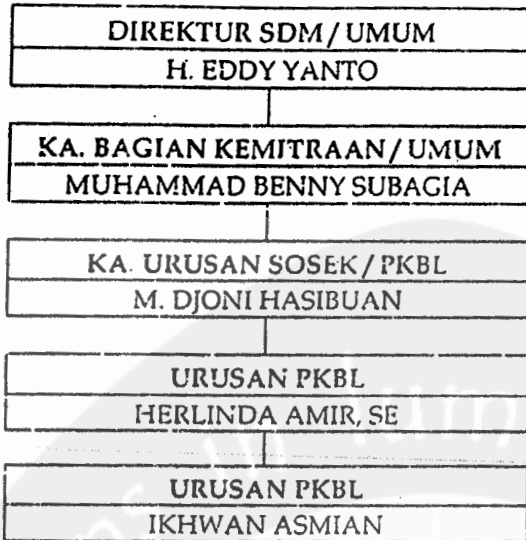
LANDASAN HUKUM

- Surat Keputusan Menteri BUMN No : Kep-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang Penilaian Kinerja Perusahaan.
- Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor : Kep-236/MBU/2003 tanggal 17 Juni 2003, tentang Program kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.
- Surat Edaran Menteri BUMN Nomor : SE-433/MBU/2003 tanggal 18 September 2003, tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai Keputusan Direksi Nomor : 06.05/KPTS/32/1999 tanggal 30 Januari 1999 tentang Struktur Organisasi PTP. Nusantara VI (Persero), unit Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi merupakan tugas Bagian Kemitraan/Umum.

Struktur Organisasi PKBL PTP. Nusantara VI (Persero) terlihat pada bagan :



GAMBARAN UMUM MITRA BINAAN

Mitra Binaan Program Kemitraan PTP. Nusantara VI (Persero) meliputi wilayah Propinsi Sumatera Barat dan Jambi. Sektor usaha mitra binaan beraneka ragam dan okasinya sebagian besar jauh dan berpencar, sehingga pembinaan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal.

Jumlah mitra binaan yang menerima bantuan dana Program Kemitraan pada tahun 2005 sebanyak 53 mitra binaan dan realisasi sampai dengan Desember 2005 sebanyak 385 mitra binaan dengan rincian :

No	Propinsi	Mitra Binaan		s.d Desember 2005
		s.d Tahun 2004	Real Tahun 2005	
1	Sumatera Barat	159	11	170
2	Jambi	171	42	213
3	Jakarta	2	0	2
	Jumlah	332	53	385

Daftar mitra binaan yang menerima bantuan Program Kemitraan terlihat dalam lampiran 8,9,10.

Dari 385 mitra binaan yang menerima bantuan, 84 mitra binaan (21,82%) telah melunasi kreditnya (lampiran 10).

BAB II

PELAKSANAAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN TAHUN 2005

PROGRAM KEMITRAAN

1. Realisasi Rencana Kerja

Jumlah mitra binaan yang menerima bantuan pinjaman dana Program Kemitraan tahun 2005 sebanyak 53 mitra binaan atau 132,50% dari rencana kerja anggaran, terlihat dalam tabel sebagai berikut :

No	Wilayah	RKA	Realisasi Tahun 2005	Selisih
		Unit	Unit	Unit
1	Propinsi Sumbar	12	11	1
2	Propinsi Jambi	28	42	-14
3	Jakarta	0	0	0
Jumlah		40	53	-13
Persentase			132,50	-32,50

Realisasi penyaluran per sektor per wilayah terlihat dalam lampiran 13.

2. Realisasi Anggaran

2.1 Sumber Dana

Sumber dana Program Kemitraan diperoleh dari pengembalian cicilan pokok mitra binaan, dan pengembangan usaha (jasa peminjam, jasa giro)

Sumber dana Program Kemitraan terlihat dalam tabel sebagai berikut :

No	Uraian	S/d Desember 2005		% Tase
		RKAP (Rp.)	Realisasi (Rp.)	
1	Saldo Awal	4.204	25.173	598,79
2	Pengembalian Pinjaman	207.046	305.128	147,37
3	Pengembalian Jasa Peminjam	22.241	35.317	158,79
4	Pendapatan Jasa Giro	5.965	3.514	58,91
5	Alokasi Penibagian Laba	362.989	260.900	71,88
Jumlah		602.445	630.032	104,58

2.2 Dana Tersedia dan Penggunaan Dana

Dana tersedia tahun 2005 terealisasi 104,58 % diatas anggaran, telah disalurkan kepada 53 mitra binaan dan untuk biaya operasional, terlihat dalam tabel sebagai berikut :

(Rp. 000)

No	Wilayah Kab/Kota	RKA PK	Realisasi Tahun 2005	Perbandingan
1	2	3	4	5
1	Saldo Awal	4.204	25.173	598,79
2	Penerimaan			
	- Alokasi Laba Prog. Kemitraan	362.989	260.900	71,88
	- Peenggembalian Angsuran	207.046	305.128	147,37
	- Jasa Pemirjam	22.241	35.317	158,79
	- Jasa Giro	5.965	3.514	58,91
	Jumlah (1 + 2)	602.445	630.032	104,58
3	Pengeluaran Program Kemitraan			
	- Penyaluran Pinjaman	482.000	600.000	124,48
	- Hibah	96.400	14.750	15,30
	- Biaya Operasional	22.560	10.084	44,70
4	Saldo Akhir	1.485	5.198	350,03
	Jumlah (3 + 4)	602.445	630.032	104,58

2.3 Penyaluran per Wilayah dan Sektor

Realisasi penyaluran tahun 2005 dialokasikan untuk Propinsi Jambi dan Sumatra Barat dalam sektor industri, perdagangan, perikanan, jasa dan lainnya dengan rincian per Kabupaten/Kota sebagai berikut :

No	Wilayah Kab/Kota	Sektor							Jumlah
		Industri	Perdagangan	Pertanian	Peternakan	Perikanan	Jasa	Lainnya	
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	
A	Sumbar								
	1 Padang	22.500	32.500	-	-	-	27.500	22.500	105.000
	2 Solok	-	-	-	-	-	10.000	-	10.000
	Jumlah	22.500	32.500	-	-	-	37.500	22.500	115.000
B	Jambi								
	1 Kota Jambi	137.500	112.500	-	15.000	25.000	50.000	-	340.000
	2 Bungo	10.000	10.000	-	-	-	-	-	20.000
	3 Kerinci	10.000	-	10.000	-	-	-	-	20.000
	4 Ma. Jambi	10.000	65.000	-	-	-	10.000	20.000	105.000
	Jumlah	167.500	187.500	10.000	15.000	25.000	60.000	20.000	485.000
Jumlah	190.000	220.000	10.000	15.000	25.000	97.500	42.500	600.000	

Relisasi penyaluran pinjaman dana Program Kemitraan kepada mitra binaan sebesar Rp. 600.000.000,- (124,48%) diatas anggaran.

2.4 Mutasi Pinjaman bermasalah

Piutang bermasalah telah dibukukan dalam piutang sangsi (ragu-ragu) sampai dengan tahun 2005 terdiri dari 19 mitra binaan dengan nilai sisa hutang pokok sebesar Rp. 344.835.314,00. Piutang ini merupakan piutang bermasalah sejak diterima dari (limpahan) PTF. Nusantara III dan IV (Persero).

Terhadap piutang ini telah diusulkan untuk dihapus bukukan (write off) dalam RUPS tahun 2005.

Piutang bermasalah sampai dengan tahun 2005 terlihat dalam tabel berikut :

Wilayah	Rp. 000,-					
	Tahun 2004		Tahun 2005		Jumlah	
	MB	Rp.	MB	Rp.	MB	Rp.
- Prop. Sumatera Barat	6	101.761	0	-	6	101.761
- Prop. Jambi	12	121.322	0	-	12	121.322
- Jakarta	1	121.752	0	-	1	121.752
Jumlah	19	344.835	0	-	19	344.835

Rincian piutang bermasalah terlihat dalam lampiran 9.

2.5 Pendapatan dan Beban

Surplus s.d Desember 2005 sebesar Rp. 27.125.912 (673,77% diatas RKA) terlihat dalam tabel sebagai berikut :

No	Uraian	RKA (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Tase
1	Pendapatan			
	- Jasa Peminjam	22.241.000	35.316.516	158,79
	- Jasa Giro	5.965.000	3.513.896	58,91
	Jumlah Pendapatan	28.206.000	38.830.412	137,67
2	Pengeluaran			
	- Biaya Operasional	22.560.000	10.084.500	44,70
	- Penyusutan Aktiva	1.620.000	1.620.000	100,00
	Jumlah Pengeluaran	24.180.000	11.704.500	48,41
	Surplus (Devisit)	4.026.000	27.125.912	673,77

2.6 Neraca

Neraca Program Kemitraan posisi bulan Desember 2005 dan 2004 terlihat sebagai berikut :

	2005 (Rp)	2004 (Rp)
<u>AKTIVA</u>		
Kas dan Setara Kas	5.197.691,32	25.173.461
Piutang Pinjaman	1.949.073.803,00	1.654.202.121
Aktiva Tetap	2.688.333,00	4.308.333
Aktiva Lain-lain	344.835.314,00	344.835.314
Jumlah Aktiva	2.301.795.141,32	2.028.519.229
<u>KEWAJIBAN DAN AKTIVA BERSIH</u>		
Terikat		
Dana Alokasi PTP. Nusantara VI (Persero)	1.886.353.038,00	1.625.453.038
Pelimpahan Dana	257.673.552,00	257.673.552
Akumulasi Hibah	(103.695.783,00)	(88.945.783,
Jumlah Terikat	2.040.330.807,00	1.794.180.807
Tidak Terikat		
Akumulasi Hasil Operasi	234.338.422,04	217.629.533
Hasil Operasi Tahun Berjalan	27.125.912,28	18.708.888
Jumlah Tidak Terikat	261.464.334,32	234.338.421
Jumlah Kewajiban dan Aktiva Bersih	2.301.795.141,32	2.028.519.228

PROGRAM BINA LINGKUNGAN

1. Realisasi Rencana Kerja

Realisasi Program Bina Lingkungan tahun 2005, disalurkan untuk wilayah Propinsi Sumatera Barat dan Propinsi Jambi agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat disekitar kebun daiam bentuk bantuan :

- Bencana alam
- Pendidikan dan pelatihan
- Peningkatan Kesehatan
- Pengembangan prasarana dan sarana
- Sarana Ibadah

2. Realisasi Anggaran

2.1 Sumber Dana

Sumber dana program BL tahun 2005 adalah saldo akhir tahun 2004, alokasi laba perusahaan tahun 2004, jasa giro dan lain-lain dengan rincian :

❖ Saldo Akhir tahun 2005	Rp. 67.248.663,55
❖ Alokasi Laba tahun 2004	Rp. 130.500.000,00
❖ Jasa Giro	Rp. 1.358.824,40
Jumlah	<u>Rp. 199.107.487,95</u>

2.2 Dana Tersedia dan Penggunaan Dana

Jumlah dana tersedia tahun 2005 sebesar Rp. 199.107.487,95 dan realisasi penggunaan dana Rp. 176.090.500,00 untuk disalurkan disekitar wilayah kerja perusahaan yang berada di Propinsi Sumbar dan Jambi dengan rincian :

I Sumber Dana	
1. Saldo Awal	Rp. 67.248.663,55
2. Penerimaan	
- Alokasi Laba tahun 2004	Rp. 130.500.000,00
- Pendapatan Jasa Giro	Rp. 1.358.824,40
Sub Jumlah (1 + 2)	<u>Rp. 131.358.824,40</u>
Jumlah Dana Tersedia	<u>Rp. 199.107.487,95</u>
 II Penggunaan Dana	
1. Penyaluran Bantuan :	
- Bencana Alam	Rp. 14.000.000,00
- Pendidikan dan Pelatihan	Rp. 10.200.000,00
- Peningkatan Kesehatan	Rp. 36.750.000,00
- Pengembangan prasarana dan sarana	Rp. 83.662.000,00
- Sarana ibadah	Rp. 29.500.000,00
2. Beban Operasional	Rp. 1.938.500,00
Jumlah Penggunaan Dana (1 + 2)	<u>Rp. 176.090.500,00</u>
 3. Saldo Akhir per 31 Desember 2005	 <u>Rp. 23.016.987,95</u>

22

2.3 Penyaluran per Bentuk Bantuan per Wilayah Usaha BUMN Pembina

Pelaksanaan penyaluran Program Bina Lingkungan dilakukan oleh Kebun dan Kantor Direksi bekerjasama dengan instansi terkait di wilayah kerja masing-masing dengan rincian :

Kab/Prop	Bentuk Bantuan					Jumlah
	Bencana Alam	Pendidikan / Pelatihan	Peningk. Kesehatan	Prasarana & Sarana	Sarana Ibadah	
Prop. Sumbar						
Pasaman	-	-	-	-	2.500	2.500
Solok	9.040	-	-	-	-	9.040
50 Kota	-	-	-	-	-	-
Padang	5.000	2.500	-	-	-	7.500
Swl/Sjj	-	-	-	-	-	-
Tanah Datar	-	-	-	-	-	-
Pesisir Selatan	-	-	-	-	-	-
Sub Jumlah	14.040	2.500	-	-	2.500	19.040
Prop. Jambi						
Jambi	-	3.000	36.750	-	10.000	49.750
Ma Jambi	-	4.700	-	78.662	17.000	100.362
Batang Hari	-	-	-	-	-	-
Kerinci	-	-	-	-	-	-
Tebo	-	-	-	-	-	-
Bungo	-	-	-	-	-	-
Sorolangun	-	-	-	5.000	-	5.000
Tj. Jabung Barat	-	-	-	-	-	-
Sub Jumlah	-	7.700	36.750	83.662	27.000	155.112
Total	14.040	10.200	36.750	83.662	29.500	174.152

BAB III

LAIN - LAIN

Hal yang perlu mendapat perhatian

- a). Memberikan bantuan kepada usaha kecil mempunyai resiko untuk pengembalian cicilan kreditnya.
- b). Dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan usaha kecil diperlukan pembinaan secara sinergi antar BUMN Pembina dan instansi pemerintah lainnya.
- c). Dalam penyaluran pinjaman, dapat dipertimbangkan adanya credit guarante dari usaha kecil dan koperasi sebagai motivasi pengembalian pinjaman kepada BUMN Pembina.

Hal yang perlu mendapat persetujuan Menteri dalam RUPS.

- a). Usulan write off terhadap piutang bermasalah yang sudah dibukukan dalam piutang sangsi per 31 Desember 2004 sebesar Rp. 344.835.314,00 (lampiran 2) mohon dapat disetujui.
- b). Dalam rangka pemberdayaan usaha kecil diperlukan kerjasama dengan instansi pemerintah lainnya.
- c). Himbauan dari Menteri BUMN agar instansi terkait dapat membantu penyelesaian piutang bermasalah.

Masalah yang dihadapi dan rencana penyelesaiannya.

Tingkat penilaian kinerja Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan belum tercapai berkaitan dengan posisi piutang bermasalah

Rencana penyelesaiannya piutang bermasalah untuk direscheduling dan reconditioning.

Jika tidak terpulihkan, mohon piutang bermasalah dapat dihapus bukukan (write off).

LAPORAN AKTIVITAS PROGRAM KEMITRAAN
 UNTUK TAHUN BUKU YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2005

ana Tersedi.

aldo Awal Dana, 01 Januari 2005	Rp.	25.173.461,04	
lokasi Penyisihan Laba Yang Diterima	Rp.	260.900.000,00	
merimaan Pengembalian Pinjaman	Rp.	305.128.318,00	
mlah Dana Yang Tersedia			Rp. 591.201.779,04

nggunaan Dana

Pinjaman			
Sektor Industri	Rp.	190.000.000,00	
Sektor Perdagangan	Rp.	220.000.000,00	
Sektor Pertanian	Rp.	10.000.000,00	
Sektor Peternakan	Rp.	15.000.000,00	
Sektor Perkebunan	Rp.	-	
Sektor Perikanan	Rp.	25.000.000,00	
Sektor Jasa	Rp.	97.500.000,00	
Sektor Lainnya	Rp.	42.500.000,00	
Jumlah Pinjaman	Rp.	600.000.000,00	

Pinjaman Khusus

Sektor Industri	Rp.	-	
Sektor Perdagangan	Rp.	-	
Sektor Pertanian	Rp.	-	
Sektor Peternakan	Rp.	-	
Sektor Perkebunan	Rp.	-	
Sektor Perikanan	Rp.	-	
Sektor Jasa	Rp.	-	
Sektor Lainnya	Rp.	-	
Jumlah Pinjaman Khusus	Rp.	-	

Hibah

Sektor Industri	Rp.	-	
Sektor Perdagangan	Rp.	-	
Sektor Pertanian	Rp.	-	
Sektor Peternakan	Rp.	-	
Sektor Perkebunan	Rp.	-	
Sektor Perikanan	Rp.	-	
Sektor Jasa	Rp.	-	
Sektor Lainnya	Rp.	14.750.000,00	
Jumlah Hibah	Rp.	14.750.000,00	

Jumlah Penggunaan Dana

Rp.	614.750.000,00
Rp.	(23.548.220,96)

Saldo Dana Yang Tersedia (A-B)

Pendapatan Tahun 2005			
Bunga Pinjaman	Rp.	35.316.516,00	
Jasa Giro	Rp.	3.513.896,28	
Deposito	Rp.	-	
Pendapatan Lain - Lain	Rp.	-	
	Rp.	38.830.412,28	

Beban Operasional Tahun 2005

Beban Survei	Rp.	-	
Beban Monitoring	Rp.	-	
Beban Penagihan	Rp.	-	
Beban Administrasi	Rp.	10.084.500,00	
	Rp.	10.084.500,00	

Surplus (Defisit) (D - E)

Rp.	28.745.912,28
Rp.	5.197.691,32

Saldo Akhir Dana per 31 Desember 2005

**LAPORAN AKUMULASI DANA PROGRAM KEMITRAAN
UNTUK TAHUN BUKU YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2005**

kumulasi Sumber Dana :

kumulasi Alokasi Penyisihan Laba s.d Tahun 2005		Rp.	2.144.026.590,00
kumulasi Penerimaan Pendapatan s.d Tahun 2005			
Bunga Pinjaman	Rp.	215.968.980,18	
Jasa Giro	Rp.	109.483.011,61	
Deposito	Rp.	-	
Pendapatan Lain-Lain	Rp.	-	Rp. 325.451.991,79
Jumlah: Akumulasi Sumber Dana s.d 31 Desember 2005			Rp. 2.469.478.581,79

kumulasi Penyaluran Dana :

kumulasi Penyaluran Dana s.d Tahun 2005

Pinjaman			
Sektor Industri	Rp.	936.150.000,00	
Sektor Perdagangan	Rp.	868.139.330,00	
Sektor Pertanian	Rp.	53.600.000,00	
Sektor Peternakan	Rp.	379.916.000,00	
Sektor Perkebunan	Rp.	97.985.000,00	
Sektor Perikanan	Rp.	105.000.000,00	
Sektor Jasa	Rp.	647.768.888,00	
Sektor Lainnya	Rp.	970.710.135,00	
Jumlah Pinjaman	Rp.	4.059.269.403,00	

Pinjaman Khusus

Sektor Industri	Rp.	-	
Sektor Perdagangan	Rp.	-	
Sektor Pertanian	Rp.	-	
Sektor Peternakan	Rp.	-	
Sektor Perkebunan	Rp.	-	
Sektor Perikanan	Rp.	-	
Sektor Jasa	Rp.	-	
Sektor Lainnya	Rp.	100.000.000,00	
Jumlah Pinjaman Khusus	Rp.	100.000.000,00	

Hibah

Sektor Industri	Rp.	8.346.333,00	
Sektor Perdagangan	Rp.	12.596.333,00	
Sektor Pertanian	Rp.	5.110.783,00	
Sektor Peternakan	Rp.	10.000.000,00	
Sektor Perkebunan	Rp.	-	
Sektor Perikanan	Rp.	8.346.000,00	
Sektor Jasa	Rp.	8.346.334,00	
Sektor Lainnya	Rp.	50.950.000,00	
Jumlah Hibah	Rp.	103.695.783,00	

Jumlah Penggunaan Dana

Jumlah Akumulasi Penyaluran Dana s.d 31 Desember 2005		Rp.	4.262.965.186,00
---	--	-----	------------------

**SUMBER DANA PROGRAM KEMITRAAN & BINA LINGKUNGAN
PER 31 DESEMBER 2005**

A. PROGRAM KEMITRAAN

I. Pembagian Laba Perusahaan

1. Tahun Buku 1996	Rp.	143.875.276,00
2. Tahun Buku 1997	Rp.	414.957.210,00
3. Tahun Buku 1998	Rp.	699.492.652,00
4. Tahun Buku 1999	Rp.	142.100.242,00
5. Tahun Buku 2000	Rp.	63.027.658,00
6. Tahun Buku 2003	Rp.	162.000.000,00
7. Tahun Buku 2004	Rp.	260.900.000,00

Jumlah I Rp. 1.886.353.038,00

II. Limpahan

1. PTP. Nusantara III	Rp.	164.071.653,00
2. PTP. Nusantara IV	Rp.	93.601.869,00

Jumlah II Rp. 257.673.522,00

III. Pengeluaran

Hibah kepada Mitra Binaan Rp. (103.695.783,00)

Jumlah Pengeluaran Dana Rp. 2.040.330.807,00

B. PROGRAM BINA LINGKUNGAN

I. Pembagian Laba Perusahaan

1. Tahun Buku 1999	Rp.	142.100.242,00
2. Tahun Buku 2000	Rp.	63.027.658,00
3. Tahun Buku 2002	Rp.	128.600.000,00
4. Tahun Buku 2003	Rp.	242.990.000,00
5. Tahun Buku 2004	Rp.	130.500.000,00

Jumlah I Rp. 707.217.900,00

Jumlah A + B Rp. 2.747.548.707,00

ALURAN PROGRAM BINA LINGKUNGAN
 NUSANTARA VI (PERSERO)
 TAHUN 2005 (POSISI DESEMBER)

Kab/Prop	Bentuk Bantuan					Jumlah
	Bencana Alam	Pendidikan / Pelatihan	Peningk. Kesehatan	Prasarana & Sarana	Sarana Ibadah	
Prop. Sumbar						
man	5.000	2.480	-	14.500	6.000	27.980
<	9.040	660	17.000	-	1.000	27.700
ota	-	480	-	52.279	-	52.759
ng	8.500	4.180	-	2.450	1.600	16.730
'Sij	-	10.000	-	-	-	10.000
ih Datar	3.500	-	-	-	-	3.500
ir Selaran	3.000	-	-	-	-	3.000
Sub Jumlah	29.040	17.800	17.000	69.229	8.600	141.669
Prop. Jambi						
si	3.720	14.380	47.250	5.000	18.750	89.100
ambi	7.930	18.640	10.000	255.662	43.000	335.232
ng Hari	3.790	7.080	-	14.700	5.000	30.570
nci	3.550	8.680	8.000	-	-	20.230
o	-	480	-	5.000	6.000	11.480
go	-	5.480	-	-	11.000	16.480
langun	3.870	5.480	-	5.000	17.880	32.230
abung Barat	-	2.580	-	-	5.000	7.580
Sub Jumlah	22.860	62.800	65.250	285.362	106.630	542.902
Total	51.900	80.600	82.250	354.591	115.230	684.571

LAMPIRAN 10



PTPN VI Peringati Hari LH Sedunia

Sebagai wujud dari kepedulian perusahaan terhadap lingkungan sekaligus memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang bertepatan tanggal 5 juni 2006, PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VI menggelar kegiatan bertema 'Cegah Bencana Lingkungan.'

Acara tersebut dilaksanakan oleh Direksi dan Karyawan PTPN VI dengan menanam pohon mahoni sebagai pohon pelindung di sepanjang Jalan utama Paal XI Lingkar Barat Kecamatan Kotabaru Kota Jambi.

Direktur SDM/Umum PTPN VI, Ir. H.Edy Yanto dan Direktur Produksi Ir.Paul Siregar merupakan orang pertama yang melakukan penanaman pohon pelindung tersebut dan kemudian diikuti para staf dan karyawan perusahaan. Sebanyak 21 batang tanaman mahoni berhasil ditanam di sepanjang Jalan Lingkar Barat atau di sekitar kantor DLLAJR Paal XI. Tanaman-tanaman mahoni ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih menambah kondisi lingkungan yang hijau, sehat dan asri.

Direksi BUMN di bidang perkebunan itu menyatakan kegiatan itu terkait dengan kenyataan bahwa lingkungan hidup

kita ini sudah sedemikian rusaknya. seperti air sungai yang tercemar oleh limbah merkuri, sampah dan limbah pabrik. "Belum lagi kerusakan hutan yang semakin kritis sehingga menimbulkan tanah longsor dan banjir sebab permasalahan lingkungan ini bukan tanggung jawab pemerintah saja tetapi menjadi tanggung jawab semua warga bangsa Indonesia," ujar Edi Yanto.

Apabila lingkungan sudah rusak atau alam ini menjadi tercemar, ungkapnya, maka yang paling utama merasakan kerusakan itu adalah manusia juga.

"Oleh karena itu kami dari perusahaan komit untuk mewujudkan keselamatan lingkungan, kesehatan lingkungan sesuai dengan tema *Cegah Bencana Lingkungan* karena lingkungan adalah bagian terdekat dari hidup manusia," ucapnya.

Sementara untuk meningkatkan produktivitas kerja di lingkungan perusahaan juga dilaksanakan kegiatan lain seperti gotong royong dengan membersihkan lingkungan kerja dan mengadakan kegiatan senam jantung sehat bersama. ²¹Edian

Jambi Independen

Hari/Tanggal : KAMIS, 08/06/06
Halaman : 9 & 14

SEMENTARA ITU...

PTPN VI Tanam Pohon Pelindung

KOTABARU- Dalam rangka peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 5 Juni 2006, Direksi dan Karyawan Kantor Direksi PTPN VI menanam pohon pelindung (mahoni) di sepanjang jalan utama Paal XI Lingkar Barat. Kegiatan dengan tema "Cegah Bencana Lingkungan" ini dilaksanakan Selasa (6/6).

Penanaman pohon tersebut diawali oleh Direktur SDM/Umum PTPN VI Ir H Edy Yanto dan Direktur Produksi Ir Paul Siregar. Selanjutnya diikuti staf dan karyawan PTPN VI.

"Kita berharap sejumlah pohon mahoni yang ditanam dapat menjadi sumbangsih menambah kondisi lingkungan yang hijau, sehat dan asri," kata Direktur SDM/Umum PTPN VI Ir H Edy Yanto. ■

baca PTPN hal 14

PN VI Tanam Pohon Pelindung ----- dari hal 9

urutnya, kegiatan ini di-
can sebagai wujud ke-
lian PTPN VI terhadap
ian lingkungan.

Sebelumnya, seluruh karya-
wan PTPN VI dan jajaran di-
reksi melaksanakan senam jan-
tung sehat bersama di halaman

depan kantor direksi PTPN VI,
di Jalan Zainir Haviz No 1
Kotabaru. Pada akhir kegia-
tan, seluruh karyawan me-

ngadakan kegiatan got-
royong bersama di ling-
ngan kerjanya masing-m
ing. (sal)

OTODA POST

Edisi : Nomor 18 TH. I/ Senin, 12 Juni 2006



Direksi PTP Nusantara VI Tanam Pohon Mahoni Sumbangsih Menjaga Kondisi Lingkungan Hijau



Jambi, OP

Hampir seluruh elemen masyarakat memperingati hari lingkungan hidup, karena lingkungan hidup yang sehat dan asri menjadi dambaan setiap manusia. Lingkungan yang bersih merupakan anjuran ajaran agama agar setiap manusia dapat

menjaga kebersihan.

Gubernur Jambi juga sudah meminta semua elemen masyarakat agar bersatu untuk menjaga lingkungan, melarang setiap pencemaran dan pengrusakan alam, memberikan contoh yang terbaik dengan masyarakat dalam memelihara lingkungan.

Wajar saja, dalam rangkaian lingkungan hidup sedunia baru-baru ini Direksi dan Karyawan Kantor Direksi PT Perkebunan Nusantara VI menanam pohon mahoni (pohon pelindung) di sepanjang jalan utama Paal XI Lingkar Barat dekat kantor DLLAJR, sebagai tanda kepedulian dalam menjaga lingkungan yang sehat dan bersih.

Penanaman pohon mahoni merupakan tanda partisipasi aktif dari PTP Nusantara VI yang ikut peduli dimulai dari pimpinannya yang tertinggi. Ini dibuktikan Direktur

SDM/Umum PTPN VI Ir H Edy Yanto dan Direktur Produksi Ir Paul Siregar merupakan orang pertama yang melakukan penanaman pohon pelindung tersebut.

Direktur SDM/Umum Ir H Edy Yanto mengharapkan, sejumlah pohon mahoni yang ditanam dapat menjadi sumbangsih menambah kondisi lingkungan yang hijau, sehat dan asri, karena menjaga kelestarian alam dan lingkungan merupakan kewajiban setiap manusia.

Tak hanya sampai disitu, Direksi PTPN VI juga mengadakan gotong royong bersama membersihkan lingkungan perkantornya, agar lingkungan kerja dapat lebih melahirkan ide-ide yang lebih positif.

Disamping itu, Direksi PTPN VI mengadakan senam jantung sehat bersama di halaman kantor Direksi PTPN VI dengan melibatkan seluruh karyawan yang ada. (Reg)

Jambi Ekspres

ambungan

Jambi Ekspres

Tanam Pohon Mahoni

KAMIS, 08 JUNI 2006 HAL. 10

JAMBI-Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang jatuh tiap tanggal 5 Juni, perusahaan perkebunan PTPN VI, marini (6/6) ikut peduli dengan menanam puluhan pohon mahoni di sepanjang sisi Jalan Lingkar Barat Pal XI atau cat kantor DLLAJ Jambi. Hal ini dilakukan, agar pohon ini bisa tumbuh agar dapat mem-

berikan dampak terhadap pelestarian lingkungan ke depan.

Penanaman pohon pelindung ini, dilakukan pertama oleh Direktur SDM/Umum PTPN VI, Ir H. Edy Yanto lalu disusul Direktur Produksi, Ir Paul Siregar dan selanjutnya diikuti staf dan karyawan yang lain. Acara dengan tema "Cegah Bencana Lingkungan," juga digelar rangkaian kegiatan se-

nam bersama di kantor pusat PTPN VI di jalan Zainir Haviz Kotabaru Jambi.

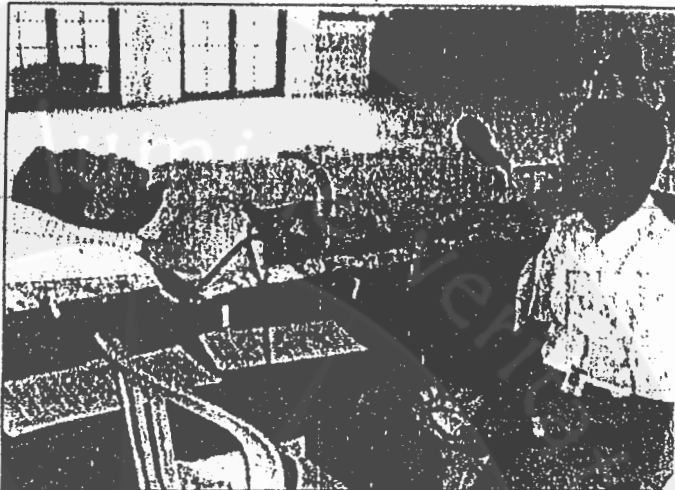
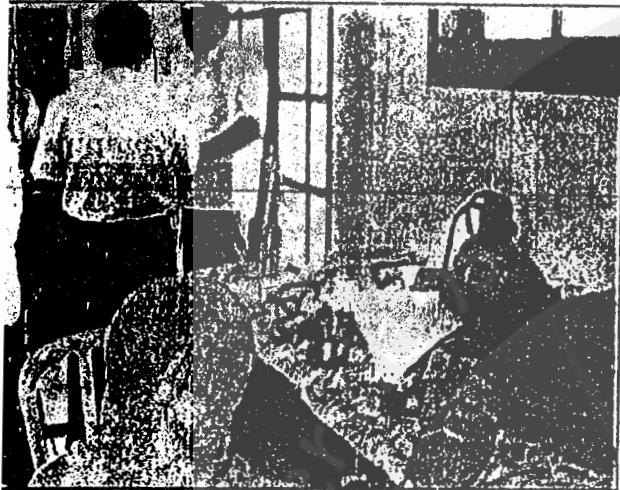
Selain itu, sebagai bentuk kegiatan lingkungan, PTPN VI juga menggelar acara gotong royong di lingkungan kerjanya. Suasana kegiatan ini, berlangsung sukses. Drs H. A. Karimuddin MM, kepada koran ini menyebutkan, kegiatan ini dilakukan karena meru-

pakan salah satu program perusahaan terhadap lingkungan.

Program ini sudah menjadi kegiatan rutin tahunan. Sebagai persoalan lingkungan sudah menjadi hak bersama untuk menjaganya. Maka itu, pohon atau hutan sebagai penyangg utama soal lingkungan hidup harus dilestarikan keberadaannya. (nrd/adv)

Jambi Ekspres

Hari/Tanggal : Rabu, 21 Desember 2005
Rubrik : Jambi Society, Halaman 16
Acara : Donor Darah (20 Des. 2005 di Aula Kandır PTPN VI)



dan panitia donor memeriksa kondisi peserta donor.

Karyawan PTPN VI sedang mendonorkan darahnya .

FOTO-FOTO **KURPRI**

Karyawan PTPN VI Donor Darah

AGAI ungkapan rasa kepedulian terhadap masyarakat Jambi, PTPN VI Jambi bersama mitranya, PMI Kota Jambi, kembali menggelar donor darah. Kegiatan yang berlangsung di Kantor PTPN VI

Kotabaru, Selasa kemarin (20/12) itu, sebanyak 60 orang karyawan berpartisipasi menyumbangkan darahnya.

Kepala Sekretaris PTPN VI, Dis H A Karimuddin MM, menjelaskan kegiatan donor ini rutin dilakukan dan bagi karyawan PTPN VI diharuskan menyumbangkan darahnya.

Tujuannya, adalah sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap pemerintah dalam hal penyediaan stok darah di PMI. "Sebanyak

60 kantong darah yang berhasil didapat, langsung disumbangkan kepada PMI Kota Jambi untuk disalurkan kepada orang yang memerlukan," jelas Karimuddin didampingi dinatorinya, Radhan SE. Disebutkannya, peserta donor, adalah para karyawan di lingkungan PTPN VI, seperti karyawan kebun Batubari, PKS Pungut Tinggi, Kebon Inti dan I Kausar. "Untuk kali ini, sudah termasuk kegiatan yang ketujuh," ungkap Karimuddin. (

PTPN VI
KORPORASI PERUSAHAAN PTPN VI
KORPORASI PERUSAHAAN PTPN VI
Program Media dan Komunikasi